



PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI



irektorat
dayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DEPDIKBUD

No. INDUK

22

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

TGL. CATAT. 14 JUL 1997

**PERANAN PENDIDIKAN
DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN
DAERAH BALI**

TIM PENULIS :

DRA. S. SWARSI

DRS. WAYAN GERIYA

DRS. IGUSTI MADE SUGIARTHA

TJOKORDA ISTRI PUTRI, BA

IDA BAGUS OKA WEDA

EDITOR / PENYEMPURNA :

DRS. IGUSTI KETUT GDE ARSANA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI
NILAI BUDAYA**

1996/ 1997

KATA PENGANTAR

Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa maka Proyek Penelitian dan Pengkajian dan Pembinaan Nilai - Nilai Budaya Bali Tahun 1992 / 1993 dapat melaksanakan kegiatan perekaman dan penulisan naskah Kebudayaan daerah yang meliputi 4 aspek yaitu :

1. Pembinaan Budaya dalam Keluarga Daerah Bali. Diketuai oleh Drs. I Gusti Ketut Gede Arsana
2. Peranan Pendidikan dan Pembinaan Kebudayaan daerah Bali diketuai oleh : Drs. Siluh Swarsi
3. Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota diketuai oleh I Made Supartha Endra kusuma, BA
4. Perekaman Upacara Tradisional Daerah Bali diketuai oleh Drs. I Nyoman Wenten.

Tujuan penulisan atau perekaman tersebut adalah untuk menginventarisasi dan pembinaan Nilai - nilai luhur bangsa dan untuk memperkuat Pengkayatan dan Pengamalan terhadap Pancasila dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional khususnya dibidang sosial budaya.

Berkat kerja sama yang baik dari semua pihak khususnya pihak - pihak Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Bali, dengan tim penulis yang terdiri dari ahli - ahli dari universitas Udayana dan Kanwil Depdikbud Propinsi Bali maka semua aspek - aspek tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, 2. Rektor Universitas Udayana, 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali, 4. Para Informan dan pihak - pihak lain yang ikut terlibat demi terwujudnya naskah ini.

Disadari bahwa, di dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Untuk itu kami selalu minta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya tulisan ini pada masa-masa mendatang. Mudah-

mudah dan tulisan naskah ini ada manfaatnya bagi pembangunan khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Mengetahui / menyetujui
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



Drs. Beratha Subawa
NIP. 130 264 546

Pemimpin Bagian Proyek
Penelitian, Pengkajian dan
Pembinaan Nilai - Nilai Budaya
Bali



Drs. I Nyoman Wenten
NIP. 131 640 345

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Organisasi Penulisan	12
BAB. II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
2.1. Lokasi Penelitian	14
2.2. Keadaan Alam	15
2.3. Kependudukan	16
2.4. Pendidikan	20
2.5. Ekonomi	24
2.6. Agama dan Kepercayaan	25
2.7. Kehidupan Politik	28
BAB. III. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL	
3.1. Dilingkungan Pendidikan Formal	34
3.2. Dilingkungan Pendidikan Luar Sekolah	35
BAB. IV. PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL	
4.1. Melalui Pranata Sekolah	42
4.2. Melalui Pranata Keluarga	50
4.3. Melalui Pranata Ekonomi	59
4.4. Melalui Pranata Politik	70
4.5. Melalui Pranata Keagamaan	79
BAB. V. ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Daftar Informan	111
2. Peta	120

Abstrak

Tujuan hakiki pendidikan nasional pada pokok tertuju bagi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Di dalamnya secara ekplisist mengandung suatu wahana yang bersifat konprehensif terbentuknya manusia Indonesia yang meletakkan secara seimbang kebutuhan asasi yang bersifat material maupun spiritual.

Keterpaduan dua aspek kebutuhan asasi secara seimbang mengandung makna bahwa pendidikan yang dicita-citakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tetap pula dijabarkan melalui undang-undang pendidikan no. 2 tahun 1989 adalah mengantarkan manusia dan masyarakat Indonesia kearah kemajuan, dinamis, kreatif, dan inofatif. Disamping itu aspeknya lebih bersifat memaknai hidup adalah keajegan jati diri sebagai insan sosial budaya yang mampu bertahan pada akar budayanya sendiri.

Disadari bahwa penjabaran dari dua kebutuhan asasi di atas dalam praktiknya bukanlah hal yang selalu berjalan secara harmonis, bahwa tak jarang berada pada jalur yang berbeda. kutub antara materialisme dan spiritualisme yang terutama yang berakar pada nilai-nilai budaya, sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional seyogyanya di arahkan ke dalam hubungan yang seimbang dan harmoni. Dengan demikian sosok manusia yang utuh yang dicita-citakan adalah manusia yang mandiri sebagai individu yang mampu memberikan sumbangan yang berarti kepada masyarakatnya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini patut dibanggakan, namun sekaligus adalah tantangan. Sebagai tantangan terkait erat dengan pertanyaan mendasar yakni sejauh mana peranan pendidikan di daerah yang dijabarkan melalui pranata-pranatanya melalui pranata sekolah, keluarga, ekonomi, politik dan agama, mampu berlangsung dalam suasana yang harmonis yang pada gilirannya mengarahkan terbentuknya manusia Indonesia yang berkepribadian Nasional.

Temuan dari hasil penelitian ini atas pertanyaan di atas pada hakikatnya bersifat multi dimensional. Di satu sisi potensi di daerah Bali cukup potensial bagi pembinaan kebudayaan nasional namun di sisi lainnya masih banyak di jumpai hambatan dalam aktualisasinya. Ham-

batan tersebut berkisar pada belum dipahaminya secara utuh konsepsi tentang kebudayaan nasional di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian pemahaman tentang kebudayaan nasional masih bersifat partial.

Rekomendasi. bahwa masih perlunya melakukan langkah-langkah sosialisasi maupun enkulturisasi mengenai arti dan fungsi dari kebudayaan nasional secara luas di masyarakat. langkah tersebut ,meliputi upaya mengaktualisasi potensi pendidikan dengan pranata-pranatanya secara optimal, dan bersamaan itu pula berupaya meminimalkan kendala-kendala yang masih dihadapi secara sistemik peranan pendidikan di daerah lebih diarahkan kepada pendidikan yang bersifat humaniora yang suturenya didukung oleh pranata-pranata seperti : sekolah, keluarga, agama dan pranata lain yang dinilai efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Latar Belakang Masalah*

Berbicara masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua aspek pembangunan yang terkait satu sama lain, saling terintegrasi satu sama lain, karena keduanya punya sasaran akhir, adalah membentuk serta mempercepat perwujudan manusia bermutu ataupun manusia seutuhnya, manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan sarana formal dalam membentuk manusia Indonesia yang bersifat utuh, yakni manusia yang bertakwa, cerdas trampil, berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia. Disamping kegiatan belajar mengajar, yang menjadi tugas utama dalam lembaga pendidikan maka pendidikanpun seyogianya berfungsi selaku pusat penembangan kebudayaan. Pusat penembangan kebudayaan diartikan sebagai tempat pencerminan dan pertumbuhan nilai - nilai baru yang akan tercermin dalam sikap dan perbuatan manusia dan masyarakat Indonesia.

Pernyataan di atas kalau dikaitkan dengan GBHN tahun 1988, pendidikan merupakan proses nilai budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Disisi lain juga disebutkan bahwa pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (Undang - undang Pendidikan no. 2 Tahun 1989)

Bertitik tolak pada pembicaraan di atas sudah jelaslah bahwa pendidikan suatu wahana untuk penerusan nilai nilai luhur budaya, yang punya akhir tujuan adalah manusia seutuhnya, atau manusia Indonesia yang Pancasilais yang seimbang lahir dan batin. Makna inipun terimplisit secara terpadu antara tujuan nasional ; tujuan pembangunan nasional maupun dalam tujuan pendidikan nasional, dan pula dalam tujuan kebudayaan nasional. Sasaran akhirnya bermuara pada mempercepat pembangunan yang berbudaya

Pembangunan berbudaya mengandung makna , manusia dan masyarakat Indonesia tetap maju; dinamis, kreatif, inovatif namun tidak tercabut dari akar budaya, yang mengacu pada nilai - nilai budaya bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang - undang Dasar 45 (Diolah dari Pembangunan Bali yang berwawasan Budaya Geriya 1990)

Disamping itu pula pembangunan yang berbudaya pada hakikatnya pula, sesiau dengan tujuan pembangunan nasional, sasaran utama juga membentuk manusia yang utuh. Manusia yang utuh seperti digambarkan pula dalam tujuan pendidikan adalah : 1) Manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha esa; (2). Manusia yang cerdas; (3) Manusia yang terampil; (4) Manusia tinggi budi pekertinya; (5) Manusia yang kuat pribadinya; (6) Manusia yang tebal semangat kebangsannya ; (7). Manusia yang mandiri; (8). Manusia yang bertanggung jawab (di olah dan dasarikan dari GBHN, 1988 : 1945).

Bapak Darji Darmodiharjo dalam tulisan pada " Analisa Pendidikan" menyatakan bahwa : manusia yang utuh adalah manusia yang mandiri sebagai individu yang mampu memberi sumbangan yang berarti kepada masyarakatnya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pengembangan Manusia yang mengarah pada Manusia yang utuh, dengan mendaya gunakan lingkungan, kesempatan, serta sarana dan lingkungan yang ada, pendidikanlah yang memegang faktor kunci dalam pembinaan pengembangan kebudayaanm atau dalam pembentukan manusia yang berbudaya, manusia yang utuh, yang seimbang lahir dan batin.

1.2. Permasalahan.

Seperti telah dijelaskan di atas pendidikan merukapan faktor kunci untuk pembinaan dan pengembangan Kebudayaan. Muara akhirnya adalah manusia yang utuh: manusia yang berkualitas baik secara fisik maupun non fisik.

Melalui kebudayaan manusia pada hakikatnya memanusiaikan dirinya sendiri, dalam arti mengembangkan logika etika, estetika serta menentukan pilihan sendiri dari kehidupan atas penilaian baik dan buruk menurut sistem penilaian yang berkembang dalam kebudayaan (Geriya,1991)

Untuk terwujudnya cita-cita, tujuan pembangunan di atas diperlukan suatu kebijaksanaan - kebijaksanaan pemerintah dalam rangka mengoperasionalkan konsepsi-konsepsi yang ada dalam UU No. 2 Tahun 1992, GBHN 1988, yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Seperti apa yang telah ditulis oleh seorang pakar ilmu sosial budaya (Dr. Jujun.S. Sirissumantri) yang menulis tentang pembangunan sosial budaya secara terpadu tahun 2000, menyatakan sebagai berikut : (1) Kebijakan datar yang merupakan pemersatu (The Commodominator) segenap sektor kebudayaan dan (2) Masing sektor kebudayaan yang satu dengan yang lain terkait oleh unsur pemersatu tersebut. Kebijakan tersebut merupakan upaya meletakkan sistem budaya nasional. Disamping itu pula mengacu pada tujuan pengembangan kebudayaan nasional adalah membentuk manusia Indonesia Modern yang berdasarkan Pancasila, yang adil makmur baik material maupun spiritual, dengan anggota masyarakat yang taqwa; cerdas; terampil; berbudi luhur; berkepribadian Indonesia. Untuk itu kebijakan dasar pembangunan sosial budaya diarahkan pada ; (1) Penerimaan dan pembentukan kebudayaan Indonesia luhur, kehidupan berbangsa dan bernegara.; (2) Pengembangan Perangkat; (kelembagaan) sosial yang berpijak pada nilai - nilai budaya yang luhur, asas berbangsa dan bernegara, serta termasuk dalam pengembangan sikap dan tindakan yang berbudaya; (3) Pengembangan Kondisi yang obyektif yang mendorong perlembagaan nilai - nilai yang ingin ditumbuhkan tersebut, baik manusia perorangan maupun perangkat sosial; (4) Penyediaan prasarana dan sarana dan sarana sosial yang mendukung terwujudnya ketiga tujuan di atas.

Sarana tersebut di atas, terwujudkan dalam pendekatan yang mendidik, pengembangan partisipasi masyarakat yang demokratis, Pendekatan tersebut dengan istilah edukatif - digmatif partisipatif. berdasarkan kerangka pikir di atas dikembangkan pokok - pokok kebijaksanaan untuk setiap sektor kebudayaan Apakah permasalahan yang muncul dalam pembinaan dan pengembangan sektor kebudayaan. Pembinaan dan pengembangan kebijaksanaan kebudayaan, bisa melalui berbagai jalur; seperti Bali melalui jalur pendidikan formal maupun

non formal; ,melalui jaliur sekolah; melalui jalur politik; melalui jalur ekonomi; melalui jalur keagamaan.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas persoalan pokok yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah " seberapa jauh peranan pendidikan serta pranata - pranatanya yang berlaku dalam budaya lokal maupun budaya daerah Bali". Ruang lingkup permasalahan , akan dibahas pada masalah - masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebudayaan Nasional. Masalah ini dapat memberikan suatu cermin bahwa, apresiasi masyarakat pada kebudayaan Nasional, kurang, cukup atau telah mantap, (2) Seberapa jauh peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional yang dibahas dalam Pranata : (1) Pembinaan dalam pranata sekolah, (2) Pembinaan dalam Pranata Keluarga, (3) Pembinaan dalam Pranata Ekonomi, (4) Pembinaan dalam pranata Politik dan, (5) Pembinaan dalam Pranata Keagamaan.

Dari pembahasan kelima pranata tersebut di atas akan kita peroleh gambaran apakah pembinaan kurang, cukup dan mantap.

1.3. Tujuan

Tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi inilah agar pusat penelitian Sejarah dan Budaya mempunyai data informasi tentang keadaan pembinaan kebudayaan di Indonesia yang dapat disumbangkan untuk menyusun kebijaksanaan nasional dibidang kebudayaan, rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat tujuan jangka panjang dan jangka pendek.

Tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang adalah terkumpulnya bahan - bahan peran pendidikan sebagai wahana untuk pembinaan kebudayaan nasional.

Tujuan jangka pendek

Tujuan jangka pendek adalah : (1) untuk mendapatkan suatu gambaran, tentang persepsi masyarakat yang terklasifikasi dalam status, pendidikan, pegawai negeri, budaya tokoh politik, tokoh agama, pedagang melalui, pranata masing - masing. Atau mendapat gambaran

tentang pembinaan / pengembangan melalui pranata sekolah, pranata ekonomi, pranata politik, pranata keluarga dan pranata melalui agama. (2) mendapat gambaran tentang peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional, (3) seperti telah dijelaskan di atas untuk menyusun kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui jalur pendidikan.

Karangan ini akan menyajikan deskripsi dan analisis tentang peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional, maka hal ini akan dapat memberikan gambaran tentang eksistensi pendidikan dengan berbagai pranata - pranata yang tercakup didalamnya, sehingga potensi tersebut dapat disumbangkan bagi kepentingan pembangunan.

1.4. *Ruang Lingkup*

Ruang lingkup konsepsi dalam pembahasan ini adalah konsepsi pendidikan dan konsepsi kebudayaan nasional. Seperti telah dijelaskan di atas pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Disisi lain dapat dijelaskan pula, peranan dan fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional (UU No. 2 Tahun 1989). Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Secara operasional peranan pendidikan yang fokus bahasan dalam penelitian ini, sebagai wahana untuk meneruskan nilai - nilai luhur budaya bangsa, untuk dapat dihayati dan digunakan sebagai pola bagi, pola tatanan tingkah laku manusia dan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembinaan kebudayaan nasional adalah : suatu upaya untuk menumbuh kembangkan kreatifitas, kemampuan; seseorang agar menjadi manusia yang berkualitas. Peranan pendidikan adalah aktivitas di lingkungan pendidikan yang menyangkut pembentukan sikap mental seseorang, dan kepribadian. Pendidikan sebagai wahana untuk melestarikan kebudayaan, dipakai untuk perubahan kebudayaan (diolah dari 1991)

Konsepsi kebudayaan sebagai konsep yang akan digunakan sebagai tolok ukur mengenai seberapa jauh persepsi masyarakat terhadap kebudayaan nasional adalah penggabungan dari beberapa konsepsi kebudayaan nasional yang telah dirumuskan secara formal pada UUD 1945 pasal 32, rumus operasional yang terjabar dalam GBHN 1988 dipadukan dengan konsepsi dari berbagai pakar kebudayaan seperti : Konsepsi dari Prof. DR. Koentjaraningrat, Ki Hajar Dewantara; Mantan Mendikbud DR. Daud Yoesuf dan juga Prof. DR. Haryati Subadio. Disisi lain konsepsi kebudayaan nasional yang baru berkembang mulai Konggres Kebudayaan tahun lalu yang dicetuskan oleh Umar Kayam.

Konsepsi tersebut di atas adalah sebagai berikut : Konsepsi formal kebudayaan nasional yang termaktub dalam UUD 1945, pasal 23 adalah : " pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional " kemudian dalam penjelasannya menyebutkan bahwa : " Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak - puncak kebudayaan di daerah - daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus mampu kearah kemajuan adab, budaya dan pemersatu dengan tidak menolak bahan - bahan baru dari kebudayaan asing dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pernyataan konsepsi di atas, dengan jelas disebut bahwa kebudayaan nasional ialah kebudayaan yang didasarkan atas kebudayaan - kebudayaan di daerah - daerah serta dikembangkan sepanjang sejarah, serta unsur kebudayaan dari luar dapat merupakan kebudayaan nasional (Haryati Subadio, 1991;58)

Garis - Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR NO. II/MPR/1988) menyebutkan bahwa kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila adalah perwujudan Cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa. serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.

Baik dari pasal 32 Undang - undang Dasar 1945 beserta penjelasannya maupun Garis - Garis Besar Haluan Negara, dapat disarikan bahwa kebudayaan nasional itu merupakan perwujudan dari kebudayaan bangsa Indonesia yang terdiri dari Puncak - puncak kebudayaan di daerah - daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa puncak-puncak dan sari - sari kebudayaan terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang berjiwa nasional, itulah kebudayaan nasional.

Sementara itu Umar Kayam (1991 : 11) mengutarakan bahwa kebudayaan nasional adalah Kebudayaan baru dari bangsa yang baru yang sedang meninggalkan kebudayaan pertanian - tradisi - feodal; yang terus menerus merumuskan berbagai pernyataan budaya di segala bidang untuk dapat menjawab dengan cerdas dan kreatif tantangan budaya industri dan perdagangan. Dalam pengembangan kebudayaan nasional, pada intinya adalah menemukan dan menciptakan sebanyak mungkin unsur - unsur budaya baru yang kita dapat dari daya kreatifitas dalam memahami dan merumuskan kembali dialog kita dengan unsur - unsur budaya daerah dan dunia.

Dari Konsep - konsep tadi makin jelas menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya kebudayaan nasional Indonesia itu telah menampakkan diri sebagai wujud dari buah budi atau cipta, rasa dan karsa rakyat Indonesia, yang perlu dibangun dan dikembangkan dengan cara menumbuhkan daya kreatifitas kemampuan segenap rakyat Indonesia itu antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal disekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan : keparmukaan, keluarga. Sementara itu pula Koentjaraningrat (1990 : 108) dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional memberikan saran yaitu harus dilakukan usaha - usaha serius untuk meninggikan kapasitas intelektual : kebiasaan membaca buku, meningkatkan pengetahuan umum dan lain sebagainya. Disamping konsespsi di atas dicoba pula mengoperasionalkan kuesioner isi dari kebudayaan nasional. Isi atau unsur kebudayaan yang digunakan, adalah pendapat dari Bapak Koentjaraningrat yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan : mencakup

- (1) Unsur Teknologi;
- (2) Unsur Ekonomi / Sistem Mata Pencaharian Hidup.

- (3) Unsur Organisai Sosial;
- (4) Unsur Sistem Pengetahuan
- (5) Unsur Bahasa
- (6) Unsur Kesenian
- (7) Unsur Religi

Unsur - unsur inilah yang digunakan untuk menjaring pendapat dari responden, yang hasil jawabannya akan dibahas dalam bab-bab berikut, khususnya pada bab yang membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kebudayaan nasional.

Disisi lain pula merangkum persepsi masyarakat tentang fungsi kebudayaan nasional. Fungsi kebudayaan digunakan sebagai acuan adalah :

- (1) Sebagai suatu sistem gagasan dan pelambang yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia
- (2) Sebagai suatu gagasan dan pelambang yang dapat dipakai oleh semua warga Indonesia yang berbhineka, untuk saling berkomunikasi dan dapat memperkuat solidaritas maupun jati diri bangsa Indonesia (Konetjaraningrat; 1985 , 111).

Kerangka pikir di ataslah yang dicoba untuk digunakan dengan indikator untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kebudayaan nasional. Serta kerangka pikir baik formal maupun yang berkembang di kalangan pakar kebudayaan; seyogianyalah dapat disosialisasikan serta dienkulturasikan pada masyarakat luas, hingga secara kognitif masyarakat dapat mengetahui kebudayaan nasional sebagai pola tatanan masyarakat Indonesia.

Disamping konsep dan fungsi kebudayaan; data konsep tentang pendidikan; perlu pula dijelaskan konsep pembinaan. Pembinaan adalah langkah dan upaya untuk menumbuhkan kreatifitas kemampuan seseorang untuk menentukan, sesuatu dalam khal ini kreatifitas yang diarahkan pada pembinaan untuk mendukung pengembangan kebudayaan nasional sebagai kebudayaan baru. Disamping hal tersebut di atas perlu disimak tentang Pembangunan Nasional yang berbudaya,

kembali mendapat penekanan oleh Bapak Presiden dalam sambutan pembukaan Konggres Kebudayaan tahun 1991. Melalui konsepsi ini diharapkan bahwa pembangunan nasional makin memperoleh bobot dan makna kwalitatis dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju , makmur dan berkeadilan serta utuh, tanpa mereka tercabut dari akar budayanya sendiri.

Apabila ditelusuri, dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke II (PJPT II) sebagai era kebangkitan nasional II, pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, dalam rangka pembangunan kualitas masnusia Indonesia, agaknya menjadi prioritas. Dalam kaitan ini fungsi-fungsi berbagai faktor saling terjalin secara holitis, makin berimbang dan secara khusus peranan pendidikan dan kebudayaan semakin penting (Geriya, 1992)

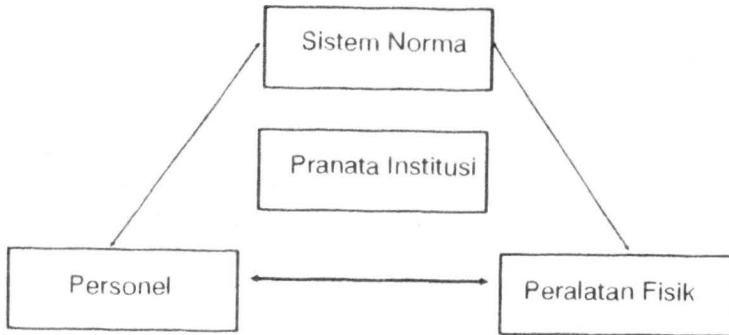
Secara operasional karena penting peranan pendidikan dalam pembangunan kebudayaan cukup luas, maka fokus bahasan, melingkupi peranan pendidikan dalam beberapa pranata - pranata yang berlaku dalam budaya Bali mencakup : Peranan pendidikan yang mencakup pranata sekolah; pranata ekonomi, pranata keluarga, pranata politik; dan pranata keagamaan.

Lingkup konsep pranata secara operasional yang menjadi acuan bahasan adalah : suatu sistem aktifitas khas dari kelakuan yang berpola serta komponen - komponennya / sistem norma dan tata kelakuan dan peralatannya (Koentjaraningrat, 1990 : 14). Selanjutnya acuan bahsan yang digunakan pada uraian berikut ini , adalah bagan pranata yang mencakup beberapa komponen

- (1) Komponen sistem norma;
- (2) Komponen personel;
- (3) Komponen peralatan fidik (Koentjaraningrat, 1987;15) Bagan suatu penata adalah sebagai berikut :

Bagan

Bagan I Pranata Sosial (Institution)
dengan komponen - komponannya



Diolah dari sumber buku Kebudayaan Mentalitas
dan Pembangunan 1987

1.4. *Lingkup Alokasi Penelitian*

Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan suatu pedoman pelaksanaan penelitian yang telah dicanangkan oleh proyek pengkajian nilai - nilai budaya Pusat - Jakarta. permasalahan yang membahas mengenai " Peranan Pendidikan dalam Rangka Pembinaan Kebudayaan Nasional di Daerah Bali " baru untuk pertama kali diteliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Berkaitan metode / Teknik " Purposive Sample " (Diuraikan pada metode penelitian), maka lokasi telah ditentukan hanya di Ibu Kota Dati I (di Kota Denpasar). Dalam hal ini Daerah Tingkat I Bali di Denpasar., dan telah pula ditentukan beberapa responden sebagai berikut :

- (1) Instansi Pemerintah;
- (2) Responden Keluarga
- (3) Responden dari Sekolah
- (4) Responden dari lembaga keagamaan. hal inipun secara rinci telah dijelaskan pada uraian tentang metode di bawah ini.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan

Metode ini telah berperan sejak awal, yaitu dalam usaha tim untuk mendalami serta memperluas wawasan tentang masalah dan materi lingkup penelitian / termasuk konsep - konsep; kerangka teoritis untuk kepentingan analisis. Melalui metode telah dihasilkan suatu daftar kepustakaan yang berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembaharuan kebudayaan nasional, serta jumlah informan maupun responden terlampir dibawah ini.

2. Metode Observasi

Jenis observasi yang dipakai adalah observasi partisipasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang terwujud sebagai kesatuan - kesatuan gejala dan peristiwa yang dapat diamati dalam rangka peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional.

3. Metode Kuesioner

Metode kuesioner (Selo Sumardjan, Koentjaraningrat, 1979;215). Metode digunakan untuk memperoleh data, dengan menyampaikan pertanyaan secara teliti. Metode ini didapatkan sejumlah responden yang tertera pada lampiran di akhir laporan ini. Responden tersebut telah ditetapkan pada kerangka acuan yang dicanangkan oleh pihak pusat.

Dalam hal sasaran dan lokasi penelitian telah pula ditentukan menggunakan teknik / metode : Purposive sample " tipe sampling ini biasanya digunakan berdasarkan penelitian subyektif peneliti yang mengnaggap bahwa individu adalah representatif untuk suatu populasi (J.Vredenbregt,1978:133). Berdasarkan teknik sample ini, maka ditentukan sasaran penelitian sebagai berikut.

- (1) Instansi pemerintah 20 responden; dengan rincian dari Biro Umum Pemda Tk. I Bali; Bina Pemerintahan; Biro Bina Mental; Dinas Pendas; Dinas Kebudayaan dan BP7 Bali;
- (2) Responden yang mewakili keluarga.

- (3) Responden dari Sekolah yang terdiri dari SLTA Negeri; SLTA swasta; Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri;
- (4) Responden Koperasi dan Pasar.
- (5) Responden dari lembaga Keagamaan rincian Hindu, Islam, Katolik. Untuk mendapatkan data kualitatif diadakan pula interviu pada beberapa key Informan.

5.2. *Organisasi Tulisan*

mengingat titik berat penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif maka pekerjaan awal adalah membuat suatu pedoman wawancara dan kuestioner. Kuestioner telah dibuat oleh panitia. Kemudian diintegrasikan data yang dikumpulkan baik dari sumber primer maupun sumber skunder. Hasil pengisian kuestioner, ditabulasi sebagian kecil, terutama pertanyaan yang lebih bersifat tertutup. Sedangkan pertanyaan yang bersifat terbuka, jawaban tersebut digunakan untuk kepentingan analisis kualitatif

Karena laporan ini, mengatakan analisis, maka dalam tahap ini juga dipersiapkan kerangka teoritis yang relevan serta beberapa refren yang menjadi landasan dan aucuan analisis.

Tahap Penulisan Laporan

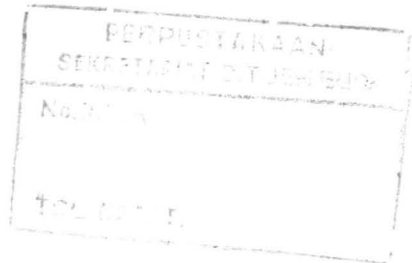
Pedoman penulisan laporan, didasarkan kepada kerangka laporan dan sistem penulisan yang termuat dalam buku kerangka acuan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan laporan penelitian. Sitematika laporan terlihat seperti tercantum dalam daftar isi di depan. Hasil pertama laporan yang merupakan draf diperiksa oleh ketua aspek dan dibahas dalam tim penelitian yang inti. Hasil bahan tersebut, akhirnya akan menghsilkan laporan yang disampaikan kepada tim pusat evaluasi. Dengan berpegang pada tujuan jangka pendek, maka hasil akhir oleh penelitian, cukup memadai terkumpulnya dan terungkap data serta informasi mengenai peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional. Kalau ditinjau secara detail, yakni dalam rangka melihat peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan

nasional yang menggunakan purposive sample, secara obyektif disampaikan, pada hakekatnya belum bersifat menyeluruh dan bulat..

Begitu pula tentang kesimpulan yang dirumuskan dari analisis, agak bersifat kesimpulan hipotesis. Kelemahan metode ini, khusus menyangkut model analisis, kerangka teoritis dan teknik sampling masih dirasakan belum memadai.

Walaupun hasil ini pada hakikatnya belum bersifat menyeluruh dan bulat, namun hasil ini telah bisa digunakan acuan untuk melihat peranan pendidikan dengan lima pranatanya dalam pembinaan kebudayaan, masih perlu ditingkatkan.

Secara ideal peranan pendidikan cukup tinggi serta sangat potensial untuk pembinaan kebudayaan, nyatanya potensi tersebut belum secara maksimal dapat dipergunakan. Mudah-mudahan kesimpulan dan saran yang terurai pada akhir laporan ini digunakan acuan untuk melihat kelemahan kita dan dipakai landasan untuk merumuskan penelitian yang mendalam dan berlanjut.



BAB II

GAMABARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Daerah Bali merupakan salah satu dari 27 Propinsi di Indonesia, Propinsi Bali, di sebelah barat bertetangga dengan propinsi Jawa Timur yang dibatasi oleh Selat Bali; di sebelah utara bertetangga dengan propinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang dibatasi oleh laut Jawa dan laut Bali; di sebelah Timur bertetangga dengan propinsi Nusa Tenggara Barat yang dibatasi oleh selat Lombok dan sebelah selatan adalah Lautan Indonesia. Secara administratif, Propinsi Bali terdiri dari delapan Kabupaten, 51 Kecamatan dan 631 buah desa Dinas (Lihat Tabel 2.1 dibawah ini)

Iklim pulau Bali adalah iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. disini terdapat musim kemarau dan musim hujan diselingi oleh musim pancaroba. Curah hujan didaerah Bali rata - rata setinggi 120 mm perbulan. Musim penghujan berkisar pada bulan Oktober sampai bulan April dan musim Kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Suhu pada pulau Bali dipengaruhi oleh ketinggian tempat, rata - rata suhu pulau Bali 28 sampai dengan 30^o celcius. Kelembaban udara di Bali berkisar antara 60 % - 90 % yaitu pada musim hujan bisa mencapai 100 % sedangkan pada musim kering mencapai 60 %

Tabel 2.1.
Pembagian Administratif Propinsi Bali menurut jumlah Kabupaten,
Kecamatan dan Desa Dinas, Banjar Dinas

No	Kabupaten *)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa Dinas	Jumlah Banjar Dinas
1.	Badung	7	78	648
2.	Gianyar	7	61	500
3.	Klungkung	4	56	241
4.	Bangli	4	69	188
5.	Karangasem	8	60	532
6.	Buleleng	9	146	439
7.	Jembrana	4	51	246
8.	Tabanan	8	110	721
	Jumlah	51	631	3551

Sumber **Statistik Daerah Bali, 1991 : 23**

*) Belum termasuk Kodya Denpasar.

2.2. Keadaan Alam

Luas Pulau Bali ,adalah 5.632,86 km². Luas masing - masing Daerah Tingkat II (Kabupaten) adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Luas
1.	Buleleng	1.320,80 km ²
2.	Jembrana	841,80 km ²
3.	Tabanan	863,06 km ²
4.	Badung	542,50 km ²
5.	Gianyar	368,00 km ²
6.	Bangli	520,00 km ²
7.	Klungkung	315,00 km ²
8.	Karangasem	816,70 km ²
	Jumlah	5.632,86 km ²

Potensi Pulau Bali yang merupakan kekayaan alam sebagian besar terdiri dari bahan galian seperti batu padas, karang bukit, pasir, kerikil. Dipulau Bali belum ada diketemukan hasil tambang dan mineral yang berarti. Ditengah - tengah pulau Bali terbentang pegunungan tersebut ada beberapa gunung yang merupakan puncaknya yaitu Gunung Merbuk, di Kabupaten Jembrana dengan ketinggian 1.356 m, Gunung Patas di Kabupaten Buleleng dengan ketinggian 1.414 m, Gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan dengan ketinggian 2.276 m, Gunung Pohang di Kabupaten Tabanan dengan ketinggian 2.098 m, Gunung Pegilingan di Kabupaten Tabanan dengan ketinggian 2.098 m, gunung Batur di kabupaten Bangli dengan Ketinggian 1.717m, Gunung agung di Kabupaten karangasem dengan ketinggian 3.140m, Gunung Seraya di Kabutaen Karangasem dengan ketinggian 1.717m. Gunung Agung dan Gung Batur adalah gunung Berapi yang masih aktif. Disebelah utara dan selatan pegunungan tersebut terbentang tanah dataran. Karena letak pegunungan lebih ke utara, maka luas dataran di sebelah selatan pegunungan. Juga di tengah - tengah pulau Bali terdapat tiga buah danau antara lain : Danau Beratan dengan luasnya +370 ha, Danau Tamblingan dengan luasnya +110 ha dan di sebelah timurnya terdapat Danau yang berkepundan yaitu : aDanau Batur dengan luasnya + 1.718,75 ha.

Dari pegunungan yang memanjang mengalirlah sungai - sungai yang bersumber dari hutan kebanyakan mengalirlah ke arah utara. Sungai - sungai itu merupakan sumber irigasi. Diantara sungai - sungai yang terpenting di daerah Bali adalah : Sungai Unda, Sungai Petanu, Sungai Ayung, Sungai Pulukan, Sungai Loloan, Sungai tersebut pada umumnya sangat sempit, dangkal sehingga tidak dapat dilayari. Sungai sungai tersebut di atas bersifat intermittent yang hanya mengalirkan air pada musim hujan saja. Perpaduan antara gunung, danau, sungai, jalan merupakan panorama yang sangat indah untuk dinikmati.

Di antara 8 Kabupaten yang mewakili lokasi penelitian yang berjudul Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Daerah Bali, terfokus di Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar dengan Ibukotanya Denpasar. Wilayah Kota Denpasar terletak ditengah-tengah pulau Bali bagian selatan. Di atas telah disebutkan luas wilayah kota denpasr 542,50 km² yang terdiri dari 7 Kecamatan dengan luas masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas
1.	Kecamatan Denpasar Barat	50,06 km ²
2.	Kecamatan Denpasar Timur	27,73 km ²
3.	Kecamatan Denpasat Selatan	46,19 km ²
4.	Kecamatan Kuta	152,15 km ²
5.	Kecamatan Mengwi	82,00 km ²
6.	Kecamatan Abiansemal	69,00 km ²
7.	Kecamatan Petang	116,00 km ²
	Jumlah	542,50 km ²

2.3. Kependudukan

Untuk memperoleh data berupa jumlah angka suku bangsa Bali masa kini merupakan suatu kesulitan, karena sejak kasus penduduk tahun 1961 dan seterusnya tidak lagi melibatkan suku bangsa. Tetapi berpangkal tolak dari pandangan bahwa suku bangsa Bali adalah secara mayoritas memeluk agama Hindu, sehingga dapat diperkirakan jumlah suku bangsa bali dengan menghitung jumlah penganut agama Hindu,

dengan catatan ada sejumlah kecil bangsa Bali yang menganut bukan agama Hindu.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1978 jumlah penduduk daerah Bali seluruhnya yaitu 2.618.369. Dalam tahun 1991 (Statistik Bali 1991) Jumlah penduduk Bali meningkat menjadi 2.715.840 Jiwa. Demikian juga khusus untuk wilayah Kota Denpasar yang terdiri dari 7 Kecamatan, menurut sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk di wilayah Kota Denpasar + 588.526 jiwa. Penduduk laki - laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan masing - masing sebanyak 298.506 jiwa dan 290.020 jiwa dengan jumlah KK/Rt. 111.261 KK. Jumlah penduduk setiap tahun dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1990 meningkat dengan diikuti meningkatnya tingkat perkembangan pertumbuhan penduduk seperti tampak dalam tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Kota Denpasar
Dari Tahun 1972 sampai dengan tahun 1990

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
1	1972	407565	1,83
2	1973	408076	0,13
3	1974	414102	1,46
4	1975	427709	3,18
5	1976	536159	1,94
6	1977	439097	1,67
7	1978	443101	0,90
8	1979	44663	0,80
9	1980	504300	2,54
10	1981	513148	1,03
11	1982	515410	0,44
12	1983	517677	0,44
13	1984	533271	3,04
14	1985	539236	1,12
15	1986	550632	2,11
16	1987	562397	2,14
17	1988	572240	1,75
18	1989	579899	1,34
19	1990	588526	1,49
		663.084 *)	2.78 *)

Sumber : Badung dalam angka 1990. *) Hasil Sensus Penduduk 1990

Suku bangsa Bali di daerah Bali pada umumnya, dari segi wilayah pemukiman dapat dikategorikan yaitu : Wilayah pemukiman di daerah Bali dan Wilayah pemukiman di luar daerah Bali.

Di Wilayah pemukiman di daerah Bali ini tersebar di seluruh desa yaitu : Wilayah pemukiman di daerah Bali dan Wilayah pemukiman diluar daerah Bali.

Di wilayah pemukiman di daerah Bali ini tersebar di seluruh desa yaitu : sejumlah 631 Desa Dinas dan 3.551 desa Adat (Banjar Dinas). Sedangkan pemukiman untuk kota Denpasar tersebar di seluruh desa yaitu sejumlah 78 Desa Dinas, 150 Desa Adat, 625 Banjar Dinas, 837 Banjar Adat. Persebaran pemukiman ini mencakup, baik di wilayah pemukiman pedesaan maupun perkantoran, pemukiman pantai maupun pegunungan.

Pola pemukiman mereka, baik di wilayah daerah Bali maupun di daerah-daerah transmigrasi, memakai bentuk pemukiman desa adat dan banjar sebagai kesatuan wilayah. Mereka terikat oleh ikatan wilayah, rasa cinta dan bangga kepada wilayah serta ikatan agama hindu dan adat istiadatnya. (Geriya ; 1985 ; 21)

Wilayah Kota Denpasar dengan Ibu kotanya Denpasar tumbuh dan berkembang pesat setelah ditetapkan menjadi Ibukota Propinsi Bali pada tahun 1953. Pusat kegiatan administrasi pemerintahan berangsur - angsur pindah dari Kota Singaraja Ibu Kota lama Propinsi Bali, Dengan berdirinya Universitas satu-satunya Universitas negeri di Bali, mempunyai peranan yang cukup besar pula terhadap perkembangan Kota Denpasar, yakni sejak tahun 1962 sampai saat ini. Perkembangan kota semakin menonjol setelah pemerintahan Orde baru melaksanakan pembangunan nasional lewat proyek - proyek Pelita. Beberapa diantaranya adalah pembangunan pusat kegiatan pariwisata di Sanur, Kuta dan Nusa Dua dan lain - lain.

Mengenai mobilitas orang Bali pada umumnya, khususnya di wilayah kota Denpasar dapat dibedakan atas : 1) Mobilitas Intern di pulau Bali, 2) Mobilitas di luar pulau Bali. Mobilitas intern pulau Bali adalah terutama dalam bentuk perpindahan dari desa ke kota, terutama urbanisasi ke kota Denpasar yang didorong dan ditarik (push dan full factors) oleh beberap hal, seperti kesempatan kerja, pendidikan dan lain

lain. Disamping itu pula terjadi migran lokasi, dari desa satu ke desa lainnya, seperti misalnya migran ke desa wilayah perkebunan kelapa dan kopi (perkebunan di kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana). Akhir akhir ini tampak ke wilayah - wilayah wisata, seperti Sanur dan Kuta. Sedangkan di luar wilayah kota Denpasar pusat pariwisata ada di daerah Ubud termasuk Kabupaten Gianyar, Candi dasa di Kabupaten Karang- asem.

Mobilitas ke luar daerah Bali terwujud dalam mobilitas non transmigrasi dan transmigrasi terutama menuju pulau Jawa untuk kepentingan pendidikan dan pekerjaan.

Menurut komposisi umur, keadaan penduduk di wilayah kota Denpasar berdasarkan data sensus penduduk tahun 1990, seperti tampak dalam Tabel 2.3. dibawah ini.

Tabel 2.3.
Penduduk Wilayah Kota Denpasar
Menurut Komposisi Umur Sensus Penduduk
Tahun 1990

No	Kelompok Umur	Hasil SP 1990 (%)	Hasil 1985 (%)	Jumlah Penduduk Akhir Th. 1990
1.	0 - 14	36,74	35,64	209.751
2.	15 - 49	59,88	49,78	292.968
3.	50 - 75 keatas	12,38	14,58	85.807
	Jumlah	100,00	100,00	588.526

Sumber : diolah dari Badung dalam angka 1990, hal 24.

Berdasarkan komposisi umur di atas, yang menampakkan bahwa umur yang sangat produktif (15 - 49 tahun) 49,78 % Angka ini, memberikan kita gambaran bahwa kelompok umur produktif yang cukup tinggi dan ini merupakan potensi sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunanh nasional.

Berbagai program telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Wilayah kota Denpasar khususnya untuk mengembangkan potensi tersebut, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan

daerah dan kebudayaan nasional. Hal ini tampak dalam program Pesta Kesenian Bali, Apresiasi Generasi Muda, tampaknya cukup tinggi untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari kebudayaan. Pendidikan merupakan proses penerusan nilai - nilai luhur budaya bangsa. Bertitik tolak dari hal tersebut, dicoba menguraikan bagaimana gambaran pendidikan di Bali, Khususnya di wilayah Kota Denpasar

Pendidikan sebelum datangnya pengaruh dari Barat di Bali pada abad 19 dilakukan secara tradisional. Pendidikan pada waktu ini dilakukan oleh orang bangsawan atau oleh inisiatif pribadi, dalam arti seorang guru didatangkan ke rumah murid untuk memberikan pelajaran. Pendidikan yang menonjol waktu ini adalah pendidikan keagamaan dan hal - hal yang lain berhubungan dengan kehidupan kerajaan. Orang yang memberikan pelajaran pada waktu itu terdiri dari orang - orang Brahmana, orang yang memberilkan pelajaran disebut sang guru sebaliknya untuk orang yang menuntut ilmu disebut siswa. Pada waktu ini orang yang bersujud bakti dan sikap hormat terhadap gurunya yang mendidik pribadinya dan mencurahkan ilmu pengetahuan sucinya terhadap para siswa. Pedoman bagi para siswa dalam rangka berguru disebut - aguron - aguron atau aswaka guru. Di antara pedoman tersebut terdapat apa yang disebut Yama Batin. Untuk mengendalikan diri seorang siswa tidak boleh :

- (1) Membunuh (Ahimsa)
- (2) Tidak Beristri (Brahmacari)
- (3) Tidak Berdusta (Satya)
- (4) Tidak Suka Bertengkar (awyahaarika)
- (5) Tidak Mencuri

Rupa - rupa para leluhur kita telah menyadari betapa pentingnya arti pendidikan bagi seseorang, karena melalui pendidikan akan meningkatkan kecerdasan dan kesempurnaan rohani seseorang. Hal ini dapat kita lihat pada kesusastraan kuno menyebutkan pedoman -

pedoman mengenai pendidikan misalnya seperti : dalam naskah yang bernama **Agastya Parwa**.

Kemudian setelah masuknya sistem barat ke Bali untuk kepentingan tenaga administrasi, pemerintah Belanda pada tahun 1875 membuka sekolah renh yang pertama di Bali yakni di Singaraja yang terkenal dengan nama Twewede Klasse School. Dunia pendidikan model barat sangat dirasakan asing sehingga kira - kira tahun 1915 usaha untuk mendapatkan murid agar mau sekolah desa sangat sulit atau sukar sekali. Dalam perkembangan pendidikan pada masa itu di Bali sangat jauh terkebelakang dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan masa masa sekarang ini.

Dengan kedatangan Jepang di Bali pada tahun 1942 semua sekolah yang ada dijadikan sekolah rakyat yang lamanya enam tahun. Di Denpasar dan Di Singaraja didirikan sekolah Chu Gakho (SMP sekarang) dan di Singaraja Sihang Gakho (Normal School). Untuk mengawasi Sekolah Rakyat maka di tiap - tiap kabupaten di angkat penilik sekolah yang namanya pada waktu itu Pimpinan Pengajaran. Setelah pengakuan kedaulatan, keinginan para orang tua untuk menyekolahkan putra - putranya sangat besar.

Pada tahun 1962 berdirilah Universitas Udayana, dan mempunyai delapan fakultas. Perkembangan pendidikan di Bali maju sangat pesat, baik pendidikan dasar, menengah maupun Perguruan Tinggi sampai saat sekarang.

Pendidikan Non Formal. Pada pendidikan non formal akan diuraikan dua masalah yaitu : (1) pendidikan di luar sekolah atau disamakan dengan pendidikan tradisional ; (2) Pendidikan non formal. pendidikan non formal di Bali di selenggarakan di rumah - rumah orang tua anak atau pasraman para Pendeta. Materi pendidikan masih sebagian besar diwarnai oleh nilai - nilai Agama Hindu yang mencakup Bidang Tatwa (Filsafat); (2) Etika (tata susila) dan lain - lain (uraian diatas, membuktikan bahwa pendidikan mempunyai potensi cukup besar untuk pembinaan kebudayaan.

Sedangkan pendidikan formalnya, sistem pendidikan modern di bali sama dengan sistem pendidikan modern di Indonesia. Sistem pendidikan rendah dibagi dua bagian yaitu : (1) Taman kanak - kanak; (2)

Pendidikan dasar (SD). Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Perguruan Tinggi.

Potensi pendidikan merupakan suatu kekuatan, kesungguhan dan kemajuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan di Bali umumnya dan khususnya di wilayah kota Denpasar. Perkembangan potensi pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Wilayah Kota Denpasar faktor pendukungnya adalah : Faktor yang sangat strategis, dimana kesadaran masyarakat dalam arti penting pendidikan bagi anak - anak mereka ada kemampuan material untuk membiayai sekolah anak- anaknya dan sarana / prasana yang sangat meningkat untuk mengembangkan dan pembinaan tersebut.

Di atas telah disebutkan pada tahun 1915 sangat sulit mencari murid pada saat sekarang di wilayah Kota Denpasar faktor tersebut di atas menentukan fasilitas pendidikan cukup memadai. Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kota Denpasar seperti :

- (1) Taman Kanak - Kanak 179 buah sekolah
- (2) Sekolah dasar 544 buah sekolah
- (3) SMP 103 buah sekolah
- (4) SLTA 100 buah sekolah
- (5) SLB 5 buah sekolah
- (6) Perguruan Tinggi 24 Perguruan tinggi

Di wilayah Kota Denpasar pendidikan non formalnya di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan non formal, LKMD di wilayah Kota Denpasar cq Sie Pendidikan telah mengupayakan penggarapan melalui :

- (1) Kejar Paket A
- (2) Kejar Pamong
- (3) Kursus - kursus dan lain sebagainya.

Kalau dibandingkan dengan enam tahun yang lalu perkembangan pendidikan di kota Denpasar sampai saat ini sangat meningkat. Berdasarkan data jumlah murid atau yang berpendidikan yang ada di wilayah kota Denpasar dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi dalam tahun ajaran 1986 sampai dengan tahun ajaran 1990 dapat disimpulkan bahwa semua anak - anak sekolah mendapatkan pendidikan dasar. Mengenai data pendidikan atau banyaknya murid tersebut di atas dapat dilihat tampak dalam tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4.
Jumlah dari TK sampai Perguruan Tinggi di wilayah Kota Denpasar
dari Tahun 1986 sampai dengan 1990

No	Sekolah	1986	1987	1988	1989	1990	Jumlah
1	Belum belajar sekolah	11.563	205				117.768
2	Taman Kanak - Kanak	10.759	11.557	10.903	10.449	12.170	55.738
3	Sekolah Dasar	36.108	83.449	81.695	79.878	78.380	409.510
4	Sekolah Menengah Pertama	45.272	45.311	42.602	39.580	38.052	210.818
5	Sekolah Menengah Atas	35.470	40.410	45.536	45.607	45.074	202.818
6	Sekolah Luar Biasa	247	290	261	210	221	1.229
7	Perguruan Tinggi	32.040	36.235	34.876	37.416	43.536	17.812
Jumlah		230.459	217.457	229.874	213.140	217.433	909.972

Sumber: Ditlah dan Bardung dalam angka 1990

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas pendidikan sudah mulai mendapat perhatian bagi masyarakat. Perlu juga dijelaskan bahwa tahun 1987 yang ada dalam tabel di atas, yang tidak cukup tinggi karena usia lanjut. Yang belum sekolah semakin tidak ada, karena sudah ada kesadaran masyarakat, bahwa pendidikan sangat penting dalam pembinaan kebudayaan daerah - Bali pada umumnya. Khususnya di wilayah kota Denpasar.

Berdasarkan uraian di atas pendidikan punya potensi yang paling besar untuk pembinaan pengembangan Kebudayaan Nasional. Karena pendidikan sebagai suatu pranata punya seperangkat komponen yang paling lengkap, teratur terarah. Potensi dalam pembinaan kebudayaan, akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV di bawah ini.

2.5. *Ekonomi.*

Dari sudut sosial ekonomi, letak Pulau Bali sangat strategis karena penghubung lalu lintas darat, laut maupun udara antara pulau - pulau di Nusa Tenggara dan Jawa, serta Benua Asia dan Australis. Disamping itu, dengan pengembangan pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya di Indonesia, maka hubungan laut, darat dan udara serta telekomunikasi dirasakan semakin penting dan lancar. Di atas telah disebutkan letak pulau Bali adalah sangat strategis, disamping itu di Bali ada jenis lembaga - lembaga sosial dalam komunitas kecil adalah : Subak, Banjar, dan Sekeha. Kegiatan lembaga - lembaga tersebut umumnya tidak hanya terbatas pada satu lapangan kehidupan tertentu saja. tetapi walaupun demikian, tiap - tiap lembaga sosial mempunyai titik berat dalam lapangan kehidupan yang mana lembaga itu paling relevan. Baik Subak, Banjar dan sekeha, lapangan kegiatannya. Diantara lembaga sosial tersebut sekeha yang paling banyak jenisnya.

Subak adalah organisasi yang terikat oleh kesatuan wilayah irigasi. Fokus kegiatan adalah di Bidang Pertanian. Kegiatan subak, selain meliputi kegiatan ekonomi, juga kegiatan yang bersifat keagamaan, yaitu mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara - upacara pada pura subak. Di seluruh Bali terdapat jumlah subak sebanyak 1.274 buah. lembaga subak diikat oleh adanya awig - awig subak (aturan - aturan subak) (Gerya dkk, 1982,55). Sedangkan banjar adalah merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah.. Dan Sekeha adalah merupakan suatu perkumpulan atau kesatuan yang mempunyai tujuan - tujuan khusus tertentu.

Kehidupan ekonomi disektor jasa, perdagangan merupakan mata pencaharian penduduk di Bali umumnya, khususnya di wilayah Kota Denpasar. Hal ini juga dimungkinkan tersedianya fasilitas penunjang yang memadai seperti pelabuhan Benoa, lapangan terbang Ngurah Rai di Tuban yang berlokasi sangat dekat dengan Kota Denpasar. Lagipula kota Denpasar merupakan pusat pariwisata di Bali. Dalam kehidupan Ekonomi pusat kegiatan jual beli barang kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari - hari adalah 16 buah pasar ada di kota Denpasar. Lokasi pasar dan pertokoan itu juga merupakan lokasi pusat - pusat hiburan, seperti bioskop dan tempat - tempat hiburan lainnya. Selain dari pada itu

beberapa hotel dan balai banjar sering pula menyediakan panggung pertunjukan. Jalur angkutan sudah mencapai seluruh Wilayah Kota Denpasar. Diwilayah kota Denpasar terdapat 19 buah perusahaan angkutan luar kota yang melayani trayek Kota Denpasar dengan beberapa kota di Jawa, seperti Surabaya, Banyuwangi, Malang, Yogyakarta, Jakarta dan lain - lainnya. Besar armadanya 67 buah bus dengan 78 rit. Angkutan luar kota ini berpusat di terminal ubung, terminal yang terbesar Wilayah Kota Denpasar.

Terminal; ini bisa menampung 50 buah kendaraan sekaligus. Diwilayah Kota Denpasar, hotel yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata ada \pm 492 buah. Sedangkan sebagian besar obyek wisatanya terdapat diluar wilayah kota Denpasar, seperti kabupaten Gianyar dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wilayah Kota Denpasar mempunyai Pasar Badung (sebagai pusat pasar tradisional) yang merupakan jantung perekonomian masyarakat Denpasar, punya potensi yang besar dalam perkembangan perekonomian masyarakat wilayah kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Disisi lain kita dapat lihat, sistem ekonomi sebagai suatu pranata, mempunyai potensi pula dalam pembinaan serta perkembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Karena perekonomian yang berlandaskan UUD 45 khusus pasal 33 ayat 1, yang menyatakan " Perekonomian yang berlandaskan Usaha atas azas kekeluargaan " namun kendala yang menghadang cukup tinggi. Pranata ekonomi pembinaan kebudayaan nasional terurai secara rinci pada BAB berikut ini .

2.6. Agama dan Kepercayaan.

Pulau Bali termasuk kecil bila dibandingkan dengan pulau - pulau yang ada di Indonesia. Agama yang ada di daerah Bali berturut - turut adalah : Hindu, Islam, Budha, Katholik, Protestan dan Khon hu Chu. Jumlah penganut agama yang terbesar adalah agama Hindu dengan jumlah \pm 2.334.229 orang (99 %) Kantor Statistik Prop. Bali umumnya, Khususnya di wilayah Kota Denpasar juga penganut agama yang terbesar adalah agama Hindu menurut Badung dalam Angka tahun 1990 berjumlah \pm 518.555 orang. Secara terperinci jumlah pengikut agama - agama di wilayah kota Denpasar dalam tabel 2.5. di bawah ini.

Tabel 2.5.
Jumlah Penganut Agama menurut Kecamatan di Wilayah
Kota Denpasar 1990

No	Kecamatan	Hindu	Islam	Budha	Kris / Pro	Latki	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Denpasar Barat	100.071	23.760	3.890	5.066	3.675	13.642
2	Denpasar Timur	92.280	11.605	1.846	125	1.884	107.840
3	Denpasar Selatan	68.958	4.500	375	398	561	74.792
4	Kuta	85.138	4.605	408	1.525	1.777	93.553
5	Mengwi	83.214	167	30	873	710	84.994
6	Abiansemai	64.759	49	-	-	12	64.994
7	Petang	24.135	159	64	59	10	24.427
jumlah:		518.555	44.845	6.713	8.146	8.629	586.888

Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 1990, 139

Berdasarkan tabel 2.5. di atas telah menunjukkan bahwa agama yang paling dominan pada masyarakat Bali adalah Agama Hindu. Pola acuan kehidupan masyarakat adalah nilai luhur, yang terbaku dalam agama Hindu yang menjadi keyakinannya. Sebelum Perang Dunia Ke II, Agama Hindu di Bali ini disebut agama Ciwa Budha dan ada juga yang menyebut agama Tirtha. aliran - aliran dari kedua agama itu, pada waktu itulah : Agama Indra, Cambhu, waisnawa dan lain - lain.

Organisasi yang menunjang agama Hindu antara lain : Panti Agama Hindu Bali, Setia Hindu Baima dan lain - lainnya. Kemudian pada tanggal 17 Nopember sampai 23 Nopember 1961 didalam Acrama Campuhan di Desa ubud di kabupaten Gianyar juga diadakan pertemuan besar antara para ahli Sulinggih (alim - Ulama) dan para ahli walaka (dilura sulinggih). Untuk menetapkan ajaran agama - agama Hindu Bali, yang sekarang disebut Hindu Dharma.

Pengaruh agama Hindu pada kehidupan masyarakat Bali sangat besar pada umumnya, khususnya di wilayah kota Denpasar. Agama Hindu yang memiliki tiga Kerangka dasar yaitu :

- (1) Tatwa (Filsafat Keagamaan);
- (2) Susila (Moral Keagamaan);
- (3) Upacara (Upacara Keagamaan)

Memberikan corak khas bagi kita. Identitas masyarakat Bali. Disamping hal pokok tersebut, agama Hindu juga memberikan pengaruh penting antara lain dalam hal integrasi masyarakat dan pengendalian masyarakat.

Kepercayaan yang jenisnya bermacam - macam. Menurut sumbernya dibedakan atas : Kepercayaan yang berasal dari pra Hindu dan Kepercayaan yang berasal dari jaman Hindu. Kepercayaan yang berasal dari jaman Hindu misalnya adalah kepercayaan animisme. Salah satu wujud dari kepercayaan ini adalah adanya suatu konsepsi dan aktivitas ritual dalam bentuk pemujaan leluhur di kalangan masyarakat Bali. Kepercayaan yang berkaitan dengan agama Hindu yang terpenting adalah kepercayaan yang disebut panca - cradha yang mencakup :

1. Percaya akan adanya Satu Tuhan, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam bentuk konsep Tri Murti. Tri Murti membentuk tiga atau manifestasi, ialah Wujud Brahma, yang menciptakan : Wujud Wisnu yang Memelihara, dan Wujud Siwa yang melebur segala yang ada.
2. Percaya terhadap konsepsi Atman (roh abadi)
3. Percaya tentang Punarbawa (kelahiran kembali dari jiwa).
4. Percaya terhadap hukum Karma Pala (adanya buah dari setiap perbuatan)
5. Percaya akan adanya Moksa (kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali. (Geriya dkk. 41)

Pengaruh kepercayaan dalam masyarakat juga amat besar. Salah satu wujud dari pengaruh ini dalam konsepsi dan aktivitas upacara yang muncul dalam frekwensi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Bali, baik upacara yang dilaksanakan oleh kelompok kerabat maupun oleh komunitas. Keseluruhan jenis upacara - upacara di Bali pada umumnya, begitu juga khususnya di wilayah kota Denpasar di golongankan ke dalam lima macam yang di sebut Panca Yadnya Yaitu :

1. Dewa Yadnya, sembahyang kepada Ida Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa dan para Bhatara - Bhatari di sanggah pemujaan, Pura pura Khayangan / merupakan upacara - upacara pada pura maupun kuil keluarga.

- 2 Bhuta Yadnya, Upacara untuk Bhuta dan Kala misalnya Meracu (upacara semah kurban), Manca Wali Krama dan lain - lainnya Upacara kurban ini maksudnya supaya alam atau tempat sekitar itu bersih tak ada suatu ringtangan.
- 3 Manusa Yadnya, meliputi upacara Daur Hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa misalnya : Nelubulanin (hari tiga bulan), Ngotonin (hari lahirnya) dan sebagainya.
- 4 Pitra Yadnya, merupakan upacara - upacara yang ditunjukkan kepada roh - roh leluhur, meliputi upacara kematian sampai pada penyucian.
- 5 Resi Yadnya, berarti menghaturkan punia kepada para pendita yang telah memimpin upacara pada waktu kita melakukan yadnya dari nomor 1 sampai nomor 4 di atas demi untuk kesejahteraan bersama. (merupakan upacara berhubungan dengan pentasbihan pendita)

Adapun alat upacara sajen - sajen upacara ini, sangat mementingkan tumbuh. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa acuan hidup masyarakat Bali yang mayoritas Hindu nilai - nilai norma, aturan terbaku dalam ajaran agama Hindu yang menjadi keyakinan sebagai - mana masyarakat di daerah Bali. Disisi lain melalui pranata keagamaan dari daerah Bali, tampak pula ada suatu potensi yang cukup besar untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. kenyataan membuktikan bahwa kehidupan keagamaan di Bali sudah menyatu dengan kehidupan budayanya

2.7. *Kehidupan Politik.*

Maka dari itu banyak pakar budaya yang menyatakan bahwa kebudayaan Bali bernafaskan agama Hindu. Pembahasan yang lebih tajam teruraikan pada Bab selanjutnya (Bab IV di bawah ini)

Bentuk pemerimntahan daerah di daerah Bali, telah mengalami perubahan sesuai perkembangan jaman. Pada masyarakat Bali dua macam pengertian desa , yaitu pertama Desa Adat adalah bersifat otonomus dan tidak terkait secara struktural dengan sistem pemerin-tahan jajahan dan akhirnya keperubahan dalam bentuk pemerintahan

Republik, tidak mempengaruhi dan tidak membawa perubahan dalam bentuk pemerintahan adat. Desa Adat ialah suatu kesatuan wilayah dimana anggotanya atau warganya terikat pelaksanaan upacara dan pemujaan tempat. Tempat suci yang disebut Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Pura desa dan Pura Dalem). Dibawah desa ini tersusun kelompok - kelompok warga masyarakat yang menunjukkan diferensiasi kesatuan adat khusus, disebut Banjar Adat. Kedua, Desa Dinas atau Desa Administratif ialah suatu organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas batas wilayah Desa Dinas dan Desa Adat ini, terdapat variasi sebagai berikut : 1) Satu Desa Dinas terdiri dari satu Desa Adat; 2) Satu Desa Dinas terdiri dari beberapa Desa adat dan satu Desa Adat terdiri dari beberapa Desa Dinas. Desa adat dipimpin oleh Kelian Desa atau Bendesa Adat. Sedangkan Banjar Adat dipimpin oleh Kelian Banjar.

Dalam jaman republik, khususnya pada masa kini, propinsi Bali mencakup 8 kabupaten, terdiri dari 51 kecamatan, terbagi atas 631 Desa Dinas dan di bawah Desa Dinas terdapat banjar - banjar dinas + ada 3.551 Banjar Dinas. Sebagai pelaksanaan pasal 3 ayat 4 dan 23 ayat 3 Undang - undang Nomor 5 tahun 1979, masing - masing Kabupaten Daerah Tingkat II Di Bali telah menetapkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa serta kelurahan dengan pedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 dan nomor 44 tahun 1980. (Monografi Bali 1985, 55)

Berdasar Peraturan Daerah Tingkat II tersebut diatas, susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari : 1) Kepala Desa; 2) lembaga Musyawarah Desa (LMD); dan 3) Perangkat Desa. Perangkat Desa dalam susunan Organisasi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sekretaris Desa;
- 2) Kepala - Kepala Urusan dan;
- 3) Kepala - Kepala Dusun / Kelihan Dinas.

Sedangkan susunan organisasi pemerintahan kelurahan terdiri dari :

- 1). Kepala Kelurahan;
- 2). Sekretaris Kelurahan;
- 3). Kepala - Kepala Urusan dan;

4). Kepala - Kepala Lingkungan.

(Monografi Bali 1985, 55) pada umumnya di daerah Bali, khususnya di wilayah kota Denpasar. Wilayah Kota Denpasar Secara administratif terdiri dari tujuh Kecamatan ini :

- 1) Kecamatan Denpasar Barat ini membawahi 78 buah;
- 2) Kecamatan Denpasar Timur 15 buah;
- 3) Kecamatan Denpasar Selatan 10 buah;
- 4) Kecamatan Kuta 9 buah desa;
- 5) Kecamatan Mengwi 9 buah desa;
- 6) Kecamatan Abiansemal 13 buah desa dan;
- 7) Kecamatan Petang 4 buah desa.

Berdasarkan uraian di atas, pranata politik juga Potensial Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional.

BAR III

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL

Sebelum disajikan informasi dan data empiris mengenai persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional, pembahasan bab ini diawali dengan uraian persepsi masyarakat tentang kebudayaan dan persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional sebagai studi kepustakaan.

Konsep kebudayaan adalah satu konsep yang mempunyai arti yang amat luas. Makna dari isi konsep kebudayaan dapat menyempit dan terbatas, dan kadang - kadang juga dapat melebar, meluas dan menjadi amat abstrak. Relatif dan beragamnya isi konsep kebudayaan telah menyebabkan beragamnya pula persepsi masyarakat tentang kebudayaan.

Harsja W. Bachtiar menunjukkan, bahwa persepsi budaya, seorang birokrat dapat berpindah dari persepsi yang diwarnai oleh kebudayaan suku bangsanya kepada persepsi yang diwarnai nilai nilai agamanya atau persepsi yang diwarnai oleh kebudayaan asing atau persepsi yang diwarnai oleh ideologi bersama pancasila dan UUD 45 (Bachtiar, 1985, 64 -67).

Adanya persepsi kebudayaan yang multi itu menunjukkan kepada kita, bahwa masyarakat kita masih berada dalam taraf transformasi kebudayaan. Dalam suatu masyarakat maju masalah transformasi kebudayaan boleh dikatakan telah berhasil mereka selesaikan, sehingga dengan demikian mereka telah memiliki suatu kebudayaan yang mantap dan mampu berkembang secara dinamis. berbeda dengan itu, dinamika kebudayaan kita lebih banyak diwarnai oleh suasana merealisasi bentuk ideal dan kemantapan dirinya. Itulah sebabnya mengapa kita anggap, bahwa masyarakat kita masih berada dalam taraf transformasi kebudayaan (Alfian, 1985 : ix - xvii).

Lonsep Kebudayaan Nasional sudah jelas dimiliki oleh bangsa Indonesia pasal 32, UUD 45 menyebutkan secara singkat dan jelas, bahwa " Pemerintah Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ". Kemudian dalam penyebarannya dirumuskan, kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak puncak kebudayaan di daerah - daerah diseluruh In-

donesia. terhitung sebagai kebudayaan berupa usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan - bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 menetapkan, bahwa kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan pembangunan , yang berbudaya.

Kategori Pertama. Sutan Takdir Alisyahbana, pada pokoknya berpendirian, bahwa konsep kebudayaan nasional yang disebutnya Kebudayaan Indonesia Raya, sebenarnya baru mulai timbul dan disadari pada permulaan abad ke 20 oleh generasi Muda Indonesia yang berjiwa dan bersemangat ke Indonesia. Menurut Alisyahbana, sebelum gagasan gagasan Indonesia Raya disadari dan dikembangkan, yang ada hanya kebudayaan - kebudayaan suku bangsa di daerah. Ia kemudai mengemukakan agar generasi muda tidak terlampau tersangkut dalam kebudayaan zaman Pra Indonesia itu, dan agar dapat membebaskan diri dari kebudayaan kesukubangsaannya, dengan kata lain agar tidak berjiwa provinsionalisme, tetapi dapat berkobar-kobar dengan semangat baru.

Erat sangkut pautnya dengan jiwa dan semangat nasional Indonesia itu, kebudayaan nasional indonesia merupakan suatu kebudayaan yang dikreasikan yang baru yang sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan yang kini merupakan kebudayaan yang universal, yaitu kebudayaan Barat.Unsur - unsur kebudayaan Barat yang terutama penting untuk mengkreasikan kebudayaan Indonesia baru adalah teknologi, orientasi ekonomi, ketrampilan berorganisasi secara luas dan ilmu pengetahuan, sedangkan dalam usaha membangun masyarakat. Indonesia Raya, orang Indonesia perlu mempertajam rasio akalnya dan mengambil alih dinamisme dari barat.

Pandangan Alisyahbana tentang kebudayaan nasional dinilai berorientasi ke materialisme, intelektualisme dan individualisme.

Kategori kedua, menekankan kesinambungan kebudayaan masa lampau, masa kini dan masa depan. Sanusi Pane misalnya menyatakan, bahwa kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan kerohanian, perasaan dan gotong royong yang bertentangan dengan kebudayaan Barat yang mementingkan materi. Intelektualisme dan individualisme. Oleh karena itu Sanusi Pane tidak begitu setuju dengan Alisyahbana yang dianggapnya terlalu berorientasi ke kebudayaan Barat. Kecuali itu ia juga tidak setuju dengan anjuran yang menyatakan, bahwa manusia Indonesia harus membebaskan diri dari kebudayaan pra Indonesia.

Seperti Sanusi Pane, Purbatjaraka menganjurkan agar orang Indonesia banyak mempelajari sejarah dan sejarah kebudayaannya. Purbatjaraka berpendirian bahwa kebudayaan Indonesia. Cara itu harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri atau kebudayaan pra Indonesia, yaitu kebudayaan suku-suku Bangsa Daerah. Pendirian Sanusi Pane, Purbatjaraka pada prinsipnya sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan, bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, aspek mutu menonjol dalam konsepsinya, karena dengan metabor puncak, dimaksudkan adalah unsur-unsur dari kebudayaan daerah yang paling tinggi mutunya.

Dua kategori pandangan yang berbeda dalam hal persepsi mengenai kebudayaan nasional, pada dasarnya terbatas hanya pada wujud dan isi kebudayaan dan belum banyak menyoroti fungsi kebudayaan dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka fungsi ini, Koentjaraningrat mengajukan pandangan tersendiri mengenai fungsi kebudayaan nasional tersebut. kebudayaan nasional memiliki dua fungsi pokok : (1) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia; (2) sebagai suatu sistem dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang bhinka itu untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas (Koentjaraningrat, 1985 : III)

3.1. Di Lingkungan Pendidikan Formal

Lingkungan pendidikan formal munculnya jenjang pendidikan dasar (sekolah dasar), Pendidikan menengah (SMP. SMA) dan pendidikan tinggi (Universitas). Di lingkungan pendidikan formal ini, dan pendidikan nasional terencana dan teroperasionalisasi melalui kurikulum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui Penataran P4 yang makin intensif dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan tentang kebudayaan dan pendidikan kebudayaan nasional juga makin intensif menyentuh aspek kognitif dan efektif para guru maupun peserta didik.

Walaupun demikian, seperti tampak dalam tabel II. 1, persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional di lingkungan pendidikan formal atau pranata sekolah, data empiris menunjukkan persepsi yang beragam. Dalam hal kebudayaan nasional dalam kerangka makro kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh responden (100,0%) menyatakan bahwa kebudayaan nasional itu sangat perlu. Mereka menilai kebudayaan nasional berperan penting bagi jati diri manusia dan masyarakat Indonesia dan juga untuk menumbuhkembangkan serta memantapkan kesatuan dan persatuan Indonesia.

Kemudian mengenai unsur - unsur yang berfungsi mendukung keberadaan dan perkembangan kebudayaan nasional, tabel II.1 tersebut mengidentifikasi adanya lima unsur yang berperan penting, yaitu ; bahasa, kesenian, organisasi, sosial, sitem pengetahuan dan teknologi.

Unsur kebudayaan yang dinilai paling berkembang dalam menumbuhkembangkan kebudayaan nasional diantara kelima unsur - unsur tadi adalah unsur bahasa (40,7%), Apabila diidentifikasi dan dikelompokkan tiga jenis unsur yang dipersepsikan paling berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional, maka berturut - turut peranan tersebut ditampilkan oleh peranan bahasa (40,7%), kesenian (29,26%) dan organisasi sosial (18,5%).

Tampak jelas dari data empiris tersebut, bahwa menurut persepsi masyarakat di lingkungan pendidikan formal, bahasa yaitu bahasa Indonesia, adalah unsur konkrit yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai unsur kebudayaan nasional dan sekaligus sebagai unsur yang berperan mengembangkan kebudayaan nasional, baik dalam fungsi

sebagai pemberi identitas maupun dalam fungsi sebagai media komunikasi antar golongan yang beragam di nusantara ini.

Tabel II.1
Persepsi Responden Tentang Kebudayaan Nasional Dilingkungan Pendidikan Formal (dalam %)

No.	Aspek	Kategori	Prosentase (%)
1.	Keberadaan Kebudayaan Nasional	1. Perlu	100,0
		2. Tidak perlu	0,0
		Total	100,0
2.	Unsur -unsur yang paling berperan mendukung perkembangan Kebudayaan Nasional	1. Bahasa	40,7
		2. Kesenian	29,6
		3. Organisasi Sosial	18,5
		4. Sistem Pengetahuan	7,4
		5. Teknologi	3,7
		6. Ekonomi	0,0
		Total	100,0

3.2. Di Lingkungan Pendidikan Luar Sekolah

Lingkungan pendidikan luar sekolah ini meliputi empat institusi atau lembaga, yaitu : (1) Institusi keluarga; (2) Institusi ekonomi (pasar dan koperasi), (3) Institusi Politik (Kantor - kantor Pemerintah), dan (4) Institusi Keagamaan.

Di lingkungan pendidikan luar sekolah ini, seperti halnya dilingkungan pendidikan formil, persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional cukup beragam. Hal ini tampak dari rekaman hasil wawancara mendalam dan wawancara berstruktur. Walaupun persepsi itu cukup beragam, dalam beberapa aspek terdapat kemiripan persepsi satu sama lain, misalnya dalam persepsi masyarakat tentang pengertian kebudayaan nasional, bentuk kebudayaan nasional dan perlu tidaknya kebudayaan nasional itu.

Dalam mengenai persepsi masyarakat mengenai pengertian kebudayaan nasional, dalam keempat institusi tersebut umumnya berkembang pengertian bahwa kebudayaan nasional itu cukup luas unsurnya beraneka ragam, kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang berlandaskan Pancasila, kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah Indonesia, kebudayaan nasional itu merupakan dasar kepribadian Indonesia.

Dalam hal bentuk kebudayaan nasional, pada keempat institusi tersebut berkembang persepsi bahwa kebudayaan nasional Indonesia berbentuk Bhineka Tunggal Ika. Diakui adanya beragam kebudayaan daerah, disamping satu kesatuan kebudayaan Indonesia baru yang tengah berkembang yang berfungsi menyatukan bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia, Kesenian Indonesia dipersepsikan sebagai unsur penting dari kebudayaan Indonesia tersebut.

Dalam hal perlu tidaknya kita memiliki kebudayaan nasional, tabel II.1 menunjukkan bahwa pada keempat institusi, kebudayaan nasional itu secara mutlak dianggap perlu (100,00%). ada beberapa alasan yang melatarbelakngi perlunya masyarakat indonesia memiliki kebudayaan nasional yang mapan, yaitu : (1) Landasan Jati Diri, yaitu jati diri sebagai bangsa Indonesia, baik untuk kepentingan kedalam (intra bangsa), maupun untuk kepentingan keluar (antar bangsa), (2) Alasan persatuan, dimana kebudayaan nasional dianggap sebagai satu modal dasar bangsa Indonesia untuk meningkatkan dan memelihara kesinambungan pembangunan nasional.

Mengenai unsur-unsur apa yang dapat mendukung keberadaan dan perkembangan kebudayaan nasional itu, responden cenderung berpendapat, bahwa ada enam usur pokok yang dapat mendukung, yaitu bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, teknologi dan ekonomi.

Diantara unsur-unsur tersebut, unsur - unsur yang dianggap paling berperan tiga jenis yang terpenting adalah bahasa, kesenian, organisasi sosial. Seperti tampak dalam tabel II.2., di lingkungan institusi keluarga, unsur-unsur yang dianggap paling berperan dalam mendukung kebudayaan nasional adalah : Bahasa (25,8%), kesenian (32,3%), organisasi sosial (16,1%). Di lingkungan institusi ekonomi, unsur - unsur

tersebut adalah : Bahasa (28,6%) kesenian (38,1%), organisasi sosial (23,8%). Di lingkungan institusi Politik, unsur-unsur tersebut adalah : Bahasa (31,6%), kesenian (36,9%), organisasi sosial (21,1%) dan di lingkungan institusi keagamaan adalah : Bahasa (35,3%), kesenian (23,5%), dan organisasi sosial (17,6%)

Tabel II.1
Persepsi Responden Tentang Kebudayaan Nasional Di Lingkungan Pendidikan Formal (dalam %)

No	Aspek	Kategori	Keluarga	Ekonomi	Politik	Ke Agamaan
1	Keberadaan Kebudayaan Nasional	1. Perlu	100,0	100,0	100,0	100,0
		2. Tidak perlu	0,0	0,0	0,0	0,0
		Total	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Unsur-unsur yang paling berperan mendukung perkembangan Kebudayaan Nasional	1. Bahasa	25,8	28,6	31,6	35,3
		2. Kesenian	32,3	38,1	31,6	35,3
		3. Organisasi Sosial	16,1	23,8	21,1	17,6
		4. Sistem Pengetahuan	12,9	0,0	5,3	0,0
		5. Teknologi	6,5	0,0	5,3	11,8
		6. Ekonomi	6,5	4,8	0,0	11,8
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	

Alasan - alasan yang melatarbelakangi pentingnya peranan unsur - unsur bahasa, kesenian dan organisasi sosial sebagai faktor pendukung utama keberadaan dan perkembangan kebudayaan nasional dikemukakan secara kualitatif oleh para informan sebagai berikut :

Mengenai peranan bahasa dipersepsikan, bahwa bahasa merupakan media komunikasi yang amat efektif etnik di Indonesia yang amat beragam. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peranan bahasa Indonesia. Disamping itu bahasa Indonesia adalah untuk mengembangkan pengetahuan termasuk pengetahuan tentang kebudayaan

Universal Bahasa Indonesia pada hakikatnya juga sebagai indikator pembentuk jati diri Bangsa Indonesia.

Mengenai peranan organisasi sosial, dimana organisasi sosial dianggap sebagai wadah dalam membina, menumbuh dan mengembangkan kebudayaan, seperti halnya peranan keluarga, peranan institusi ekonomi, politik dan juga keagamaan. Organisasi, baik yang bersifat modern maupun yang tradisional dianggap oleh masyarakat sebagai bagian dan sekaligus sebagai unsur penting bagi pengembangan kebudayaan nasional.

BAB. IV.

PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui jalur pranata sekolah, pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik dan pranata keagamaan, merupakan fokus pembahasan pada uraian berikut ini.

Seperti telah dijelaskan di atas, pada bab pendahuluan yang menyatakan bahwa, pembinaan adalah langkah maupun uapaya untuk menumbuh kreatifitas serta kemampuan seseorang dalam menentukan pembinaan untuk mendukung pembinaan serta pengembangan kebudayaan nasional.

Disisi lain telah pula, dibahas oleh berbagai pakar budaya, tentang strategi kebudayaan dalam rangka mengoptimalisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Namun pembahasan melalui pendekatan pranata pranata, belum pernah kami baca.

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang pemula yang masih perlu disempurnakan secara mendalam, dan terpadu. Disamping itu pula pembinaan kebudayaan dengan pendekatan kebudayaan sebagai strategi yang bersifat kreatif. Strategi kebudayaan sebetulnya berarti penegasan diri kita sendiri sebagai agen kebudayaan, bukan hanya sebagai penerima warisan kebudayaan, dimana kita hidup. (Ignas Kleden : 1987, 33). Sebagai pewaris budaya atau kedudukan sebagai resipita seseorang (kelompok) hanya menyesuaikan diri dengan peraturan tata nilai dan bentuk tingkah laku yang telah mapan dalam sistem budaya. Sedangkan kedudukan sebagai agen, maka suatu kebudayaan di sesuaikan dengan pilihan budaya yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam sistem budaya tersebut dan memberikan bentuk baru kepadanya. Kedua kedudukan di atas sangat diperlukan, agar dapat berperan dalam mewujudkan cita - cita besar bangsa Indonesia yang bermuara pada pembentukan suatu kebudayaan tiap kelompok budaya dapat menyumbangkan kepada terbentuknya suatu Corehen kebudayaan yang mengikat kita semua, atau sebagai tatanan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah memulai memiliki acuan

budaya yang menjadi landasan serta falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Pendapat tersebut di atas, ditegaskan oleh Prof. DR. Fuad Hasan yang menyatakan bahwa definisi kebudayaan secara luas merupakan " Pandangan hidup " (Way of Life) yang tapak dalam perilaku. (Fuad haan: 1987;876)

Pendapat pakar lain mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu unsur budaya nasional yang berfungsi sebagai penguat identitas maupun jati diri bangsa Indonesia (Koentjaraningrat; 1985;99). Disamping itu pula Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam rangka pembinaan budaya bangsa. Manfaat serta fungsinya dalam proses pembinaan yaitu :

1. Untuk mengadakan seleksi terhadap nilai - nilai yang baik atau yang buruk, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
2. Untuk memberikan perlindungan dan hak yang sama secara hakiki kepada semua lapisan sosial, sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak dan harmonis.
3. Untuk membina dan mempoerkokoh persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh dan harmonis.
4. bahwa kita sudah memiliki konsep wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai acuan operasional dalam rangka melaksanakan amanat yang tersurat maupun yang bersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Bahwa Identitas peradaban kebudayaan yang berbhineka, telah nyata memberi sumbangan kepada kedinamisan kebudayaan bangsa.

Berpijak dari ke tiga komponen strategis tersebut, memberikan penjelasan bahwa arah pembinaan kebudayaan nasional sudah mempunyai konsep yang jelas, dapat memperkuat pilar-pilar hakekat Pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap manusia Indonesia baik sebagai individu maupun kolektif adalah sebagai subyek pembangunan dan disisi lain sebagai sasaran / tujuan pembangunan. Hasil - hasil pembangunan tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia

baik secara lahiriah maupun rohaniah tanpa didukung oleh Pembangunan yang berwawasan budaya akan sekaligus hal itu memperkuat jati diri bangsa.

Pembinaan kebudayaan merupakan sub sistem dari pembangunan nasional yang berwawasan budaya, yang diletakkan pada proporsi yang prioritas dalam rangka mencari alternatif yang kuat untuk :

1. Dapat mencegah seoptimal mungkin berkembangnya gejala anomie dalam masyarakat, akibat dari kondisi transisi struktur masyarakat dan budaya industri yang sering ditunjukkan oleh derajat labilitas yang tinggi.
2. Dapat menumbuhkembangkan wawasan budaya, keterikatan budaya dan kebanggaan pada budaya sendiri, yang pada gilirannya masyarakat mempunyai kemampuan selektif dan adaptif dalam situasi keterbukaan dan globalisasi.
3. Dapat mengembangkan dimensi - dimensi yang mencakup logika, etika dan estetika dan pada gilirannya dapat menjadi sumber inspirasi dan aspirasi masyarakat, menuju kondisi terpeliharanya keseimbangan hidup serta memantapkan kualitas harkat dan martabat manusia.
4. Dapat mengurangi dan bahkan mencegah aliansi sosial, yang diakibatkan oleh semakin meningkatkannya pembangunan sarana fisik.
5. Dan dapat mengembangkan konsep dehumaniora secara meluas dan mantap disamping upaya terobosan yang semakin kreatif dibidang Teknologi (diolah dari kongres Kebudayaan)

Dalam rangka pikir tersebut, dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II nanti, tidak ada alternatif lain kecuali mengembangkan pembangunan yang berbudaya. Masyarakat Bali sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak dapat lepas dari model Pembinaan Kebudayaan Nasional dalam mengembangkan kebudayaan daerah, karena kebudayaan nasional. Setiap Pembinaan Kebudayaan, tidak dapat lepas dari potensi daerah masing-masing, yang merupakan produk-produk dari pranata sosial sebagai aktifitas kelakuan berpola dari masyarakat bersangkutan.

Penjelasan di atas berarti bahwa secara normatif telah kita miliki, dimana arah dan pembinaan secara jelas. Namun secara oprasionalnya, pembinaan kebudayaan nasional dalam kerangka pertumbuhan masih mengalami suatu hambatan serta tantangan. Nah dalam penelitian yang masih bersifat deskriptif mencoba untuk membahas serta menganalisis, peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional dalam 5 (lima) jalur pranata sosial. Secara berturut - turut dibahas sebagai berikut :

4.1. *Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Melalui Jalur Pranata Sekolah.*

Pembahasan ini menggunakan kerangka pikir pranata sosial. Seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan pranata sosial mempunyai tiga komponen saling terkait secara fungsional satu sama lain. Sekolah sebagai suatu pranata mempunyai pula tiga komponen. :

- (1) Sekolah mempunyai sistem norma / nilai-nilai, aturan maupun hukum yang digunakan sebagai suatu pola tatanan untuk mengelola sekolah, norma, nilai, aturan maupun hukum yang berlaku di sekolah, semuanya tertuang dalam kurikulum sekolah disemua jenjang pendidikan:
- (2) Sekolah punya perangkat yang tercakup di dalamnya; guru-guru; pegawai tata usaha sekola (tenaga adminsitrasi) sebagai pengelola pendidikan di sekolah . Landasan pengelolaan tersebut menggunakan sistem norma (di atas) yang berlaku di sekolah tersebut;
- (3) Disamping itu pula sekolah mempunyai komponen perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sekolah.

Uraian di atas memberikan kita gambaran bahwa pranata sekolah mempunyai komponen yang mencakup lengkap dan teratur. Selanjutnya seberapa jauh pranata sekolah berperan dalam pembinaan kebudayaan nasional untuk menjawab permasalahan di atas : pertama dilihat adalah :

1). *Potensi Sekolah*

Potensi sekolah dalam pembinaan kebudayaan cukup besar. Potensi yang besar tersebut dapat dibuktikan dari tiga komponen yang terurai di atas telah teratur, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal; merupakan tempat untuk menumbuhkembangkan potensi manusia. Hal tersebut merupakan tugas pokok pendidikan, menghantarkan manusia yang berpotensi tersebut kearah manusia seutuhnya. Pendidikan pada dasarnya pula merupakan sebagian dari kebudayaan dari kebudayaan tersebut, yang mengarah pada peradaban. Seperti telah ditegaskan oleh mantan Mendikbud Daud Yuseof, menyatakan bahwa, "Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan". Anak didik melalui sekolah sebagai pusat kebudayaan dapat mengembangkan : Logika, Etika, Estetika serta Praktika. Melalui pendidikan di sekolah dapat dikembangkan kebudayaan yang pada hakekatnya, kebudayaan inipun merupakan perpaduan antara pengembangan logika, etika, estetika dan praktika. Berdasarkan uraian di atas pendidikan untuk mencapai manusia seutuhnya harus dilaksanakan dengan pendekatan kebudayaan, serta kebudayaan, merupakan kriteria serta tuntunan dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu berarti mengoptimalkan potensi individu untuk menjadi manusia yang utuh, seimbang, serasi, selaras, lahir maupun bathin (Darmaji Darmodiharjo, 1983 / 1984). Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pendidikan cukup besar dan potensial dalam pembinaan kebudayaan. Senyatanya apakah potensi tersebut, telah dioptimalisasi, untuk pembinaan kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional, terutama antara lain ; (1) Komponen sistem norma (yang mencakup nilai, norma, aturan-aturan sekolah yang semuanya tertuang dalam kurikulum sekolah, masih menampakkan bidang studi yang mengandung persepsi kebudayaan sangat terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rangkuman pendapat para responden seperti tertera pada tabel IV.1 dibalik ini :

TABEL IV.1
BIDANG STUDI YANG MENGANDUNG PERSEPSI KEBUDAYAAN

No	Jenis Bid. Studi	Pernyataan / Prosentasi	Keterangan.
1	Semua Bid. Studi	28,00	
2	Bid Studi Sosial Budaya	29,00	
3	Bid Studi Bahasa	29,00	
4	Bid Studi Kesenian	22,00	
5	Sejarah / PSPB / PMP	4,00	
6	Agama	8,00	

Diolah dari Pendapat Responden

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persepsi kebudayaan yang tercakup serta terjabarkan dalam materi, bidang studi di sekolah, lebih-lebih bidang studi yang paling strategis, seperti Kesenian, Bahasa, Sejarah, PSPB, PMP dan Agama, masih sangat terbatas. Apakah hal ini mencerminkan pula masih terbatas pengetahuan guru tentang konsepsi, fungsi kebudayaan nasional seperti terjabar pada bab pendahuluan di atas. Secara kenyataan, berdasarkan hasil pembinaan dengan cearamah terhadap guru-guru, aparat yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan, masih adanya suatu pengetahuan yang terbatas mengenai konsepsi, fungsi dari kebudayaan tersebut.

Disamping itu pula pandangan dari responden tentang pranata yang relevan untuk mendukung pembinaan kebudayaan nasional, menampakkan pula keterbatasan, Seperti tampak pendapat responden dalam tabel IV 2. di bawah ini :

TABEL IV.1
BIDANG STUDI YANG MENGANDUNG PERSEPSI KEBUDAYAAN

No	Jenis Bid. Studi	Pernyataan (%)	Keterangan
1	Pendidikan Agama / Motal P4 Pelakssanaan Kegiatan Keagamaan haro tertentu	33,00	
2	Muatan lokal yang sudah disisipkan Bid. Studi	20,00	
3	Pelaksanaan Kegiatan Kokulikuler/ekstra kulikuler	7,00	

No.	Jenis Bid. Studi	Pernyataan (%)	Keterangan
4.	Aktivitas Kebahasaan dan Seni	7,00	
5.	Ekonomi / Kesusastraan	13,00	
6.	Sistem Pendidikan Sekolah	20,00	

Diolah : dari pendapat responden dengan pernyataan terbuka

Berdasarkan pendapat dari responden yang berstatus guru, Kepala Sekolah, Pengelola Pendidikan, menampakkan pula masih adanya keterbatasan pengetahuan tentang konsepsi serta isi dari kebudayaan tersebut. Padahal dalam operasional mengenai materi budaya yang mengacu pada konsep dan isi kebudayaan nasional, bisa terjabarkan dalam semua bidang studi yang ada sekolah. Contoh misalnya :

- (1) Pengetahuan tentang konservasi benda-benda purbakala yang menggunakan proses kimia, anak didik yang memilih jurusan A1, A2 di tingkat SMTA bisa diajak ke laboratorium Purbakala, di Bali khusus, laboratorium seperti ini ada di Suaka Peninggalan Purbakala Bali di Bedahulu Gianyar atau ke Balai Arkeologi tau bisa diajak ke Museum.
- (2) Anank - anak A1 yang menjurus ke teknik, bisa diberikan pengetahuan tentang Arsitektur tradisional, peranan dan fungsi bangunan tradisional dll.
- (3) Anak-anak yang memilih jurusan A3, dan bisa dikemukakan pengetahuan tentang kebudayaan daerah yang merupakan sub.bagian dari kebudayaan nasional. Pengetahuan tentang cerita rakyat, permainan anak - anak, tata rias tradisional, upacara tradisional, kepemimpinan tradisional dan lain - lain. Pengetahuan tersebut di atas kalau disimak banyak membekukan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang perlu digali dan dikembangkan untuk kebudayaan nasional sebagai wahana menumbuhkan kecintaan serta kebanggaan pada budaya sendiri yang akhirnya mereka mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Budaya yang agung. Khusus sebagai putra Bali yang mempunyai budaya yang dapat dikagumi olehnya sendiri, bahkan oleh dunia internasional.

- (4) Penanaman serta operasional materi P4, pada siswa / mahasiswa pada dasarnya bisa ditanamkan melalui ungkapan tradisional yang berkaitan dengan sila-sila dari Pancasila atau melalui cerita - cerita pewayangan yang membekukan nilai-nilai kebajikan / nilai kebenaran maupun ceritera -ceritera / lakon yang diginakan dalam kesenian daerah Bali.

Beberapa contoh di atas yang menggambarkan bahwa betapa luasnya pengetahuan kebudayaan yang seyogyanya diberikan pada guru, anak didik maupun mahasiswa di sekolah.

Berdasarkan penelitian serta pendapat responden, secara kualitatif, masih tampak hal tersebut di atas masih sangat terbatas diberikan pada anak didik di sekolah. Bahkan beberapa guru menyampaikan buku-buku penunjang sebagai referensi untuk menambah wawasan guru tentang kebudayaan masih sangat terbatas, tersebar di sekolah-sekolah. Bahkan hasil-hasil naskah berkaitan dengan inventarisasi nilai-nilai luhur budaya daerah belum ada tersebar di sekolah-sekolah. Hal inipun merupakan hambatan pula bagi pembinaan kebudayaan di sekolah. Disisi lain pun belum pernah diadakan pranata kebudayaan bagi guru - guru untuk semua jenjang sekolah.

Dalam kenyataan pula, masih tampak adanya pelecehan siswa terhadap jurusan budaya dapat dibuktikan dari adanya masih jarang siswa yang memilih jurusan A4, di sekolah mereka. Disamping itu pula dalam kenyataan masih ada bidang yang relevan dengan kebudayaan tidak termasuk menentukan bobot nilai kelulusan anak atau tidak termasuk nilai Ebtanas.

Kenyataan-kenyataan di atas menampakkan bobot pendidikan humaniora di sekolah - sekolah masih sangat terbatas. Keterbatasan itupun tampak dalam pernyataan responden dalam pembinaan kebudayaan nasional masih terbatas (lihat tabel IV.3 di halaman berikut ini)

Tabel IV.3

Tabel IV.3

Cara Melakukan Pembinaan Kebudayaan Terhadap Anak Didik.

No	Uraian	Prosentasi	Ket
1.	Mewajibkan mengikuti Upacara -upacara / peningkatan Hari Nasional dan Upacara Apel Bendera setiap Senin	25	-
2.	Mewajibkan para anak didik untuk memilih salah satu jenis Ekstrakurikuler yang diprogramkan di sekolah.	10	-
3.	Mewujudkan keterbukaan antara guru dan murid, serta memberi peluang terjadinya Komunikasi dua arah.	5	-
4.	Memberikan kepada anak didik untuk belajar mengembangkan kegiatan penelitian, terutama di bidang sosial Budaya Masyarakat.	7	-
5.	Mendorong anak didik untuk meningkatkan kesempatan membaca dan menulism serta mengfungsikan perpustakaan dan majalah dinding untuk mengembangkan kemampuan wawasan dan intelektual	7	-
6.	Mengadakan kegiatan apresiasai dan Budaya	20	-
7.	mengaktifkan kegiatan OSIS atau organisasi Pelajar yang dibentuk di sekolah agar lebih berperan di Bidang Sosial.	5	-
8.	Disiplin Pribasi, untuk terciptanya keselarasan diri dengan Tuhan, sesama manusia dn lingkungan.	16	-
9.	Kegiatan anjangsana, untuk mendekatkan siswa dengan obyek -obyek sejarah dan kepurbakalaan.	5	-
		100	-

Sumber : Diolah dari pendapat responden.

Berdasarkan tabel IV.3. di atas, membuktikan bahwa : sudah dilakukan berbagai pembinaan kebudayaan nasional, melalui berbagai kegiatan yang tertera pada tabel, namun pembinaan tersebut masih sangat terbatas sekali. Angka prosentase yang paling rendah, adalah pembinaan melalui kegiatan anjangsana ke obyek sejarah, dan purbakala. Pada hal kegiatan seperti ini, dengan langkah lanjut anak didi ,

disuruh membuat laporan singkat dari pengalaman wisata budaya mereka, dapat memantapkan wawasan serta pengetahuan anak pada kebudayaan.

Inipun menampakan wawasan tentang kebudayaan masih terbatas. Dalam kalangan intelektual tertentu saja, wawasan tersebut sudah mulai berkembang. Keterbatasan dalam pembinaan kebudayaan nasional, karena adanya berbagai hambatan - hambatan dalam pembinaan oleh sekolah. Berdasarkan pernyataan reponden tentang hambatan yang dialami / Lihat Tabel IV. 4 di balik ini.

Tabel IV. 4
Hambatan Dalam Melakukan Pembinaan Kebudayaan Nasional
Disekolah Dan Cara Mengatasi :

No.	Jenis Hambatan	(%)	Cara Mengatasi	Keterangan
1.	Kurikuler	40,00	Kegiatan Ekstra Kurikuler	
2.	Fasilitas : Sarana-sarana	10,00	Kerjasama Instansi terkait	
3.	Kurang partisipasi orang tua / siswa	30,00	Pendekatan sosiologis	
4.	Kurang wawasan guru tentang persepsi kebudayaan nasional	5,00	Menambah jumlah buku referensi dan menyertakan dalam penataran kebudayaan.	
5.	Kurangnya wawasan anak tentang persepsi kebudayaan	15,00	Mengadakan seminar dan mendatangkan nara sumber.	

Diolah dari : responden.

Berdasarkan tabel IV. 4 di atas yang mengatakan berbagai hambatan yang dialami adalah : Pembinaan melalui kegiatan kurikulum tampak paling dominan. Seperti telah dijelaskan di atas masih ter-

batasannya materi kebudayaan, tercakup / terjabar dalam berbagai bidang studi yang ada di sekolah - sekolah. Disisi lain masih kurang partisipasi orang tua dan siswa, wawasan guru dan anak masih terbatas. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara seperti telah dinyatakan oleh beberapa responden seperti ,mengadakan kegiatan ekstra kurikuler, ceramah, menyertakan materi kebudayaan dalam berbagai penataran guru - guru, menambah referensi kebudayaan sebagai acuan guru-guru di sekolah.

Disamping itu pula beberapa sara pun diajukan oleh responden yang dirangkum dalam tabel IV.5. dibalik ini.

Tabel IV.5.
Saran-saran Koresponden Tentang Pembinaan Kebudayaan Nasional
Di Sekolah

No.	Penjelasan	Prosentase	Ket
1.	Pembinaan intensif unsur-unsur Budaya Nasional, agar mempunyai ketahanan di dalam membendung dampak negatif dari Globalisasi	25	-
2	Pengkajian secara mendalam tentang kebudayaan Nasional, untuk tetap tegaknya jati diri bangsa	15	-
3	Distribusi sarana dan Prasarana / buku-buku yang dapat menunjang kegiatan pembinaan kebudayaan secara fisik.	10	-
4	Peningkatanb pembinaan dan pengetahuan bagi aparat - aparat yang terlibat dalam dunia pendidikan.	15	-
5	Mengintegrasikan informasi kebudayaan kedalam setiap bidang studi.	35	-
		100	-

Berdasarkan tabel di atas, saran-saran yang terkumpul melalui responden , jug akan digabung dengan saran - saran yang diperoleh melalui dep interviu. Saran tersebut teruraikan dalam bab kesimpulan dibawah ini.

4.2. Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Melalui Pranata Keluarga

Keluarga dalam pandangan orang Bali dan masyarakat Bali merupakan suatu tempat untuk mendapatkan kesejaghteraan lahir dan batin dalam hidupnya. Disisi lain, keluarga pula merupakan wadah untuk membentuk anak-anak " Suputra " anak yang berbudi luhur, punya semangat kerja, bertanggung jawab, orang Bali adalah mewujudkan dalam manusia yang utuh, yang merupakan tujuan akhir dan pendidikan kita yang punya ciri seperti telah disebut pada bab I di atas. Manusia utuh adalah manusia yang taqwa, kerja keras, berbudi luhur, bertanggung jawab, cerdas, trampil, mandiri. Untuk mewujudkan ini, keluarga di Bali punya potensi yang perlu di bina dan kembangkan. Disisi lain pula dapat kita simak, keluarga merupakan agen kebudayaan , buka hanya sebagai penerima warisan kebudayaan, sekaligus sebagai pencipta warisan baru dalam kebudayaan dimana kita hidup.

Menurut pendapat seorang pakar pendidikan di luar sekolah termasuk jalur berlangsungnya pendidikan di luar sekolah :

- (a) lembaga Pendidikan Tertua
- (b) Lembaga Pendidikan Informal
- (c) Lembaga Pendidikan Pranata dan Utama
- (d) Sebagai lembaga pendidikan yang bersifat kodrat (Joesoef dan Slamet Santosa, 81 - 46)

Sebagai lembaga pendidikan tertua, ditinjau dari perkembangan pendaikan manusia sejak lahir, dimana orang tua ayah dan ibu dengan didikan tersebut semasih bayi dalam kandungan (Garba Wedana). Pada saat itu pula telah dibuatkan upacara, dengan makna memohon agar bayi yang tumbugh menjadi anak yang berguna (Suputra). Pada saat ini menurut budaya Bali , ayah / Ibu melakukan perbuatan terpuji sembahyang, mendengar cerita yang bermakna agama, kesusilaan. Hal inipun menampakkan bahwa proses pendidikan telah terjadi pada waktu bayi masih dalam kandungan. Disamping itu pula disini merupakan penerusan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Keluarga sebagai pendidikan informal dalam lembaga pendidikan ini (Keluarga) tidak teratur, tidak terorganisir terbuka, tidak dikenal adanya penjenjangan kronologis atas dasar usia maupun pengetahuan / kemampuan.

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama karena masih dalam kandungan bayi tersebut telah memperoleh pendidikan dari orang tua mereka. Keluarga sebagai yang utama, keluarga merupakan pembentukan kepribadian dasar dari anak. Seperti telah di jelaskan di atas, keluarga sebagai pendidikan utama, dalam pembentukan / pertumbuhan anak yang " Suputra"

Berdasarkan uraian tersebut di atas pendidikan dalam keluarga punya potensi yang sangat penting dalam pembinaan kebudayaan daerah / kebudayaan nasional yang sekaligus melatarbelakangi kehidupan mereka. Untuk memperjelas hal tersebut, keluarga dilihat dalam suatu pranata, merupakan sub sistem dari pembinaan kebudayaan nasional dijelaskan tiga komponen yang saling terkait secara fungsional satu sama lain adalah sebagai berikut :

1). Sistem Norma

Yang mendahului terbentuknya lembaga keluarga adalah sebuah perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 hal 2)

Bertitik tolak dari batasan tersebut , memberikan petunjuk bahwa keluarga yang terbentuk itu didahului dengan adanya ikatan lahir batin diantara dua orang laki dan perempuan yang kemudian menjadi orang tua dari anak-anaknya dan dibarengi dengan tekad untuk mencapai cita-cita menuju kebahagiaan hidup atas dasar keyakinan akan adanya kekuatan supernatural (sikap yang religius) . Menurut budaya penduduk Bali Perkawinan adalah suci dan dilaksanakan atas dasar prinsip sejalan dengan ajaran agama. Karena itu setiap perkawinan diikat dan mempunyai suatu tujuan suci mencakup pengabdian manusia kepada Tuhan.

Sebagai wujud nyatanya ditandai dengan upacara yang penyelenggaraannya mengikuti norma - norma yang telah ditentukan oleh lembaga perkawinan. Berkeluarga atau berumah tangga adalah suatu peristiwa berkesinambungan dari siklus kehidupan manusia anak - anak meningkatkan status menjadi orang tua (Dalam ajaran agama Hindu dari Brahmachari menuju tingkat Grehasta) dan sebaliknya orang tua mundur meninggalkan kesibukan duniawi karena pengaruh usia dan fisik ketahanan jasmani sudah tidak memungkinkan untuk produktif (dalam ajaran agama Hindu, dari Grehasta menuju Wanaprasta dan Bhiksuka).

Keluarga sebagai kesatuan sosial, mempunyai fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengacu kepada standar kebudayaan nasional dan fungsi khusus mengacu kepada standar budaya lokal (daerah) di Bali, Untuk masyarakat yang beragama Hindu menunjukkan kehidupan berkeluarga dalam :

(1) Fungsi Khusus :

- a. Melaksanakan Brata Panca Yadnya yaitu 5 dasar Korban suci kepada Tuhan, leluhur, sesama manusia pendeta / pinandita dan lingkungan
- b. mempunyai anak yang " Suputra " (anak yang berbudi luhur, semangat kerja dan bertanggung jawab)
- c. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan dengan ikut menjadi anggota (warga) banjar desa Adat.
- d. Menjadi pamong kepada Pura (tempat suci sesuai dengan ruang lingkup aktifitas dan faktor genetisnya seperti misalnya, warga terikat kepada pura kahyangan tiga, pura Dang Kahyangan dan Pura Keluarga
- e. Pewarisan baik berupa material maupun moral,mental spiritual yang dianggap sesuai. Material berupa harta kekayaan dan moral, mental Spiritual berupa nilai, norma-norma yang dianut.

(2) Fungsi Umum

- a. Untuk memperoleh kestabilan dalam memenuhi nafsu sex yang merupakan kebutuhan kodrat alam (Manusiawi)
- b. Untuk memperoleh anak dan memeliharanya.

- c. Untuk membagi suka/duka yang berhubungan dengan persoalan rumah tangga diantaranya pembagian tugas, masalah pewarisan masalah kelanjutan hidup. (Gde Pudja, MA, SH, 1963)

Fungsi tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan dibarengi oleh norma, kaidah - kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia hak serta keberadaan keluarga beserta individu-individu didalamnya berintegrasi secara intensif dengan hak dan kebenaran masyarakat sekitarnya secara terbuka dan selaras, sekaligus menghindarkan suatu keluarga dari keterasingan, isolasi sosial. Dengan kondisi tersebut dapat ditarik suatu paradigma bahwa pembinaan kebudayaan nasional melalui keluarga merupakan substansi pembinaan kebudayaan nasional dalam masyarakat. Sifat kekeluargaan serta kerukunan erat kaitannya dengan ajaran falsafah Pancasila atau ajaran Pancasila berpangkal pada konsepsi kekeluargaan. Konsepsi itu juga tercermin dalam arti dan makna sesanti yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila berbunyi " Bhineka Tunggal Ika ". Dengan demikian peranan keluarga sangat penting artinya dalam kaitannya dengan pembinaan kebudayaan Nasional, karena kebudayaan nasional adalah manifes dari falsafah Pancasila. Ada dasar filosofis menjadi landasan pada hampir setiap kegiatan (tingkah laku) orang Bali dalam kehidupannya sehari - hari. Konsepsi tersebut bertalian dengan dasar pandangannya dalam menerangkan kedudukan manusia di alam semesta ini :

Konsepsi tersebut antara :

- (a) Konsepsi Rwa Bhineda

Pada dasarnya konsep ini mengacu kepada dua unsur yang berlawanan tetapi bisa dipisahkan. Hal - hal yang selalu berlawanan dalam konsepsi ini sudah dikenal dan menata prikehidupan masyarakat, seperti nilai baik dan buruk, suka dan duka, benar dan salah, siang dan malam, luan dan taben (hulu dan hilir) dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan pengetahuan kognitif dan diisolasikan dalam wujud perilaku di dalam menempatkan sesuatu di rumah. Contoh penempatan bangunan-bangunan seperti pemukiman keluarga letaknya di arah hulu, kemudian berun-

tun adanya bale daja, bale dangin, bale dauh, dapur dan lumbung, kandang binatang piaraan diletakkan semakin ke hilir sesuai dengan proporsinya. Contoh-contoh lain manifestasi konsep Rwa Bhineda yang menggambarkan konsespsi Rwa Bhineda ini kalau maknanya dihayati sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari mendatangkan kesenangan sehingga keharmonisan dan keselarasan hidup bisa diwujudkan.

(b) Konsespsi Tri Hita Karana

Konsep ini adalah juga melandasi pembangunan pemahaman umat Hindu di Bali, terutama tata letak dan tata ruang bangunan, mempunyai makna adalah tiga hal atau tiga sumber penyebab adanya kesejahteraan dan kebahagiaan yang bersumber dari tiga hal yaitu Parhyangan (Tuhan), Pawongan (Manusia) dan Palemahan (Alam / Tanah). Konsespsi ini telah dibakukan oleh "awig-awig" masing-masing desa di Bali, dan telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Masyarakat Bali sejak zaman dahulu, sebagai wahana untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, serta pengamalannya secara meluas sampai dalam kehidupan keorganisasian.

(c) Konsep Triguna dan Tri Mandala.

Konsespsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan pola pembangunan rumah tradisional Bali. Artinya : Tiga bagian dari badan, sedangkan Tri Mandala artinya tiga wilayah, yaitu Utama Mandala adalah lokasi hulu tempat mendirikan pemujaan keluarga. Madya Mandala adalah tempat aktifitas manusia termasuk ruang kamar tidur dan sebagainya dan Nista Mandala adalah tempat bangunan yang berfungsi agak rendah seperti kandang ternak, kamar mandi dan WC,serta pembuangan.

Ketiga konsep tersebut , nampak masih diamalkan sampai sekarang bahkan telah dikembangkan dalam kemasakan yang modern dalam pembangunan rumah-rumah pejabat, rumah mewah dan sebagainya oleh kalangan teknokrat bangunan. Demikian pula dalam " Weda Smeti" secara dogmatis dilukiskan bahwa ".....ayah itu disebut Api" Grihatpatya " Ibu sebagai Daksinagni " dan guru sebagai api " Ahawaniya", ketiga api inilah yang paling utama, mulia....." (46:61), pada

kenyataannya ajaran ini telah memasyarakat dalam kehidupan masyarakat Bali. yang ditunjukkan dengan perilaku yang selanjutnya menempatkan ayah sebagai sumber kehidupan seorang guru, sebagai penuntun dalam mencapai kebenaran (tetua). ketiga sumber inilah menurut konsepsi nilai budaya orang Bali di pandang mulia dalam menentukan kehidupan keluarga.

Anak-anak yang menjadi keturunan dari suatu keluarga diwajibkan menghormati ketiga sumber penghidupan di atas dan selanjutnya dalam ajaran yang lain disebutkan ".....dengan menghormati ibunya ia mencapai kebahagiaan di bumi, dengan menghormati ayahnya ia menikmati angkasa tetapi dengan ketaatan terhadap gurunya ia mencapai alam Bhraman....." (46:61). Pengejawantahan ajaran ini tergambar dalam orientasi nilai budaya Bali, perilaku menurut ditanamkan secara enkulturasi kepada anak, dan anak yang berperilaku yang demikian disebut "**Menuting Darmaning Putra Sesana**" artinya : perbuatan yang menaati kewajiban seorang anak yang susila. Disamping itu pula pernah pula dianalisa beberapa dimensi budaya Bali dalam upaya memahami perilaku pemuda di daerah Bali, (S. Swarsi;1985). Dinyatakan bahwa sistem budaya Bali sangat potensial untuk menata perilaku pemuda untuk perilaku yang menyimpang.

Di dalam keluarga inti ini juga diberlakukan hubungan *recepicitas* antar orang tua dengan anak yang didasarkan dengan adanya konsep " Utang " (Rna). Konsepsi ini mencakup kewajiban saling membantu (*Recepicitas*) antara orang tua dan anak. Anak berkewajiban membantu, hormat, patuh pada petunjuk orang tua. Sampai orang tua meninggal anaklah yang punya kewajiban untuk melakukan pergorbanan suci dengan tulus ikhlas (yadnya) kepada orang tua sampai rohnya bisa menyatu dengan Sang Pencipta. Konsep ini diwujudkan dengan adanya Upacara " Ngaben " sampai upacara " Ngenteg Linggih ", pada umat Hindu di Bali (S. Swarsi, dkk;1985). Dasar pemikiran si anak yang melatar belakangi perilaku di atas adanya keyakinan dan kesadaran yaitu :

- (a) Keyakinan bahwa seorang anak (sentana) dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya dengan didasari tulus ikhlas dan tanpa pamrih.

- (b) Kesadaran akan berhutang budi pada orang tua (ana data), berhutang jiwa (prana data) kepada orang tua.
- (c) Disamping kesadaran seperti tersebut di atas, juga si anak merasa berhutang budi kepada para leluhur (putra rna).

Disamping adanya keyakinan dan kesadaran seperti tersebut di atas, dalam mesyarakat Bali juga ada piranti menyebutkan bahwa jiwa yang ada dalam diri orang tua, tunggal dengan jiwa ada dalam diri anak. Dengan demikian memberikan kebahagiaan diri sendiri (Gumawe sukaning wang atuha)

Disisi lain orang tua punya kewajiban untuk membesarkan anak-anak mereka, dan konsepsi hutang tersebut akan tercermin pula adanya . Upacara Manusa Yadnya, seperti misalnya upacara potong gigi (metatah, mepedes) di Bali upacara inipun mempunyai makna menghilangkan nafsu (sad ripu) si anak. Inilah hutang orang tua terhadap anak. Sehingga orang tua di Bali selalu mengharapakan, terutama pada anak wanita, jangan kawin dulu, sebelum metatah (potong gigi). Masih banyak lagi upacara yang mengungkapkan konsep hutang tersebut di atas yang telah banyak dan disosialisasikan melalui pendidikan dalam keluarga di Bali khususnya.

Uraian di atas menampakkan bahwa : secara praktis tidak langsung telah terjadi proses enkulturasi (pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui keluarga), dan telah terjadi pula proses sosialisasi beberapa norma, aturan-aturan, tata krama kehidupan maupun pola-pola tindakan dari seluruh anggota keluarga dalam kehidupan mereka di masyarakat.

Seperti telah dibuktikan dari hasil penelitian menampakkan, bahwa aturan dalam keluarga telah terkulturasi dan tersosialisasi dalam proses interaksi antar anggota keluarga dan antar anggota keluarga dengan masyarakat lingkungan . Beberapa pendapat responden yang dapat terangkum dalam penelitian awal ini tertera pada tabel IV.6 dan Tebel IV. 7 di bawah ini.

Tabel IV.6.

Tabel IV.6.

**Aturan - aturan dalam keluarga yang relevan dengan pembinaan
Kebudayaan Nasional**

No.	Jenis aturan / Pranata	Prosentase .
1.	Taqwa kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, hidup mandiri, disiplin dan prestasi	40
2.	Taat dan mengamalkan norma-norma pergaulan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial	10
3.	Cinta kepada Budaya Daerah an berusaha dapat mengapresiasi budaya daerah dalam hidup berkeluarga	5
4.	Menyediakan Buku-buku agama dan buku-buku tentang tata krama dan mendorong anggota keluarga untuk membaca Dan mengajak untuk sering mendengarkan Warta berita dan Mimbar agama di Media seperti Radio dan TV.	35
5.	Keteladanan	10

Tabel IV.7.

**Saran-saran Koresponden Tentang Pembinaan Kebudayaan Nasional
Di Sekolah**

No.	Jenis aturan / Pranata	Prosentase .
1.	Keteladanan dari orang tua dan pendekatan persuasif kepada anak	45
2.	Menciptakan suasana kondusif dalam keluarga untuk dapat mewujudkan suasana yang rukun, berdisiplin dan sebagainya	25
3.	menanamkan sejak kanak-kanak untuk memahami kebudayaan nasional dan sekaligus mencintainya	10
4.	Berceritera kepada anak-anak yang masih usia kanak-kanak menjelang dengan dongeng dan cerita pewayangan.	5
5.	Memberikan kesempatan bagi si anak untuk berinteraksi dengan lingkungan	15

Sumber : diolah dari pendapat responden

Berdasarkan uraian pada tabel IV.6 dan Tabel IV.7 di atas, menampakkan bahwa, sudah terjadi secara turun temurun proses enkulturasi nilai-nilai budaya daerah yang ada pada dasarnya menifes pula pada nilai nilai budaya tersebut dalam falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila tersebut telah merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang berfungsi sebagai penguat identitas bangsa.

Disamping norma di atas yang merupakan falsafah kehidupan keluarga di Bali, Masih banyak falsafah yang belum terungkap dalam pembahasan ini. Seperti dijelaskan di atas, keluarga dilihat dalam suatu pranata, ada dua komponen lagi yang terkait didalamnya yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam pengelolaan kehidupan keluarga yang ditata oleh sistem norma yang berlaku pada keluarga tersebut.

Personal dalam keluarga tersebut terdiri dari beberapa person - person (anggota) keluarga yang punya stastus yang berbeda seperti, ada yang berstatus kakek, nenek,ibu anak-anak, cucu-cucu bahkan masih ada yang berlaku berstatus buyut. Masing-masing person tersebut saling ber-interaksi satu sama lain. Dalam interaksi tersebut telah terungkap, terjadi proses belajar secara tidak sistematis, seperti di sekolah-sekolah. Proses enkulturasi, penerusan nilai-nilai luhur budaya terjadi pada saat sedang melaksanakan pekerjaan / upacara-upacara Yadnya / pada saat duduk, maupun pada saat luas. Norma yang paling dominan , proses tersebut, terjadi pad waktu melaksanakan upacara keagamaan baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan pura-pura yang lebih luas. Di daerah Bali Upacara keagamaan telah menyatu dengan kegiatan kehidupan pada masyarakat dan keluarga di Bali.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan, bahwa keluarga di Bali dengan self Person - person sebagai tokoh kunci, punya potensi yang cukup besar dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah khususnya. namun dalam kenyataan, potensi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peran pendidikan keluarga dalam pembinaa kebudayaan nasional. Sosialisasi konsepsi kebudayaan nsional melalui keluarga di Bali masih kurang sistematis, secara kognitif, Pengetahuan tengang konsepsi kebudayaan nasional serta fungsi maupun unsur yang merupakan isi, pada keluarga di bali masih terbatas, Masih Banyak masyarakat mengetahui kebudayaan, baru terbatas pada kesenian dan ada pula baru menyebut bahasa daerah.

Namun secara efektif di Bali, norma yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terbaku dalam Pancasila telah dihayati dan bahkan secara psikomotor telah menjadi acuan / pola tatanan kehidupan masyarakat / keluarga di Bali. Hal ini telah dibuktikan pada uraian diatas.

43. Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional Pranata Ekonomi.

Masyarakat Bali yang merupakan mayoritas penduduknya beragama Hindu, mempunyai ras kekeluargaan serta gotong royong yang sangat tinggi dan sangat menonjol dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini diperkuat adanya suatu pameo "Salunglung sabayan-taka paras Paros Sarpanaya" yang artinya, bekerjasama, toleransi dan kebersamaan dalam bertindak, berfikir."

Nilai gotong royong ini, memberi peluang dalam mengembangkan berbagai ekonomi dalam masyarakat. Pada masyarakat petani yang sebagian besar bermukim di kawasan pedesaan, sangat kentara memang prinsip ini di dalam koordinir oleh suatu kelompok atau lembaga tradisional yang disebut Sekaa. Manusia sebagai makhluk biologis, makhluk sosial dan makhluk yang mempunyai sumber daya pikir tenaga, tanpa disadari atau secara otomatis, mempunyai dorongan-dorongan alamiah untuk mempertahankan diri dan mengembangkan kemauan, baik dari manusia itu secara pribadi maupun alam bentuk kelompok sosial. Oleh karena itu manusia didalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, akan bertitik tolak dari faktor-faktor yang sangat esensial dari manusia secara pribadi maupun secara kelompok.

Sebagai suatu faktor yang turut menentukan corak dari pada kehidupan manusia maka peranan alam dan lingkungan sosial sangatlah penting mengingat bahwa dalam lingkungan memberikan alternatif yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usahanya itu sudah pasti diimbangi dengan suatu kemampuan yang memadai dari manusia itu sendiri dengan cara memanfaatkan sistem pengetahuan yang memadai dari manusia itu sendiri dengan cara memanfaatkan sistem pengetahuan yang merupakan komplek ide, nilai serta gagasan utama yang menjadi sumber dan tolok ukur bagi setiap individu untuk bertingkah laku, (sumber daya manusia). Faktor lingkungan sosial,

keberadaannya sangat esensial juga dalam hubungannya dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia secara integral. Integral maksudnya adalah hadirnya suatu kompleks jaringan - jaringan dalam suatu sistem perekonomian. Dalam proses pengembangan manifestasi dari prinsip dorongan alamiah manusia tersebut muncullah langkah inovasi di mana masyarakat dengan mewujudkan Institusi " Pasar " dan " Koperasi " dua institusi inilah yang akan dapat menjelaskan, apakah pranata ekonomi juga berperan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional.

1). Pasar Sebagai Sub Pranata Ekonomi.

Pasar bagi masyarakat, merupakan salah satu media bagi masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan, untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan budaya luar. Adapun yang dimaksud dengan " Pasar " disini adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara para penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan pertukaran benda dan jasa ekonomi dan uang, dan tempat transaksi dapat disampaikan pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah ditetapkan (Koentjaraningrat, Budi Santoso, 1984 : 129). Atau secara singkat dapat disebutkan pasar sebagai pranata dan tempat bertemunya penjual dan pembeli.

Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berperan sebagai tempat pertemuan pembeli dan penjual, bukan hanya menyebabkan interaksi antara sesama individu, tetap di lain sisi juga merupakan pertukaran benda benda hasil kebudayaan Oleh Karena itu " pasar " pada masyarakat mempunyai fungsi ganda, disatu sisi lain sebagai pusat kebudayaan. Sebagai pusat ekonomi pasar melancarkan kegiatan barang dan jasa dan sebagai pusat kebudayaan, pasar pada kenyataan merupakan wadah transaksi sosial kebudayaan, dimana media tersebut sekaligus menjadi wahana terjadinya interaksi nilai-nilai, norma-norma sosial yang dimiliki para pedagang dan pembeli yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut. Peranan-peranan yang dibawakan baik sebagai pusat ekonomi maupun sebagai pusat kebudayaan diperkirakan akan membawa perubahan-perubahan pada masyarakat. dengan

demikian pranata pasar juga ikut menentukan usaha pembinaan kebudayaan Nasional.

Secara historis pasar yang ada di Bali, baik di pedesaan maupun di perkotaan yang sekarang ini pada awalnya berlokasi di dekat wilayah keraton raja - raja, yang memerintah di suatu kadipaten. tempat ini disebut " Perempatan Desa " (pusat persimpangan arah). Perempatan desa, dianggap mempunyai kandungan kekuatan magis terhadap semua aspek kehidupan atau siklus kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Disamping itu juga fungsinya untuk senantiasa mengarahkan orientasi masyarakat kepada keberadaan " Puri " (keraton). Pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat banyak, tidak dapat lepas dari keterkaitannya dengan usaha pihak keraton dalam mengayomi masyarakat. Sangat wajarlah keterkaitannya dengan usaha pihak keraton dalam mengayomi masyarakat. Sangat wajarlah pasar pada zaman dahulu lokasi tanahnya disediakan oleh raja dengan mempergunakan sebagian kekayaan keraton. Dan disamping oleh raja, melalui petugas-petugas. Untuk lebih mendapat gambaran yang utuh tentang keberadaan Pasar, koperasi sebagai suatu pranata, dapat dijelaskan :

1) **Sitem Norma Sebagai Landasan untuk person dalam pranata Ekonomi.**

Keteraturan dalam pasar pada dasarnya berpedoman pada kebudayaan pasar yang intinya masaing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan itu mendapat keuntungan , baik yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Keadaan seperti itu ada kaitannya dengan diberlakukannya seperangkat aturan resmi yang bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan perdagangan seolah-olah diatur secara otomatis, mereka datang pagi hari sebelum matahari terbit sekitar pukul 05.00 (lima) wita dan pulang setelah jam 18.00 (enam) sore. Kalau pasar yang berlokasi di kodya Denpasar yaitu pasar Badung dan pasar Kumbasari, dapat dilihat puncak kesibukan sekitar pukul 08.00 wita, dengan volume kegiatan jual-beli secara keseluruhan relatif 24 jam.

Para pedagang itu tidak hanya berasal dari daerah setempat juga pedagang dari daerah lain ikut mengadu nasib di pasar tersebut, bahkan pedagang dari luar propinsi Bali ikut memadati, berbaur dengan pedagang-pedagang dari daerah-daerah yang ada di propinsi Bali. Mereka sebagai pedagang dari luar kota maupun dari daerah biasanya tergolong pedagang grosir, dan barangnya yang mereka bawa pada umumnya sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan hasil bumi lainnya. Sebelum sampai ke konsumen, secara bertahap banyak pedagang dilalui, sehingga harganya sedikit lebih mahal.

Ditengah hiruk-pikuknya kegiatan pasar, tidak sedikit pedagang yang melambatkan tangannya sambil berbicara memanggil langganannya atau calon pembeli lainnya. Mereka membeli barang ada yang dijual kembali ditempat lain dan ada pula untuk kebutuhan rumah tangga. Didalam transaksi pembelian ada yang membayar secara tunai, tetapi ada pula yang membayar di kemudian (hutang) sesuai dengan perjanjian mereka. masalah utang - piutang sudah menjadi tradisi antara pedagang kecil dengan pedagang grosir. Pembayaran bisa dilakukan 1 (satu) minggu kemudian. Hal ini juga didukung dengan suatu kepercayaan sesama pedagang satu suku bangsa, bahwa siapa yang berani "memirat" (murtad), dia akan kena hukuman dari Tuhan dan memperoleh "Merta metemahang Wesya" (Keuntungan yang akan membawa petaka). Sedangkan hutang - piutang, pada umumnya sangat jarang dilakukan sesama pedagang suku bangsa atau pembeli lain suku bangsa, mengingat disamping dari kerengganian integritas sosial, juga dipengaruhi oleh faktor kesenjangan komunikasi antar pribadi, sehingga hal ini menimbulkan sikap waspada.

Pedagang atau pembeli yang sudah bagus integritas sosialnya khususnya sesama satu suku bangsa lebih banyak menggunakan bahasa Daerah (Bali), sehingga dalam transaksi jual beli tidak nampak jarak sosial, bahkan nampak kesan kekeluargaan yang mendalam. Seperti contoh, kalau membeli garam, biasanya selain diberikan barang sesuai dengan takarannya, masih diberikan tambahan (ekstra) sebagai

lebihnya, dalam bahasa daerahnya disebut "pengetengan". Penjual atau pembeli dalam suatu pasar, tidak selamanya satu suku bangsa apalagi masyarakat Bali adalah masyarakat yang mempunyai sikap keterbukaan yang cukup tinggi, sehingga dalam kontak-kontak sosial dengan pihak pembeli atau penjual yang selaras dan adanya toleransi, misalnya diwujudkan dengan sikap yang jujur dalam hal penyediaan kualitas barang, memberikan harga yang standar, serta sikap roman muka yang simpatik, sehingga adanya rasa aman, dan tidak terjadi kesan kepanatikan, karena menghormati budaya masing-masing. Adapun suatu tradisi yang ikut menentukan mekanisme pendistribusian barang dan jasa dari desa atau lokasi produsen terutama terhadap barang-barang hasil bumi ke pusat penampungan hasil bumi, pada umumnya pasar-pasar kota dipakai sebagai alternatif terminal penimbunan hasil-hasil bumi, yaitu suatu tradisi yang "hari pasaran". hari pasaran adalah hari yang dijadikan pedoman oleh pedagang-pedagang dari desa yang membawa barang-barang hasil bumi ke kota atau ke pusat-pusat perekonomian (pasar Kota), dan penentuan hari tersebut memakai perhitungan peninggalan sistem Hindu yang disebut "Tri Wara" yaitu Pasah, Beteng, Kejeng. Salah satu diantaranya, dipakai untuk menentukan kapan seorang pedagang mulai mengadakan "Pengepulan" barang-barang hasil bumi dari rumah kerumah penduduk yang ikut terlibat dalam proses produksi terhadap suatu barang atau jasa, dan kapan mereka itu harus mentransfer barangnya kepasar lain (pasar kota). Pada dasarnya masing-masing desa mempunyai hari pasaran, yang mempergunakan salah satu dari "Tri Wara" tersebut, dan menjadi konsensus masyarakat yang hampir menjadi keyakinan sebagian besar anggota pedagang tersebut akan selalu dijauhi oleh "Dewi Melanting" Manifestasi Tuhan sebagai Dewi Keberuntungan).

Masalah penyelesaian hutang piutang, pada sebagian besar masyarakat Bali telah mengenal dan meyakini, bahwa ada hari yang dianggap tabu untuk melunasi utang, yaitu misalnya pada hari "Buda Cemeng" (rebu wage), "Coma Rlbek" (Senen Pon) dan hari-hari lainnya yang disebut : rerainan" (hari-hari yang bermakna hari raya). Dan apabila

dilanggar maka tidak akan pernah kebagian rejeki dari Tuhan. Asumsi magistis ini, kita kaji secara ilmu pengetahuan atau dari ilmu sosial sangat relevan dan masuk akal. Suatu contoh, adanya hari pasaran di suatu desa secara psikomotorik akan dapat mengatur perilaku masyarakat pedagang untuk selalu menghargai kekompakan, kebersamaan yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sirkulasi barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu pasar ke pasar yang lain, secara seimbang dan sekaligus dapat mencegah penumpukan barang secara berlebihan dari pada suatu tempat, hal ini bisa membawa konsekuensi harga barang akan turun, berarti pendapatan masyarakat pedagang akan merosot.

Demikian pula kita membayar pada hari-hari yang dianggap tabu, akan terwujud dalam aktualisasinya, yaitu memberikan kesempatan kepada yang berutang, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, tanpa diganggu oleh mempunyai piutang. Jadi contoh tersebut sudah jelas menggambarkan, masyarakat Bali dalam hal bisnis pun, menempatkan unsur keagamaan dan kebudayaan adalah pada prioritas utama.

Berdasarkan hasil penelitian menampakkan, dalam interaksi antara pembeli dan penjual, telah terjadi sikap saling menghormati, sikap toleransi, saling bantu membantu terutama tampak para pedagang saling meminjam barang, pedagang yang mempunyai etos kerja yang tinggi dengan persaingan yang sehat, seperti pedagang di pasar Badung, pasar Kumbasari dan pasar Kreneng sudah sejak pukul 03.00 (tiga) malam telah bersiap-siap menjagakan barang dagangannya. Pernyataan di atas dapat dibuktikan oleh pendapat responden tampak dalam Tabel IV.8 dibawah ini.

Tabel IV.8

Pola-pola Interaksi Penjual dan Pedagang di lingkungan Pasar

No.	Pernyataan	Prosentase	Keterangan
1.	Ada hari pasaran tertentu	25.00	
2.	Ada hari yang baik untuk membayar utang	25.00	
3.	Ada kepercayaan Dewi Melanting	25.00	

No.	Pernyataan	Prosentase	Keterangan
4.	Selalu memohon keberuntungan pada Ida Sang Hyang Widhi setiap hari mengjhaturkan canang Sari	25,00	

Tabel IV.8

Pola-pola Interaksi Penjual dan Pedagang di lingkungan Pasar

No.	Pernyataan	Prosentase	Keterangan
1	Menerima dengan baik / toleransi	10,00	
2.	Menghormati pelayanan pembeli dengan baik	15,00	
3.	Mentaati peraturan	15,00	
4.	Menjaga kepercayaan langganan	10,00	
5.	Kerja keras, berdagang sudah siap pukul 03.00 malam	50,00	

Sumber : diolah dari rangkuman pendapat responden dengan pertanyaan terbuka.

Berdasarkan Tabel IV.8, dengan tabel IV.9, di atas menampakkan bahwa dalam interaksi antar pedagang dengan pembeli menapakkan sikap hormat. Sikap gotong royong, saling menghormati, selalu menjaga kepercayaan bahwa kerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pernyataan di atas kalau dikaitkan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa " perekonomian disusun bersama berdasar atas azas kekeluargaan ". Di dalam pernyataan tersebut secara operasional membakukan beberapa nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti, nilai kebersamaan, nilai yang mempunyai watak sosial, nilai kerjasama, nilai gotong royong yang tinggi. Nilai budaya tersebut telah merupakan acuan hidup, terutama terwujud dalam interaksi antar orang-orang di paar cukup sopan etis. Sikap perilaku seperti diatas pada pasar-pasar sebagai kesatuan ekonomi yang masih dikelola secara tradisional. Lebih-lebih di pasar Badung, Kreneng dan Kumbasari yang sebagian besar pedagang orang Bali, akan nampak jelas sikap religius mereka.

Disisi lain pasal 33 di atas, akan dapat mewujudkan perekonomian yang dilandasi oleh nilai ekonomi adalah kemakmuran bagi semua orang. Bentuk lembaga ekonomi dilandasi dengan prinsip timbal balik atau prinsip reciprocity. Lembaga tersebut dengan **Kooperasi**. Kooperasi merupakan corak ekonomi Indonesia yang berlandaskan kebudayaan Indonesia, Peranan kooperasi yang dianggap sebagai Soko Guru perekonomian Indonesia secara normatif punya potensi pembinaan kebudayaan nasional.

Disamping itu pula, pernyataan responden bekerja di Koperasi Unit Desa, di Puskud maupun di pasar-pasar, mereka secara tidak langsung sudah mulai mengembangkan bahasa-bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka dan bahkan tampak pula pedagang di Bali sudah mulai berinteraksi dengan menggunakan beberapa bahasa asing.

Namun yang paling hakiki kita melihat bahwa, secara normatif landasan koperasi atau landasan perekonomian Indonesia adalah berlandaskan Pancasila. Pada hakekatnya landasan tersebut membekukan seperangkat nilai-nilai luhur budaya bangsa. Seperti telah pula disebutkan di atas adalah , nilai gotong royong, nilai demokratis, nilai kerja keras, nilai religius yang tinggi, nilai hormat-menghormati, seyogianya nilai-nilai tersebut dapat menata pola perekonomian bangsa Indonesia atau menjadi pola acuan sikap perilaku pedagang / person yang terlibat dalam KUD maupun koperasi. Uraian diatas memberikan suatu jawaban bahwa pranata ekonomi seperti, pasar, KUD, koperasi, Puskud, punya potensi untuk pembinaan nilai-nilai budaya luhur bangsa.

Walaupun potensi tersebut, tidak sebesar potensi yang dimiliki oleh pendidikan formal dengan pendidikan keluarga maupun pendidikan keagamaan di Bali. Dalam pengembangan tersebut, ditemui satu hambatan kurang lancarnya pembinaan kebudayaan melalau pranata ekonomi yang antara lain, kurangnya persepsi pedagang, pegawai yang terlibat dalam koperasi, KUD, pasar tentang kebudayaan secara utuh dan menyeluruh. Lebih-lebih tentang konsepsi kebudayaan nasional, fungsi kebudayaan nasional maupun tentang isi kebudayaan nasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan responden yang menyatakan kebudayaan nasional, hanya mencakup unsur kesenian daerah Bali. Secara kognitif tentang kebudayaan nasional masih terbatas, namun efektif pembudayaan nilai-nilai luhur budaya di atas menata sikap dan

prilaku yang mencerminkan punya etika-moral yang cukup tinggi, Khusus pedagang di Bali, nilai kerja keras, nilai religius mereka cukup tinggi.

2. PERSONEL

Seperti pernah disinggung dibagian depan bahwa fungsi pasar adalah sebagai arena atau tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi pertukaran barang/jasa baik dengan menggunakan uang sebagai nilai tukar maupun melalui sistem Barter, berdasarkan sistem harga yang berlaku. Oleh karena pasar merupakan arena / tempat pertemuan para penjual dan pembeli, maka pasar bagi masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat tersebut dengan dunia luar. Ini berarti pasar mempunyai peranan dalam perubahan kebudayaan yang berlangsung di dalam suatu masyarakat.

Personel yang terlibat dalam masyarakat pasar, sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat, karena mereka dalam memperlancar mekanisme jual beli barang, menawarkan alternatif-alternatif kebudayaan yang berlainan dari kebudayaan masyarakat setempat. Dominasi hubungan fungsional antara penjual dengan pembeli berpeluang strategis timbulnya akulturasi kebudayaan baik sesama satu suku bangsa dalam satu propinsi, maupun suku bangsa lainnya di luar propinsi atau negara. Disamping sebagai personal pokok dalam suatu pasar, penjual dan pembeli di dalam masalah kelancaran, ketertiban dan keadaan pembeli serta kenyamanan, mereka memerlukan kehadiran personal lain, didalam hal ini berupa pelayanan bersifat jasa. Dalam kaitan ini, diperlukan orang yang berperan sebagai tukang angkut barang, sopir dalam memenuhi kebutuhan transportasi, satpam atau penjaga untuk memenuhi kebutuhan keamanan, tukang pengepakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam menjamin kebutuhan barang sampai di tempat tujuan dan semakin berkembang pula kebutuhan-kebutuhan jasa, dan tidak sedikit melibatkan tenaga kerja. Kalau ditinjau dari segi pengelola pasar, dalam hal ini PD Pasar, mereka mengoperasionalkan beberapa fungsionaris - fungsionaris pasar, seperti petugas keamanan, petugas administrasi tata usaha

kantor, petugas tukang pungut restribusi setiap barang masuk dan keluar restribusi penyewaan los-los pasar, petugas manajemen pasar dan sebagainya.

Personal - personal yang bekerja disamping personal dan pembeli, cukup memegang peranan penting, dalam kaitannya meningkatkan peranan pasar sebagai urat nadi perekonomian rakyat, disamping sekaligus dalam upaya pembinaan kebudayaan nasional. Suatu contoh konkrit dapat diamati suatu keadaan pada sebelum barang - barang itu berada di pasar pada waktu barang itu dipasar dan sesudah keluar dari pasar. Sebelum barang-barang itu dibawa kepasar, banyak peranan-peranan sosial yang bekerja dalam fase tersebut, seperti produsen yang sebagian besar terdiri dari keluarga yang memang mempunyai mata pencaharian penghasil barang tertentu. Kemudian barang-barang yang dihasilkan dari beberapa keluarga, dalam fase berikutnya, berperan tokoh-tokoh pengepul yang sudah mapan dalam persiapan modal, untuk membayar barang-barang, sehingga para pengepul tersebut sekaligus berperan sebagai agen distributor barang yang siap dibawa kepusat-pusat pasar. Peranan - peranan pembantu otomatis dibutuhkan disini, seperti sopir, buruh angkut, tukang timbang dan sebagainya semuanya ikut terlibat.

Pada waktu barang berada di pasar, sudah barang tentu dihadapkan kepada banyak personel yang nantinya akan berfungsi mengatur mekanisme jual beli barang secara tertib, aman dan nyaman yang personel-personelnya sudah dipaparkan di atas. Demikian pula personel yang terlibat pada waktu barang sudah keluar dari arena pasar, juga terkait dengan sopir, buruh angkut dan sampai pada terminal proses produksi yaitu konsumen.

Kalau dikategorikan jenis-jenis pedagang dari segi permodalan dapat dikategorikan sebagai pedagang eceran, pedagang kelas menengah dan pedagang yang bersifat tidak tetap atau pedagang yang menawarkan dagangannya kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar, setelah itu pergi, pedagang ini sering di sebut : " Makelar" (tengkulak). Pedagang kelas menengah yang biasanya mendiami los-los utama dipasar,

menyediakan barang-barang bagi pengecer atau penjaja. Barang yang diperoleh itu adalah hasil transaksi dengan pedagang yang membawa langsung dari daerah penghasil barang itu (hasil bumi atau hasil laut). Sedangkan pedagang kecil membeli barang-barang dari pedagang kelas menengah, dan langsung di jual ke konsumen baik yang ada di pasar maupun dengan cara menjajakan kerumah-rumah.

Demikianlah beberapa paparan, yang berkaitan dengan komponen personal yang menjadi subyek dan obyek mekanisme perekonomian pasar, sehingga pasar dapat menawarkan berbagai kebutuhan pokok hidup dan sebagainya. Dipasar ini berdatangan, berkumpul, berinteraksi satu sama lain. Setiap saat mereka bisa bekerja sama, berkompetisi dan bahkan konflik. Mereka berkelompok, membuat batasan-batasan sosial. Pedagang buah berkumpul dengan pedagang buah, pedagang ikan berkumpul dengan pedagang ikan dan seterusnya. Semua berkumpul menurut barang yang dijualnya. Itu semua dimengerti dan dipahami oleh mereka dan menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan pasar tradisional yang telah menjadi bagian tradisi mereka sejak zaman kerajaan di Bali. Dari kacamata ilmu sosiologi, dapat dikatakan, bahwa pasar tidak sekedar wadah dalam transaksi ekonomi, karena pada dasarnya para pedagang yang berada diwilayah itu berasal dari berbagai golongan. Secara horisontal para pedagang itu bisa dikategorikan berdasarkan perbedaan daerah dan perbedaan agama. Secara vertikal pedagang itu bisa dikategorikan pedagang kuat dan lemah. Asumsi penggolongan ini mungkin saja bisa terlihat dari wujud tempat mereka berdagang, desainya, serta yang mungkin paling kentara adalah logat bicara pedagangnya. Dengan demikian pasar dalam kenyataannya merupakan wadah transaksi sosial dan kebudayaan, dimana pada kondisi tertentu terjadi juga integrasi nilai-nilai, norma-norma sosial yang dimiliki oleh berbagai komponen personel yang terlibat :

3). PERALATAN FISIK.

Seperti telah diuraikan, pasar sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. Perkataan " Sosial" sudah jelas menggambarkan proyeksi aktifitas manusia untuk memperoleh apa yang sudah di rencanakan. sebagai ikhtiar untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Manusia sudah jelas mempunyai keterbatasan tertentu, dan untuk mengatasinya, mereka membutuhkan kehadiran sarana dan prasarana hidup, sehingga memperoleh kemudahan dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pasar, tidak lain adalah sarana dan prasarana yang bersifat produktif, bukan konsumtif.

Modal adalah prasarana terpenting bagi para pedagang / wira-swasta dalam hubungan sistem pasar ialah berupa uang, barang dan jasa. Dengan problema modal awal seperti diterangkan di atas, maka mulailah mereka membuka lapangan usaha baru sebagai pedagang. Selanjutnya barang-barang yang siap di pasarkan diperlukan transportasi untuk bisa cepat sampai pada lokasi sasaran, sehingga dapat mengurangi resiko rusak, busuk dan sebagainya. Sarana transportasi yang paling vital biasanya lebih banyak mempergunakan "Dokar" (delman), kendaraan bermotor atau mobil, sepeda dayung, cikar dan lainnya. Para pedagang dalam usaha mewujudkan suasana transaksi yang tertib, teratur, tenang dan nyaman memerlukan suatu areal tanah yang memadai, sehingga dapat menampung orang-orang yang berkepentingan dan menampung sejumlah barang yang ditawarkan. Pasca dari semua itu, para pedagang yang menetap pada suatu lokasi pasar yang telah disepakati bersama memerlukan fasilitas seperti listrik, air, kamar mandi, WC, serta kapling-kapling bangunan tempat jualan (los-los). Dalam proses transaksi barang, tentu diperlukan kejelasan tentang kualitas dan kuantitas barang, untuk itu diperlukan alat ukur/takaran/timbangan dan sejenisnya. Dalam memenuhi target distribusi yang cepat, tepat, lancar dan aman diperlukan jalan yang memadai, sehingga kendaraan dapat bergerak sesuai dengan keinginan.

Demikianlah secara garis besar peralatan fisik yang harus ada dalam suatu pasar sehingga dapat berperan baik dalam sosial ekonomi dan pembinaan kebudayaan nasional.

4.4. Pembinaan Kebudayaan Nasional melalui Pranata Politik.

Seperti telah dibicarakan di atas, pembinaan kebudayaan tidak seluruhnya identik dengan pembinaan kesenian, ternyata berskala menyeluruh dari berbagai aspek vital kehidupan manusia. Dalam hal ini,

kita menginjak pada uraian yang dapat menggambarkan pranata politik sebagai sub sistem wahana pembinaan kebudayaan nasional. Berbicara masalah politik, eksistensinya pasti berkisar pada Pemimpin, yang dipimpin dan bagaimana cara atau sistem yang dipakai dalam memimpin sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (tata tenram kerta raharja)

Berkaitan dengan tujuan dari fenomena dasar dari politik ini, akan dibahas politik yang bersifat positif artinya yang mampu mempunyai tujuan menciptakan ketahanan masyarakat, yang nantinya mejadi landasan pacu untuk perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia lainnya. Prilaku politik, sebenarnya telah dikenal dan telah dilaksanakan pada masa lampau, sejak manusia mulai mengenal dirinya sebagai sub. suatu komunitas (diolah dari buku F.Iswara, SH, 10:1970). Dengan demikian prilaku politik, tidak saja menjadi monopoli masyarakat modern, juga menjadi milik masyarakat yang tradisional pun, demi untuk mendapat pengakuan terhadap hak azasi manusia, dalam aktivitas manusia pada waktu berinteraksi dengan sesamanya. Aktivitas manusia yang berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya itu, biasanya berpola dan diatur serta ditata oleh gagasan dan tema berfikir yang berada dalam kepalanya. Gagasan dan tema berpikir tersebut dinamakan sistem budaya. Sistem budaya berfungsi menata fisik, seperti terciptanya benda-benda budaya, kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat dan sebagainya. Koentjaraningrat mengembangkan ketiga sistem terbut kedalam lingkaran konsentris yang saling berkaitan dengan 7 unsur kebudayaan yaitu :

- (1) Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup;
- (2) Sistem Mata Pencaharian Hidup;
- (3) Sistem Kemasyarakatan;
- (4) Sistem Bahasa;
- (5) Kesenian;
- (6) Sistem Pengetahuan , dan
- (7) Sistem Religius.

(Koentjaraningrat, 1;1984, diolah dari Kebudayaan mentalitas dan pembangunan).

Salah satu unsur yang terkait dengan pranata politik adalah sistem kemasyarakatan. Sistem ini terdiri dari sus budaya yaitu.

- (a) Sistem Kekerabatan;
- (b) Sistem Kesatuan Hidup;
- (c) Asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan;
- (d) Sistem Kenegaraan (Koentjaraningrat, 1981)

Keempat sub unsur tersebut mempunyai hubungan satu sama lain, misalnya satu kelompok manusia paling sedikit diikat oleh enam unsur yaitu :

- (a) Suatu sistem norma yang mengatur kelakuan warga kelompok
- (b) Identitas atau rasa kepribadian kelompok yang telah disadari oleh semua warga kelompok,
- (c) Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang-ulang.
- (d) Suatu sistem Hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok.
- (e) Suatu pimpinan atau pengurus Yang Mengorganisasi Aktivitas-aktivitas Warga Dalam Suatu Kelompok,
- (f) Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta suatu perusahaan. (diolah dari Konggres Kebudayaan 1991)

Dengan demikian masalah politik tidak bisa dipisahkan dengan masalah sosial dan hukum. Kehidupan sosial, politik dan hukum adalah sebagian unsur budaya yang dilahirkan oleh hubungan timbal balik (interksi) antara satu dengan lainnya. Masyarakat sebagai proyeksi dari kehidupan sosial politik dan hukum, dapat melahirkan pola kehidupan yang bersifat kerjasama (cooperasi), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). (diolah dari konggres kebudayaan 1991). VBertitik tolak dari teori tersebut, politik sebagai suatu pranata agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia harus tetap ada jalur hukum yang terproyeksi dari falsafah bangsa yaitu Pancasila, hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan vertikal, sedangkan politik pada

hubungan horisontal dengan sosial kemasyarakatan, akan terwujud dalam suasana keselarasan antara sesama manusia.

Implikasi dari kedua hubungan ini, akan menjadikan politik sebagai pranata pembinaan kebudayaan nasional. Seperti telah dikatakan oleh Koentjaraningrat, bahwa suatu pranata akan nampak dalam tiga komponen yaitu sistem Norma, personel dan peralatan fisik. Dibawah ini akan diuraikan eksistensi pranata politik di Indonesia, khususnya di Bali kiprahnya sebagai wahana pembinaan kebudayaan nasional, melalui :

SISTEM NORMA

Menjadi konsensus nasional, bahwa P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) merupakan kunci pada ketahanan nasional dan juga memantapkan aspirasi politik masyarakat, baik dalam porsi infrastruktur maupun dalam suprastruktur. Kedua porsi diatas berkaitan dengan disatu sisi aspirasi dari kedaulatan rakyat, disisi lain aspirasi politik dan lembaga-lembaga legislatif. Kedua sisi ini, yaitu sisi kedaulatan rakyat dan sisi lembaga-lembaga formal yang mempunyai kekuatan melegalisasi norma-norma sosial menjadi norma hukum, harus dijaga agar merupakan jaringan yang harmonis, jika tidak demikian, maka akan terjadi sekularisme yang ekstrim, yang pada gilirannya menjadi picu terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan.

Pada masyarakat Bali yang mengembangkan falsafah " Tri Hita Karana" yaitu tiga hubungan keselarasan manusia, untuk mencapai kesejahteraan (jagadhita) yaitu :

- (1) Keselarasan dengan Tuhan
- (2) Keselarsan dengan sesamanya dan
- (3) Keselarasan dengan alam lingkungan. Dari ketiga aspek tersebut, telah banyak melahirkan produk-produk norma-norma sosial dan sudah terangkum secara apik dalam falsafah Pancasila

Menyimak falsafah " Tri Hita Karana" sebagai landasan dasar kehidupan sosial, politik dan hukum masyarakat Bali, yang semuanya terbuku dalam " Awig-awig" masing desa di Bali, secara

formal kenegaraan, produk-produk nilai operasionalnya tidak berbeda dengan falsafah Pancasila, sebagai suatu contoh :

- (1) Aspek keselarasan manusia dengan Tuhan (Parhyangan), akan sesuai dengan rumusan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Aspek Keselarasan Manusia dengan sesamanya (Pawongan) akan sesuai dengan rumusan sila II, III dan IV yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan dan yang ke
- (3) Aspek keselarasan manusia dengan lingkungan (pelemahan) akan sesuai dengan rumusan keadilan sosial, karena dalam aspek yang terakhir ini, manusia berkiprah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam lingkungan sosial mereka dapat menjual jasa, dan seterusnya.

Walaupun masyarakat Bali secara Kognitif, belum banyak mengetahui nilai-nilai yang termasuk dalam butir-butir Pancasila, namun secara efektif dan psikomotorik, mereka telah mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat Modern sekarang ini.

Pada jaman masih berbentuk kerajaan, raja-raja di Bali dalam mengatur strategi pemerintah, sering menggunakan jasa pengawai atau "bagawanta" (Pendeta Raja) untuk menggali konsep-konsep kepemimpinan yang berwawasan religius, yang sekarang ini masih digetoli oleh masyarakat dalam perilaku di masyarakat. Dalam Perkawinan Ramayana ada disebutkan "Ksayanikang papa mahan prayojana" artinya lenyapnya kesengsaran atau penderitaan itu menjadi tekad dan cita - cita seorang pemimpin.

Masyarakat Bali dalam Kiprah bermasyarakat, masih cenderung mencari pembenaran-pembenaran melalui apa yang tersurat dan tersirat dalam sastra klasik warisan leluhur. Nilai-nilai yang dikumandangkan dalam kakawin atau karya sastra klasik lainnya, diyakini sebagai suatu yang bijak dan diyakini sebagai panutan. Sebagai suatu contoh, kalau disimak kondisi masyarakat Bali dalam kelompok pemimpin tradisional, sebagian besar, pengetahuan kognitifnya, berorientasi pada karya-karya klasik

tersebut. Ada suatu pradigma di masyarakat, apabila pemimpin tidak "mesastra" (tidak bisa atau tidak senang membaca sastra-sastra) dianggap pemimpin yang " tuha " (tua) tuuh (umur) maksudnya ketuaan pemimpin hanya terbatas pada umur, tidak tua dalam atau tidak mapan dalam ilmu. Sebab tugas seorang pemimpin seperti dikatakan dalam kakawin Ramayana tersebut diatas, adalah melenyapkan mesengsaraan atau penderitaan mesyarakat. Masyarakat Bali dalam mengembangkan aspirasi politiknya, selalu berlandaskan " Dharma" (tujuan-tujuan yang berorientasi pada nilai kepatuhan), yang dikenal sebagai " Dharma Negara ". Aktualisasi dari nilai efektif ini dikembangkan dalam contoh kasus : Ketaatan membayar pajak, mendukung program pemerintah (KB. sukses di Bali, para transmigrasi Bali mendapat predikat teladan, kerukunan beragama mantap dan sebagainya), mentaati norma-norma atau aturan-aturan dalam menyalurkan aspirasi politiknya, terbukti dari masih aktifnya lembaga-lembaga tradisional, serta dihormati oleh masyarakat sebagai lembaga sosial yang dapat memenuhi hasrat kemanusiaannya dari dulu sampai sekarang. Seperti lembaga sosial tradisional " Banjar ", " Desa Adat", " Subak" yang semuanya masih memegang peranan penting dan strategis, serta menjadi acuan bagi lestariannya " Awig-awig Desa".

Banyak lagi contoh kasus lainnya, yang mencerminkan masyarakat Bali mempunyai potensi politik, masih didominasi oleh pimpinan tradisional. Walaupun demikian nilai-nilai demokratisasi tetap diberikan peluang secara bebas sepanjang etika masyarakat dipenuhi, seperti misalnya melalui " Sangkepan" (pertemuan) Banjar, Desa Adat, Subak dan sekaa-sekaa.

Dominsai yang dianut oleh pimpinan tradisional bukan merupakan bukan pengkultusan sepihak, melainkan demi untuk menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Kalau toh ada anggota yang mendongkel, secara emperis mereka akan mendapat hukuman sosial, seperti " rasa malu " atau " puikan banjar" (di benci masyarakat) dan sebagainya.

Seperti telah dikemukakan di atas, pranata politik pada dasarnya sangat mendukung upaya pembinaan kebudayaan nasional, sepanjang hal itu selaras dengan semangat Pancasila dan UUD

1945. Untuk lebih jelasnya, kami akan paparkan pernyataan responden dalam tabel :

Tabel IV.10
Pernyataan responden tentang pranata-pranata politik yang mendukung upaya pembinaan Kebudayaan Nasional

No	Pernyataan	Prosentase	Keterangan
1.	Mempublikasikan kembali keberadaan raja-raja pad zaman dahulu, melalui media efektif	25.00	
2.	Mempublikasikan hari-hari bersejarah serta seperangkat nilai-nilai yang tersirat didalamnya	5.00	
3.	Ditumbuhkembangkan wawasan Nusantara, disiplin Nasional, ketahanan Nasional, kepeloporan, patriotisme dan sebagainya	10.00	
4.	Melestarikan dan mengefektifkan fungsi lembaga-lembaga sosial / adat	45.00	
5.	Mengembangkan swasembada daerah dan potensi budaya daerah dalam kaitan dengan puncak-puncak kebudayaan daerah.	15.00	
6.	Memberikan keteladanan kepada masyarakat, bagi pimpinan-pimpinan kemasyarakatan serta penyuluhan.	15.00	

Sumber : diolah dari pendapat responden

Berpedoman dari pernyataan responden di atas, menunjukkan indikasi tentang upaya pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata politik, memprioritaskan efektifitas lembaga-lembaga tradisional seperti banjar, Desa Adat, Subak dan Sekaa-sekaa bersama seperangkat awig-awignya dan selanjutnya dilestarikan eksistensinya.

Dalam kaitan ini, masyarakat sebagai pendukung kebudayaan Bali dari dulu sampai sekarang masih menganggap lembaga-lembaga tradisional tersebut sebagai " Agen culture" atau pusat - pusat

kebudayaan, yang meberikan manfaat timbal balik, saling mengisi yaitu masyarakat Bali dalam mengaktifkan suatu upacara, misalnya upacara "Ngaben", mereka akan memerlukan mbantuan masyarakat melalui Banjar untuk keperluan-keperluan seperti membuat sesajen, tempat mayat, memandikan mayat, dan sebagainya dengan prinsip "suka duka, kebersamaan dan kegotong-royongan". Demikian pula upacara-upacara lainnya, yang memerlukan tenaga banyak, anggota masyarakat berhak menggunakan jasa banjar untuk ikut menyelesaikannya. Dalam proses timbal balik ini, secara otomastis terjadi interaksi sosial yang kadang-kadang muncul pembaharuan-pembaharuan di bidang penataan kemasyarakatan, disamping mengaplikasikan tradisi-tradisi lama yang masih dianggap relevan.

Lembaga-lembaga tradisional tersebut, untuk selalu mendapat dukungan dari masyarakatnya, mereka para pengurus lembaga tersebut, senantiasa meningkatkan pelayanannya, terutama sebagai pusat informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Contoh, dalam upacara Pura Jagat (Pura Umum), maka pemberitahuan cukup disampaikan kepada kelian adat, dengan demikian arus informasi akan lebih cepat sampai kepada anggota masyarakat, inilah suatu bukti bahwa efektifnya lembaga-lembaga tradisional dalam menyampaikan informasi. Banyak contoh-contoh lain yang masih sepola dengan mekanisme ini.

Mempublikasikan kembali keberadaan raja-raja pada zaman dahulu, melalui media efektif masih dianggap penting oleh sebagian responden. Suatu yang patut menjadi dasar pemikiran, bahwa dalam pembinaan kebudayaan nasional, memang seharusnya mempublikasikan kembali keberadaan raja-raja pada masa lampau, bukan untuk pengkultusan tanpa perhitungan, melainkan sangat relevan kalau disimak nilai-nilai yang tersirat didalamnya, semangat, pertokohnya dan sebagainya, dapat dipetik dari simakannya, seperti peristiwa : Perang Puputan Badung, "Puputan Margarana", "Perang Jaga Raga" dan Strategi pemerintahannya, kalau dapat simakan tersebut dipublikasikan, akan dapat memberikan pendidikan politik yang efektif dan tetap mencerminkan wawasan budaya. Dalam prosentase yang sama (15%), mengembangkan swasembada daerah dan potensi budaya daerah dalam kaitan dengan menggali puncak-puncak kebudayaan daerah, masih

dianggap penting oleh sebagian responden. Hal ini cukup beralasan, dari pihak pemerintah, telah memberikan dampak positif bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, juga adanya pengakuan terhadap eksistensi daerah, sebagai sub sistem dari nasionalisasi.

Dari pihak masyarakat melalui awig-awig desa, peranan dan pesangkepan-pesangkepan, telah mampu mewujudkan berbagai macam bentuk-bentuk sistem sosial yang berpotensi menjangkit sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya untuk menciptakan kesejahteraan. Keteladanan pemimpin kepada rakyat serta penyuluhan-penyuluhan cukup efektif untuk mengembangkan suasana politik yang konstruktif dari masyarakat, hal ini ditegaskan oleh beberapa responden sebagai suatu indikator sumbangan pranata politik dalam upaya pembinaan kebudayaan nasional. Berkaitan dengan hal ini, yaitu keteladanan, ada ungkapan di masyarakat Bali yaitu " Buka babakan pole, mekidian ada, anggon tuara ada" artinya seperti pohon pole (kulitnya bisa dipakai ramuan obat), diberikan orang lain ada, tetapi untuk dipakai sendiri tidak ada. Bertitik dari ungkapan tersebut, menunjukkan kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar mampu memberikan keteladanan, kalau tidak demikian akan dapat merusak jaringan-jaringan sosial kemasyarakatan.

Ditumbuhkembangkan Wawasan Nusantara, Disiplin Nasional, Ketahanan Nasional dan sebagainya, menurut pendapat responden perlu mendapat perhatian. Sangat masuk akal, bahwa supaya citra kepanatiran daerah yang berlebihan harus dihindarkan secara dini. Dengan memiliki wawasan kedaerahan yang luas, maka akan membuka peluang untuk menerima informasi yang lebih luas, sebagai acuan utama untuk dapat mengembangkan kepeloporan, rasa patriotisme untuk ajegnya masyarakat, bangsa di naungan UUD 1945. Hal ini dibudayakan secara dini, akan terkait dengan fungsi sekolah sebagai pusat kebudayaan secara formal. Anak-anak murid atau generasi muda, akan lebih mantap rasa bela negaranya, bila memperlihatkan film G 30S PKI, TV, Bioskop dan lain-lainnya. Publikasi hari-hari bersejarah seperti itu, secara otomatis dengan metode " CBSA " (cara belajar siswa aktif), siswa diberikan menilai sesuai dengan persepsinya dan dari sana siswa akan dapat pengetahuan secara kognitif, untuk selalu waspada terhadap ancaman bahaya dan sebagainya. Hal ini juga disadari oleh beberapa responden

sebagai hal yang cukup efektif dalam kaitan dengan upaya pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata politik.

Menyimak kembali pemaparan di atas, menyangkut potensi pranata politik sebagai wahana pembinaan kebudayaan nasional, ternyata pranata politik, tumbuh dan berkembang dari akar-akar budaya bangsa atau warisan budaya leluhur yang masih relevan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan Kondisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata politik, sangat beralasan dan sangat mendesak dilakukan, mengingat pengaruh globalisasi semakin gencar, kalau tidak diintensifkan pembinaannya, akan bisa mengerogoti pilar-pilar budaya bangsa.

4.5. Pembinaan Kebudayaan Nasional Melalui Pranata Agama.

Agama adalah suatu ajaran yang memuat tuntunan hidup manusia, agar manusia dapat dijauhkan dari kegelapan, yang dapat menjerumuskan manusia kearah kesengsaraan hidup. Akan tetapi sebaliknya kalau ajaran-ajaran itu konsekwen dilaksanakan, niscaya dapat mengantarkan manusia menuju kesejahteraan (jagadhita) dan terlepas dari segala penderitaan (Moksa), serta semua agama adalah Wahyu Tuhan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Agama dalam operasionalnya untuk menuntun manusia menjadi salah satu unsur kebudayaan manusia yang bersifat universal (culture universal). Unsur budaya manusia sering disebut dengan relegi (Koentjaraningrat, 1981 : 7). Sistem relegi sebagaimana juga unsur-unsur lain dalam kebudayaan manusia, tercipta dan dikembangkan karena kebutuhan manusia dalam hidupnya, baik kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak (Radam, 1990 : 1).

Dalam masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu mengembangkan budaya agama dalam tiga macam bentuk warisan budaya agama, masing-masing berbentuk fisik (Etika dan susila / hukum agama) dan sistem ideologi (tatwa). Ketiga bentuk tersebut, tidak lain merupakan manifestasi dari kerangka agama Hindu yaitu :

- (1) " Tatwa " sebagai inti ajaran Agama bersifat kognitif,
- (2) Susila yaitu ajaran Agama dalam tingkat " efektif" dan
- (3) Upacara yaitu ajaran agama dalam bentuk pshikomotorik, yang menata perilaku manusia dengan mengaktifkan berbagai upacara

keagamaan yang menggunakan simbol-simbol tertentu (Nyata), serta diyakini sebagai sarana suci untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ajaran agama dalam tingkat " Efektif " berintregasi dengan adat, sehingga dengan demikian masyarakat Bali (Hindu) dalam mengaktifkan upacara, tidak dapat lepas dari adat yang mempunyai daya fleksible yang tinggi dengan agium desa, (sesuai dengan tempat/lokasi), Kala (menurut waktu) dan Patra (menurut keadaan). Dengan kombinasi ini pelaksanaan Agama di Bali sangat sulit dipisahkan dengan " adat " serta dalam tingkat tertentu, ada beraneka macam variasi, hal ini terjadi dan tumbuh dari pancaran ajaran Karma Marga (kerja dengan ketulusan) dan Bhakti Marga (pasrah kepada Tuhan). Kemantapan umat beragama (Hindu) di abli, senmakin hari semakin nampak semarak, memberikan dampak positif bagi pelestarian nilai-nilai adat bali yang mengkemas warisan budaya luhur budaya, disamping mewujudkan tujuan agama, sebagai upaya melenyapkan " Awidya" (kegelapan) serta tuntunan Tuhan.

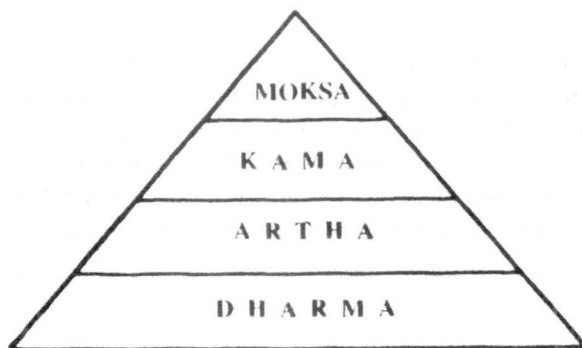
Pranata agama telah diproyeksikan kedalam kancah kehidupan manusia, akan dapat jelas kita lihat eksistensinya dengan memaparkan melalui 3 (tiga) komponen pranata yaitu sistem norma, personel dan peralatan fisik (Koentjaraningrat 1984 : 15)

4.5.1. Sistem Norma

Seperti diketahui masyarakat Bali yang beragama Hindu, di dalam memroyeksikan ajaran agama dalam kehidupan sosial dilandasi dengan kitab suci : " Weda" . Dalam Agama Hindu, Weda sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu Tuhan, banyak mempunyai kitab suplemen yang disebut " Weda Smerti ". Dari kita suci inilah yang paling banyak berperan dalam mengaktualisasikan wahyu Tuhan, kedalam kehidupan sosial. Kondisi kita Weda Smerti ini mempunyai wawasan yang luas dan kom - plek, kadang-kadang sulit dipahami oleh semua orang yang belum memiliki tingkat kerohanian yang memadai, hal ini sudah diantisipasi oleh maha resi Hindu (Nabi), maka lahirlah berbagai kitab suci lainnya seperti Kita Suci " Bhagwandgita" (Pancamo Weda). Saracamucaya", Niti Sastra (Ajaran Kepemimpinan), Slokantara dan banyak lagi, berjumlah ribuan kitab suci, yang nampak masing-masing kitab suci mengulas satu aspek

dari aspek yang sangat luas. Dari kitab-kitab suci inilah, mengkristali - sasikan kedalam kancan kehidupan masyarakat, yang dienkulturasikan oleh para maha Resi Hindu Kepada siswanya dan masyarakat sekitarnya, kemudian menjadi warisan dari generasi sampai sekarang.

Masyarakat Hindu, meyakini bahwa hidup kedunia ini lahir menjadi manusia adalah sangat utama, karena dilengkapi oleh "Bayu" (tenaga hidup / sumber daya manusia) Idep (pikiran/intelektual/imajinasi) dan sabda (kemampuan berkomunikasi). Ketiga elemen tersebut di aplikasikan kedalam empat macam tujuan hidup manusia secara hakekatnya yang saling terkait dan tidak terpisah satu dengan yang lain, sebagai hubungan piramidal yaitu :



Artha tiadanya berarti tujuan tetapi juga material atau benda-benda. manusia hidup memerlukan harta benda, mereka memerlukan rumah, sawah, uang dan lain-lain. Namun untuk memperoleh semua itu ada aturannya / landasannya yaitu " Dharma". Maksud nya harus diperoleh dengan tidak bertentangan dengan norma-norma kebenaran, norma - norma agama. Dengan diperolehnya " Artha" tersebut, maka keinginan manusia-manusia yang alim dan bijaksana akan dapat terpenuhi. Kama (keinginan) dalam kaitan ini bukanlah keinginan yang didominasi oleh nafsu, melainkan keinginan untuk mewujudkan pengabdian secara tulus ikhlas kepada orang lain, sesuai dengan tugas dan kewajiban masing - masing (Swadarma), demi terwujudnya kesejahteraan orang lain termasuk diri sendiri. "Karma" yang berkarakter demikian, akan mewujudkan

rasa aman, selaras dalam suatu komunitas serta dalam diri masing-masing akan merasakan adanya kedamaian spiritual, yang nantinya menjadi "embrio" terwujudnya "Moksa". Moksa dalam aspek transendental merupakan suatu keadaan para normal dimana atman keluar dari lingkaran kehidupan, manunggal dengan Tuhan (Sangkan Paraning Dumadi). Sedangkan moksa dalam aspek imanent, adalah suatu keadaan hidup yang tidak terusik oleh problema-problema hidup, ketergantungan, penderitaan dan semacamnya. Manusia merasakan tata tentrem kerta raharja serta adil dan makmur.

Jadi dengan demikain implikasi norma-norma tersebut, akan dapat menciptakan keseimbangan hidup, antara kebutuhan jasmani dan rohani, dapat dikatakan selaras dengan pembangunan Indonesia seutuhnya.

Di dalam kitab Mahabarata, terutama dalam Santi Parwa dijelaskan bahwa Dharma mempunyai banyak pintu / jalan yang disebut " Sarwa Dwara ". Apabila manusia mau menjalankan dengan penuh iman dan tekun pasti akan mengantar pada tujuan hidup yang tertinggi yaitu Moksa. dalam mencapai kehidupan yang atata tentram kerta raharja (moksa) tersebut, agama Hindu mengajarkan ada dua jalan yaitu :

1. Wairagya yaitu tanpa motif mencari kesenangan pribadi, untuk menikmati sendiri, tanpa melihat kepentingan / penderitaan orang lain.
2. Swadarma yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban secara konsekwen tanpa pamrih atau menghitung-hitung kemuliaan, beramal dan sebagai pelayan - pelayan umat yang profesional umat profesional demi untuk kebahagiaan bersama.

Kedua ajaran ini disosialisasikan kedalam bentuk " Pesukadukaan " dalam masyarakat Bali, dan hidup dalam suasana kegotong-royongan dalam segala hal, terutama dalam kematian, pelaksanaan upacara daur hidup, dan syukuran. Masyarakat Bali mempunyai karakter masyarakat sosial religius, karena dipancari oleh karma marga (Jalan Kerja) dan Bhakti Marga (Jalan berbakti / Pasrah diri / do'a kepada Tuhan). Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas manusia Bali yang beragama Hindu, seperti pada jualan ada " Plangkiran ", " Sanggah " (Pemujaan Keluarga), setiap mulai kerja, membangun rumah dibuatkan " turus lumbung " (

(bentuk sederhana tempat pemujaan Tuhan), setiap selesai bekerja / membangun rumah dibuatkan upacara " Pemelaspas" (peresmian secara spiritual) dan banyak lagi yang menunjukkan suatu keyakinan bahwa kerja, aktivitas baru dapat mendatangkan kebahagiaan umat manusia bila sudah mendapat rahmat Tuhan.

Disamping Ajaran tersebut di atas, yang sudah terbaku dalam sistem nilai budaya masyarakat bali yang beragama Hindu, ada dua landasan etika Hindu yang bersifat mendasar yaitu :

1. Yama Brata (pengendalian diri yang harus dilaksanakan setiap orang dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.)
2. Niyama Brata yaitu pengamalan atau pelaksanaan moral agama didalam kehidupan sosial secara konsekwen, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya.

Kedua ajaran ini dirangkum kedalam Tri Kaya Parisuda yaitu Tiga macam perbuatan mulia yang mendatangkan kerahayuan, yaitu :

- 1). Kayika yaitu perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah moral
- 2). Wacika yaitu berkata yang baik dan benar sehingga dapat dipercaya dan tidak menjerumuskan orang pada kesesatan dan kematian (fitnah), dan
- 3). manacika yaitu berfikir yang suci, baik dan benar maksudnya, selalu mengontrol pikiran agar tidak liar, tidak memikirkan hal-hal yang menyesatkan, melainkan selalu memukpuk kebijaksanaan dengan orientasi kepada etika agama.

Dengan intensifnya pembinaan - pembinaan keagamaan masyarakat, di keluarga dan di lingkungan lainnya, masyarakat menjadi lebih terbuka dan mantap melaksanakan ajaran agamanya, tidak lagi melaksanakan ajaran agama secara " Mula Keto " atau memang begitu yang berada dalam konotasi efektif saja, tetapi umat Hindu semakin banyak yang sudah dapat mengkognitifkan ajaran Agamanya. Seperti yang termuat dalam kitab suci **Saracamuscaya** 259, terdapat rincian Dasa Yama Brata (10 macam upaya pengendalian diri) yaitu :

- (1) Anrasansa (tidak mementingkan kepentingan pribadi atau mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi)
- (2) Ksama (bersifat pemaaf, suka mengampuni kesalahan orang lain, serta tahan uji terhadap keadaan)
- (3) Satya (Jujur, tidak suka berbohong, satukan pikiran, perkataan dan perbuatan),
- (4) Ahimsa (tidak bunuh-membunuh, tidak menyakiti dan membuat susah makhluk atau orang lain)
- (5) Dama (bersabar dan dapat menasehati diri sendiri, Introspeksi)
- (6) Arjawa (tulus ikhlas, berterus terang, bersikap terbudak)
- (7) Prithi (welas asih, memiliki sifat belas kasih dan penyayang)
- (8) Prasada (selalu berfikir bersih atau suci)
- (9) Madhurya (selalu senyum, bermuka manis dan tidak cemberut terhadap orang lain) dan
- (10) Mardawa (lembut hati, tingkah laku selalu baik, pikiran, perkataan dan perbuatan)

Disamping itu pengalaman secara efektif untuk diri sendiri, juga dalam sarasamuscaya sloka 260, mengajarkan ajaran yang harus diamalkan demi kebahagiaan orang lain disebut " dasa Yama Brata" (10 macam pengamalan ekstern yang dilandasi etika moral Hindu) yaitu

- (1) Melakukan Dana yaitu sedekah atau darma dan pada waktu waktu tertentu, menurut situasi, kondisi dan keadaan ;
- (2) Melakukan Ijya, atau selalu melakukan sembahyang (Tri sandya)
- (3) Melakukan Tapa Brata, pengendalian hawa nafsu dan pengendalian pikiran;
- (4) Melakukan Dhyana atau Semadi Yoga setiap hari;
- (5) Melakukan Swadhyaya atau berusaha belajar sendiri, membiasakan hidup mandiri, serta selalu membaca kitab suci Weda, atau kita suci Smerti lainnya;
- (6) Melakukan Upathanigraha yaitu pengendalian sex atau birahi seperti tidak melakukan hubungan kelamin dengan istri atau suami pada hari yang di tabukan seperti purnama dan tilem, serta hari-hari suci lainnya menurut ketentuan hukum agama;

- (7) Melakukan Brata atau pengendalian diri setiap saat;
- (8) Melakukan Upawasa yaitu puasa pada hari-hari tertentu;
- (9) Mono Brata, mengendalikan kata-kata dan
- (10) Melakukan Snana atau selalu mewujudkan kehidupan dalam suasana kepercayaan, kesucian.

Dua puluh (20) macam perilaku norma agama tersebut, pada kenyataannya menjadi nilai primadona dalam masyarakat Bali dalam upaya mewujudkan kualitas diri pribadi maupun interaksi dengan orang lain, sehingga nampak wujud karakter masyarakat Bali selalu menampilkan kejujuran, kesucian, percaya diri dan toleransi kepada perbedaan-perbedaan yang ada.

Salah satu ajaran menalari, umat Hindu berusaha berbuat baik menurut ajaran agama Hindu, adalah karena pengaruh ajaran Karma Phala atau ajaran tentang hukum karma. Hukum Karma artinya ajaran yang mengajarkan tentang hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Masyarakat Bali pada umumnya telah menyadari bahwa agama Hindu mengajarkan bahwa sesungguhnya nasib kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Karena itu dinyatakan agar kita benar-benar berkarma secara bebas. Bebas maksudnya mengembangkan semaksimal mungkin sumber daya masing - masing pribadi untuk berbuat demi kesejahteraan bersama tanpa memikirkan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, melainkan berapa besar kita dapat menabung perbuatan yang baik (cuba karma) untuk menyempurnakan hakekat hidup kita sebagai manusia. hal ini akan sepaham dengan ucapan kitab suci Bagawadgita. " Karmanyewa adhikarassta, ma phalesu kadachana" artinya tugasmu adalah berkarma saja jangan memikirkan akibatnya " Manusia dalam pandangan Hindu akan dikatakan bijaksana dan berkualitas bila ia mampu menunjukkan kerja yang berlandaskan ketulusan. Semakin banyak orang dapat merealisasikan konsep dasar tersebut hal ini dianggap investasi sosial, didalam hidup bermasyarakat. Tetapi orang yang berkerja hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain hanya ingin menerima upah tanpa memikirkan kualitas kerja serta tidak memiliki keberanian dan tanggung jawab, mereka ini dikatakan orang yang " mengikuti pertapaan kaung" (babi penjantan) pola orang tersebut, bekerja untuk upah dan kesenangan tanpa usah lagi memikirkan

tanggung jawab. Semakin hari permasalahan hidup manusia semakin kompleks, apalagi dengan kehadiran " Teknologi Canggih", mendorong manusia untuk mengarah kepada hidup materialistis dan konsumer, serta menghalalkan cara untuk memperoleh barang-barang mewah dalam waktu yang relatif singkat tanpa melihat kemampuan, yang pada gilirannya menyeret kepada terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial, penyakit masyarakat dan tercabutnya akar-akar budaya warisan leluhur yang adiluhung dan sebagiannya. Untuk permasalahan ini semua responden menyatakan perlu mengintensifkan pembinaan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (diolah dari pendapat responden dalam daftar pertanyaan terbuka). Demikian pula semua responden menyatakan di dalam ajaran agama ada pranata-pranata yang mendukung pembinaan kebudayaan Nasional.

Untuk mendukung uraian tersebut diatas, kami dasari dengan tabel IV.11, sebagai berikut :

TABEL IV.11

No.	Pernnyataan Responden	Prosentase	Keterangan
1.	Usaha mewujudkan toleransi beragama	20,00	
2.	Usaha mewujudkan tata beribadah dan tata berupacara, yang tetap melibatkan, unsur seni, adat dan sekahe	10,00	
3.	dana Punia (pemberian dana Kepada orang miskin, pembangunan tempat ibadah dan db.)	5,00	
4.	Sikap hidup yang selaras dan seimbang, sikap hidup yang berorientasi pada klasifikasi dualistik, sikap hidup berorientasi pada kebenaran, tenggang rasa, tolong menolong (Tat Twan Asi)	60,00	
5.	" Swadamaning Agama" (kewajiban melaksanakan ibadah Agama) dan " Swadharmaning Negara " (kewajiban mengabdikan kepada negara).	15,00	

Sumber : diolah dari pendapat responden

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memandang sebagai nilai primadona apabila dapat mewujudkan sikap hidup yang selaras dan seimbang, sikap hidup yang membedakan makna yang suci mana yang dianggap leteh dan makna yang membedakan mana yang pantas dan tidak pantas dan banyak contoh lainnya, yang menunjukkan klasifikasi dualistik tersebut, demikian juga sikap hidup berorientasi pada kebenaran, tenggang rasa dan tolong menolong yang diwujudkan dalam integrasi sosial karena didorong oleh perasaan keadaan dan kebenaran yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kolektif, yang dalam Agama Hindu disebut " Atmanastuti ".

Konsekwensi beragama (swadhramaning agama), selalu diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga nampak kesehariannya suatu yang religius, yang dpat menjadi situasi kondusif, bagi peningkatan daya selektifitas pengaruh budaya asing yang intensif mempengaruhi masyarakat Bali akibat kemajuan kepariwisataan di Bali, disamping konsepsi ini mendorong tumbuhkembangnya keimanan (Sradha) di dalam masyarakat. Kewajiban mengabdikan kepada pemerintah (swadharmaning Negara), adalah suatu orientasi keagamaan, yang mendorong masyarakat Bali bekerja sesuai dengan kemampuan untuk selalu memberikan hal yang terbaik kepada Pemerintah seperti menjaga lingkungan hidup, ikut menjaga ketertiban, mensukseskan program KB, dan sebagainya

Toleransi beragama, merupakan hal yang dianggap suatu nilai kepatutan, yang menunjukkan keterbukaan, tidak fanatik sempit, sehingga masyarakat Bali melalui toleransi tersebut semakin dapat menghayati eksistensi agama itu sendiri, yaitu orang beragama untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun dengan cara yang berbeda, namun satu tujuan, tidak mempertentangkan perbedaan, justru untuk menemukan kesempurnaan.

Usaha mewujudkan tata beribadah dan tata berupacara, yang tetap melibatkan unsur seni, adat dan sekaa, memberikan dampak yang positif bagi kesenian tradisional untuk selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya, malahan tetap dijaga kesakralannya, Sekaa-sekaa, sebagai lembaga sosial yang mengaktifkan prinsip profesionalan dan kebersamaan ikut memberikan andil dalam suksesnya suatu upacara atau ibadah keagamaan, yang dapat memberikan suasana kegembiraan

dan sebagainya. Masyarakat Bali dalam suasana kebersamaan, tidak canggung - canggung mengeluarkan sedikit uangnya, untuk memberikan Dana Punia (sumbangan sukarela) kepada orang yang tidak mampu, dengan memberikan alat-alat kerja agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dan sumbangan tersebut juga diberikan untuk pembangunan fasilitas desa, perbaikan Pura dan Lain-lain.

Dari ke Lima, pernyataan responden di atas, memang semuanya menjadi pranata dasar dalam agama, khususnya agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali, kalau dilihat dari upaya pembinaan kebudayaan nasional, sangat mengena, karena butir-butir pranata agama tersebut sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD. 1945.

4.5.2. Personal

Pranata agama dioperasionalkan melalui tokoh-tokoh masyarakat, seperti klian Adat (Kepala Adat), Klian Banjar (Pimpinan Banjar), ketua Sekaa dan tokoh - tokoh lainnya yang wajib memberi contoh serta bimbingan kepada masyarakat, melalui aktifitas keagamaan, dan mereka didudukkan sebagai " Manggalaning Yadnya " (pimpinan Upacara), untuk mengajarkan masalah teknis upacara. Sedangkan orang yang : "Muput " (tokoh yang melegalisasi upacara) yaitu " Peranda " (Pendeta). Orang tua dimasing-masing keluarga, cukup penting peranannya dalam pembinaan keagamaan generasi muda, yang nantinya setelah terjun di masyarakat, anak - anaknya tersebut dapat menunjukkan perilaku keagamaan, seperti " Ngayah " (mengabdikan) di Pura, memperhatikan kebersihan pura dan sebagainya.

Disamping tokoh di atas, ada tokoh-tokoh personal lainnya, yang mempunyai keahlian dalam kaitan dengan : Pembangunan Rumah Adat, (Asta Kosala Kosali), dibutuhkan tenaga seorang " Undagi ", dalam kaitan upacara " Potong Gigi" (mepedes) diperlukan seorang " Sangging " untuk keperluan melayani Umat Ngaturang Bhakti (sembahyang) di pura diperlukan jasa seorang " Pemangku " (pinandita), dan tidak kalah pentingnya jasa seorang " Nabe " (angacarya), dalam kaitannya melantik seorang yang dijadikan pendeta (peranda)

Demikian beberapa tokoh-tokoh penting dalam masyarakat Hindu di Bali, dalam integrasi sosialnya, mereka memberlakukan seperangkat pranata Agama, sehingga dapat dijamin keajegan budaya Agama, sebagai kultuur agama Hindu.

4.5.3. Peralatan Fisik.

Pranata-pranata keagamaan, biasanya tersosialisasi dalam berbagai macam kesempatan, seperti dalam melaksanakan upacara, dalam merundingkan / merencanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam mendalami ajaran agama, menunjukkan paling menonjol adalah Tempat Ibadah (Pura), yaitu dari Pura Keluarga (yang ada dimasing-masing rumah tangga orang Hindu) Pura Swagina yaitu Pura Subak (mengayomi pertanian), kawitan (yang mengayomi keluarga besar, sampai dengan Pura dang Kahyangan (mengayomi seluruh ,masyarakat umum). Untuk tempat musyawarah dalam merencanakan kegiatan - kegiatan keagamaan diperlukan " Banjar " atau Balai Masyarakat (Wantilan). Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan alat-alat kesenian dibuatkan atau diperlukan " Balai " (gudang), yaitu seperti Balai Gong, tempat menyimpan gamelan serta perangkat lainnya, Balai Pretima Untuk menyimpan pretima-pretima agar tidak diincar maling, dan banyak lagi nilai-nilai lainnya dalam fungsi yang sama.

Pada akhir-akhir ini milyaran dana swadaya masyarakat Bali, sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan pura, Balai Wantilan (Balai masyarakat), Balai Desa (tempat perumahan Desa), dan tidak kalah menonjolnya, adalah perbaikan jalan yang menuju pura untuk kelancaran transportasi, sebab sekarang ini sudah banyak umat ke pura dengan ,menggunakan kendaraan roda empat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan akan pranata-pranata agama dapat dijadikan sebagai wahana upaya pembinaan kebudayaan nasional, bila didukung oleh personal-personal yang berwawasan keagamaan yang mantap, fasilitas-fasilitas yang memadai.

BAB V ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Analisis

Analisis yang dikemukakan berikut ini, diarahkan untuk memecahkan persoalan tentang " Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional". Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional dan seberapa jauh peranan pendidikan-pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional, dalam lima pranata : (1) Pranata Sekolah; (2) dalam Pranata keluarga; (3) dalam Pranata Ekonomi, (4) dalam Pranata Politik dan (5) dalam Pranata Keagamaan.

Di kalangan ahli-ahli, pakar sosial budaya mempunyai suatu pandangan yang serasi untuk memahami pendidikan dan kebudayaan. Pada hakekatnya eksistensinya pendidikan dan kebudayaan saling berkaitan satu sama lain, dimana kebudayaan merupakan bagian dari pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, pendidikan sebagai wahana untuk meneruskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kerangka teori yang relevan dalam analisis ini, dipakai untuk memahami dan menjelaskan tentang, peranan pendidikan dalam kebudayaan nasional adalah : teori tentang pranata adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan, dirinci menurut fungsi-fungsi yang khas, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat. Suatu sistem aktivitas jelas dari dari kelakuan berpola beserta komponen-komponen ialah :

- (1) Sistem norma dan
- (2) Tata kelakuannya dan peralatan / sebagai wujud ketiga kebudayaan ditambah lagi dengan manusia atau
- (3) Personal yang melaksanakan kelakuan berpola tersebut. Kerangka berpikir di atas, digunakan untuk menganalisis peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional pada kelima peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional pada kelima pranata yang menjadi fokus bahasan.

Berkaitan dengan pendapat di atas, yang masih relevan untuk digunakan menganalisis : peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional adalah 3 komponen yang saling terkait seperti :

- (1) Komponen kognitif atau dalam sistem pengetahuan manusia yang lokasi kepala manusia. Inipun kalau ditinjau dari pranata maupun wujud kebudayaan ; kognitif ini bisa disejajarkan dengan sistem norma maupun wujud ideal kebudayaan.
- (2) Komponen dalam komponen efektif atau sudahkah suatu dihayati dalam sikap seseorang dan
- (3) Penanaman dalam pshykomotor, setelah dihayati dalam komponen efektif, akan tampak prilaku yang nyata yang terlihat dalam pshykomotor.

Dalam istilah pendidikan ketiga hal di atas seperti, kognitif, efektif dan pshykomotorik bila digunakan untuk menganalisa setiap adanya evaluasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Apakah suatu pengetahuan yang diberikan telah terenkulturisasi dalam pengetahuan anak didik, dihayati dalam sikap dan telah dijadikan pola bagi prilaku siswa. Saya kira kerangka pikir ini sangat relevan untuk menganalisis " Persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional telah diketahui sebagai salah satu pengetahuan budaya, apakah nilai-nilai budaya tersebut telah dihayati oleh masyarakat serta, apakah penhayatan tersebut dapat menata prilaku dari masyarakat.

Kerangka tersebut diatas, telah menjadi kerangka acuan dalam pembahasan diatas. Disamping itu pula dicoba menganalisis dengan menggunakan teori atau kerangka berpikir tentang sistem nilai budaya yang menata sikap dan prilaku atau tingkah laku manusia. Seperti telah dijelaskan oleh pakar antropologi Prof. DR. Koentjaraningrat dalam bukunya ; Rintangan Mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa; sistem nilai budaya yang mengandung norma dan pola-pola cara berpikir dapat berfungsi sebagai pedoman kelakuan dan menata kelakuan manusia maupun masyarakat. Kerangka berpikir untuk dibuat suatu Bagan I di halaman berikut ini.

BAGAN V.I.
SISTEM NILAI BUDAYA MENATA SIKAP DAN
TINDAKAN MASNUSIA



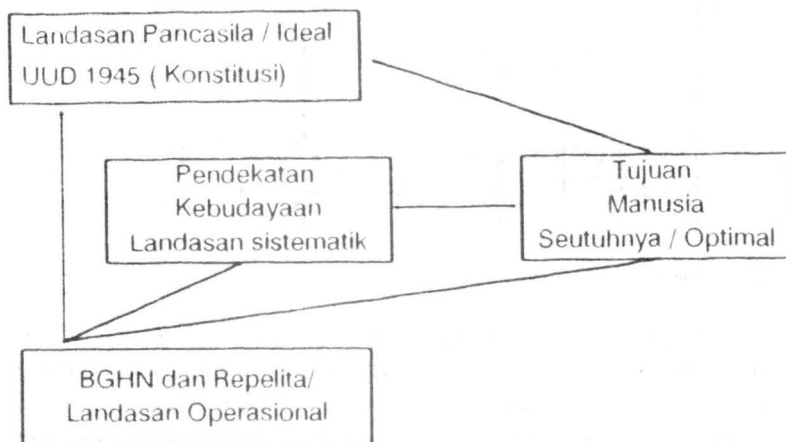
Sumber : Dari Buku Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Koentjaraningrat : 1969 : 21)

Kerangka berpikir di atas pada hakekatnya telah tercakup dalam kerangka pikir pranata, dimana sistem norma dapat didefinisikan sebagai pola acuan dari komponen person dan komponen peralatan yang terkait dalam pranata tersebut.

Disamping itu pula dalam teori antropologi akan digunakan secara terpadu, dalam analisa ini adalah teori fungsional atau fincional teori of culture (Malmowsky, 1994) yang menggambarkan bahwa adanya suatu hubungan terkait secara fungsional antara satu unsur kebudayaan dengan unsur kebudayaan yang lainnya atau hubungan terkait dengan satu sistem dengan lingkungannya. Kerangka berpikir (teori di atas digunakan pula untuk menganalisis atau menggambarkan keterkaitan secara fungsional antar satu komponen (komponen norma) dengan komponen person maupun komponen peralatan dalam kelima pranata, Pranata keluarga, pranata sekolah, pranata agama, pranata ekonomi, pranata politik yang menjadi fokus bahasan dalam bab di atas. Disamping kerangka di atas, dicoba pula pembahasan khusus pada pranata sekolah

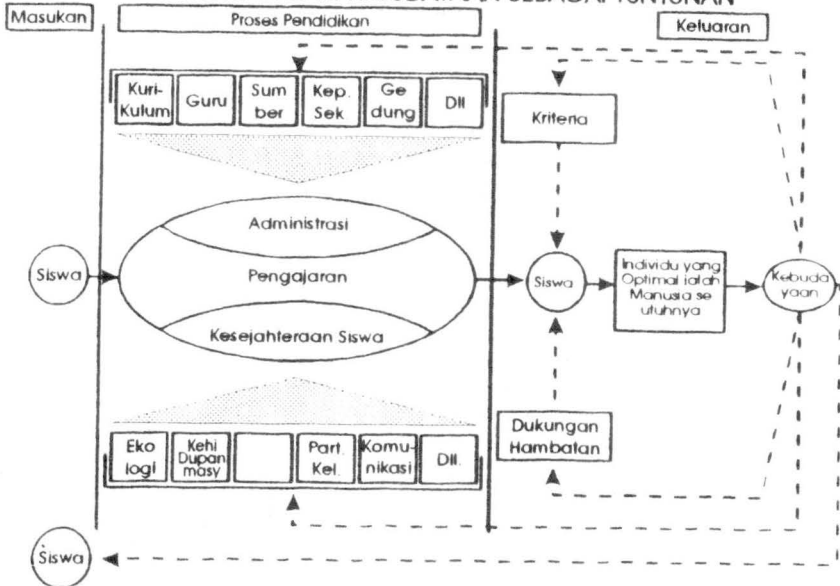
dipakai adanya saling keterkaitan antar unsur sistematis dalam pendidikan oleh Bapak Darmo Diharjo dalam sebuah artikel yang berjudul Peranan Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. (Analisis Pendidikan : 1982/1983 Nomer 4) kerangka berpikir seperti pada bagan V2. di bawah ini.

BAGAN V.2.
PENDEKATAN KEBUDAYAAN SEBAGAI
LANDASAN SISTEMATIK.



Kerangka berpikir di atas akan dapat memberikan kita gambaran bahwa sistem norma yang digunakan kerangka acuan untuk menyelenggarakan sekolah digerakkan oleh personal guru, tenaga administrasi maupun perlengkapan lainnya dalam rangka, perkembangan secara optimal, manusia seutuhnya adalah landasan-landasan tersebut bisa kita rangkum dalam sistem norma yang membakukan nilai, norma aturan yang secara operasional tertuang pada GBHN dan secara operasional terjabar dalam kurikulum sekolah baik ditingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi. Akan dibuat satu bagan tentang unsur sistematis dalam Pendidikan.

BAGAN V.3.
LANDASAN SISTEMATIKA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI TUNTUNAN



Bagan di atas dapat digunakan untuk bahan analisis tentang unsur sistematis dalam pendidikan yang akan diolah siswa sebagai individu, yang out put (keluaran) akan dapat menciptakan individu yang utuh dengan tuntunan Kebudayaan (nilai-nilai luhur budaya bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang utuh, dan mampu membangun pribadinya sendiri). Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan keutuhan pribadi yang selaras, serasi dan seimbang. Disinilah peranan kebudayaan sangat penting dan potensial dalam pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. dari kerangka berfikir di atas seperti : kerangka berpikir (teori) tentang pranata, teori fungsional dari Malmowsky, teori nilai budaya menata sikap perilaku (Koentjaraningrat), teori tentang unsur sistematis Pendidikan dan Landasan Sistematis ditinjau dari pendekatan Budaya, Darji Darmodiharjo, 1982/1983;35) akan digunakan untuk menganalisis peranan pendidikan dalam pembinaan Kebudayaan Nasional, dalam menata :

- (1) Pranta Keluarga.
- (2) Pranata Sekolah.
- (3) Pranata Politik.
- (4) Pranata Ekonomi dan
- (5) Pranata Keagamaan di Daerah Bali.

Analisis berturut-turut akan diuraikan dalam berikut ini :

Secara konsepsi seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan yang merupakan konsep gabungan dari beberapa konsepsi formal dan pakar kebudayaan di atas tentang kebudayaan nasional, secara kognitif belum dapat dipahami, melalui pendidikan budaya di lingkungan keluarga di Bali.

- 1) Selanjutnya akan dianalisis peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan melalui jalur pranata sekolah seperti telah diuraikan, pranata sekolah mencakup komponen sistem norma, sistem norma pada pranata sekolah mencakup nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam bahasa yang berlaku di sekolah tersebut yang menjadi pola tatanan bagi pelaksanaan sekolah. Sistem norma tersebut terbaku pula dalam dalam kurikulum dari semua jenjang baik tingkat Sd, SMTP, SMTA dan Perguruan Tinggi. Analisis ini secara fungsional terkait satu sama lain antara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen norma akan menata segala aspek yang terkait dalam komponen dalam pranata sekolah lainnya, seperti sistem norma akan menata personal seperti guru yang statusnya sebagai pendidikan, pegawai sekolah maupun orang tua murid yang terkait dalam pembinaan sekolah. Proses ini harus serta taat pada nilai, norma, aturan yang berlaku di sekolah tersebut.

Keterkaitan secara fungsional masing-masing komponen tersebut di atas, akan dapat memberikan gambaran seberapa jauh peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional.

Peranan pendidikan pada hakekatnya mempunyai potensi yang cukup besar karena sekolah pendidikan mempunyai komponen sistem norma yang lengkap, mempunyai person sebagai

penkelola pendidikan lengkap dan teratur, dengan ditunjang oleh sarana dan prasaran lengkap dan teratur pula. Seperti telah di jelaskan di atas oleh pakar pendidikan oleh Bapak Darji Dar-modiharjo, untuk mencapai / terwujudnya tujuan pendidikan manusia yang seutuhnya dari pendekatan kebudayaan yang digunakan sebagai landasan sitematik. Kebudayaan landasan sitematik dalam menumbuhkembangkan potensi manusia, pendidikan tidak melepaskan diri dari kebudayaan lingkungan hidup. Kebudayaan dalam arti luas adalah wujud antara logika (pikiran), etika (kemauan), estetika (perasaan) dan praktika (karya), yang merupakan sistem

- 2 Analisis peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata keluarga. Pranata keluarga mempunyai sistem norma, nilai-nilai dan aturan, hukum yang menjadi pola bagi kehidupan keluarga tersebut, didalam pranata inilah pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa, yang menjadi latar belakang kehidupan keluarga tersebut. Di dalam keluarga berlangsung pendidikan budaya, melalui proses belajar secara sosialisasi dan secara enkulturisasi. Pesan-pesan anggota keluarga baik yang berperan sebagai ayah, ibu, kakak, nenek, selalu berinteraksi dan anak cucu mereka secara terus menerus. Didalam interaksi inilah terjadi terjadi proses yang tanpa sengaja terjadi penerusan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Peranan ini berlangsung secara praktis, tanpa ada pengajaran secara teratur seperti disekolah. Contoh menanamkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadat, dengan cara mengajak anak-anak mereka membuat sesajen, mengajak sembahyang dan lain-lain atau contoh lain ; menanamkan agar sebelum makan menghaturkan sesajen, Yadnya Sesa (sesajen yang terdiri dari nasi dan lauk yang sering dibuat pada hari itu) dengan tujuan agar anak mereka diterima, selalu eling menghaturkan terima kasih atas berkat Ida Hyang Prama Kawi (Tuhan Yang Maha esa), Sehingga hari itu mereka dapat menikmati nasi/lauk pauk. Ilustrasi seperti ini telah banyak diuraikan pada bab pembahsan di atas.

Disi lain penanaman konsespsi tentang kebudayaan nasional secara atau penanaman pengetahuan kebudayaan, masih belum

mantap, namun secara efektif pshykomotor, telah berkembang secara turun temurun tanpa disadari pada kehidupan keluarga Bali, agama dan kebudayaan secara utuh dan merupakan kebulatan menjadi kerangka acuan, atau menjadi pola tatanan keluarga di Bali pada umumnya.

Hal tersebut pada hakekatnya disebabkan oleh kebudayaan Bali yang merupakan sub bagian kebudayaan nasional yang bernafaskan agama Hindu yang diyakini oleh keluarga Bali. Peranan pendidikan melalui jalur pranata pada keluarga di Bali, dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional yang mempunyai potensi yang cukup besar. Walaupun masih adanya kendala yang dihadapi dalam memantapkan peranan pendidikan melalui jalur keluarga, namun hal tersebut dapat diatasi, nilai dari ide vital (gagasan) yang dihayati oleh manusia. Dengan demikian pendidikan untuk mencapai manusia seutuhnya, harus menggunakan pendekatan kebudayaan, melalui interaksi terhadap bidang logika, etika, estetika dan praktika yang didasari oleh sistem yang berlaku dengan gagasan penting yang menonjol dalam masyarakat. Sehingga sistem nilai adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 serta GBHN sebagai landasan operasionalnya. Kemudian dalam Bagan.

Kebudayaan menentukan kriteria tentang wujud perkembangan apabila keseluruhan komponen tersebut yang sangat potensial untuk pembinaan kebudayaan, niscaya tujuan akhir pendidikan dan pembangunan Indonesia adalah manusia seutuhnya, manusia tersebut mampu membangun kepribadiannya sendiri. Dengan uraian tersebut di atas secara normatif, kebudayaan memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan yang berarti peningkatan modal manusiawi untuk keberhasilan pembangunan masa kini dan yang akan datang.

Sekarang senyatanya apakah yang dapat kita lihat. Berdasarkan hasil penelitian questioner (penelitian) peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan masih perlu ditingkatkan. Inipun disebabkan oleh adanya persepsi terhadap kebudayaan nasional oleh person-person terkait dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan. Disisi lain masih adanya mata pelajaran, mata kuliah di SMTA

khususnya nilai tak termasuk menentukan kelulusan anak didik. Secara normatif kebudayaan telah diberikan bobot dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Seperti telah di nyatakan dalam UUD 1945, GBHN menyatakan pembangunan yang berkebudayaan dan perlu dicanangkan pula disekolah sebagai pusat kebudayaan (Mantan Mendikbud RI, Daud Yoesuf)

Namun senyatanya program-program terpadu antara pendidikan dan kebudayaan khusus, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, yang berarti peningkatan kualitas manusia secara fisik dan non fisik, masih belum mantap. Mudah-mudahanlah pada PJP II mendatang, dimana kebudayaan dapat bobot prioritas, khusus di Bali, karena kebudayaan strategi dasar agar dapat mewarnai seluruh aspek pembangunan, khusus pembangunan. pendidikan

3. Analisis tentang peranan pendidikan dan pembinaan kebudayaan nasional memalui jalur pranata ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Pranata ekonomi mempunyai pula tiga komponen seperti komponen sistem norma, yang tercakup dalam nilai, norma, aturan-aturan yang digunakan pola acuan untuk pembinaan dan pengembangan koperasi. Komponen kedua, koperasi mempunyai person atau orang yang mengurus maupun mengelola koperasi tersebut sedangkan komponen ketiga adalah perlengkapan atau sarana sebagai alat penunjang ditambah lagi seperangkat secara teknis administrasi untuk pengelola tersebut.

Pada analisis ini akan dilihat seberapa jauh peranan ekonomi sebagai jalur pendidikan luar sekolah dapat membina kebudayaan nasional, berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, dalam pranata ekonomi yang sasaran penelitian pada pasar, koperasi, KUD, Puskud, dan lain-lain. Seperti telah dijelaskan diatas, koperasi, pasar, maupun puskud dan semuanya itu mempunyai sistem norma (nilai-nilai, norma dan aturan untuk mengelola lembaga tersebut). Kerangka teori tindakan membenarkan hal tersebut, dimana sistem nilai menata sikap dan prilaku dari person yang bekerja pada lembaga di atas. Disisi lain , sekarang secara normatif kita analisis yang terkait dalam ayat 33 1 UUD 1945 menegaskan bahwa " Perekonomian disusun berdasar atas azas keleuargaan". Didalam pernyataan tersebut yang diutamakan

perusahaan yang berdasarkan prinsip timbal balik/receiprocity oleh nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang disebut dengan koperasi. Keanggotaan koperasi tersebut secara normatif diharapkan harus mempunyai, rasa kebersamaan, mempunyai jiwa koperasi, berwatak sosial dan mempunyai kesadaran tentang keorganisasian, kerja keras, jiwa gotong royong yang tinggi. Peranan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian di Indonesia mempunyai pula potensi untuk pembinaan kebudayaan nasional. Berdasarkan hasil penelitian adalah, secara kognitif persepsi manusia sebagai pengelola koperasi masih terbatas pengetahuan mereka tentang konsep kebudayaan nasional, isi maupun unsur-unsur yang tercakup dalam kebudayaan nasional. Namun secara tidak disadari secara normatif landasan koperasi ataupun landasan perekonomian Indonesia adalah berlandaskan Pancasila, pada hakekatnya landasan tersebut membakukan seperangkat nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti beberapa nilai luhur budaya tersebut seperti nilai gotong royong, nilai kerja keras, nilai kebersamaan yang tinggi, nilai sosial, nilai demokratis / musyawarah mufakat. Semua nilai-nilai tersebut secara efektif, seyogyanya harus dihayati oleh seluruh anggota koperasi tersebut dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan koperasi maupun perekonomian dalam arti luas.

Hambatan yang sering merupakan kurang lancarnya pembinaan kebudayaan tersebut, karena persepsi anggota koperasi, pasar, KUD masih terbatas pada kebudayaan nasional, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif namun secara efektif yang pshykomotor nampaknya mulai adanya perkembangan mengarah kemajuan. Khusus di Bali anggota koperasi pedagang, Puskud yang juga sebagai masyarakat Bali, secara tidak langsung telah ditanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui jalu-jalur keluarga, melalui jalur kehidupan dan banjanya dan lain-lain.

4. Peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan melalui jalur pranata, politik seperti telah dijelaskan bahwa pranata politik sama dengan pranata lainnya mempunyai sistem norma yang merupakan fungsi menata person sebagai pelaksana / pengendali jalan politik di Bali. Berdasarkan hasil penelitian yang

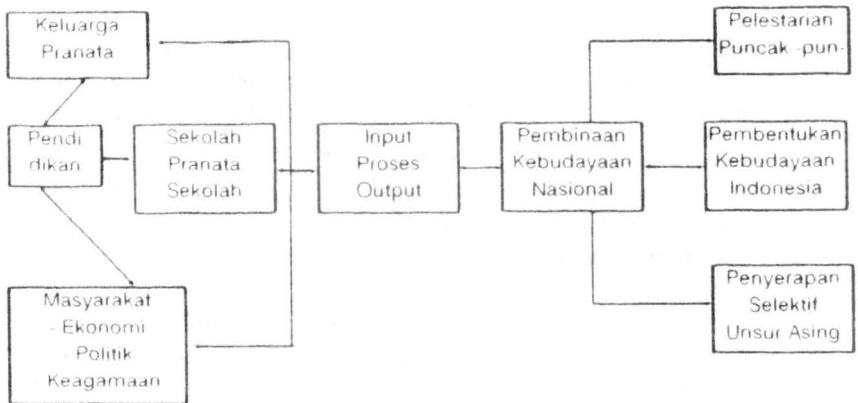
respondennya hampir pelaksanaan pemerintah yang termasuk pula dalam cakupan pelaksanaan politik pemerintah di Indonesia adalah secara kognitif sebagai suatu pengetahuan kebudayaan nasional masih perlu ditingkatkan. Karena sebagaimana jawaban maka kebudayaan nasional hanya mencakup kesenian dan ada pula yang menyebutkan hanya bahasa saja. Namun secara efektif, sudah sebagian besar menjadi pengkayatan mereka. Demikian pula pada psikomotor telah menampakkan hal positif. Lebih - lebih dalam hal menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ter-baku dalam nilai pertama Pancasila, nilai kedua dan nilai keempat dari nilai tersebut. nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang mengkrystal pada Pancasila telah menjadi landasan pengembangan pranata politik di Indonesia. Dengan demikian melalui paranata politik punya potensi dalam pembinaan kebudayaan nasional. Kerangka pranata msing-masing komponenpun menampakkan ada pembatasan antara satu lembaga politik dengan lembaga politik lain masih terpisah. Inilah yang pula menjadi kendala.

5. Peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan nasioanal memalui jalur pranata keagamaan. Pranata keagamaan di Bali yang juga memiliki komponen sistem norma / nilai luhur, nilai aturan dan aturan hukum. Keterkaitan secara fungsional antar satu komponen lain cukup mantap. Pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata keagamaan di Bali cukup mantap dan sangat potensial. Hal ini disebabkan oleh adanya masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, dalam sehari-harinya agama dan kebudayaan merupakan satu jalinan yang menjadi kerangka acuan kehidupan mereka.

Penanaman unsur budaya yang paling dominan melalui pranata keagamaan di Bali adalah unsur religi, unsur kesenian, unsur - unsur yang lain seperti : unsur teknologi tradisional yang bergabung dengan unsur pengetahuan. Sekarang mulai menampakkan kemajuan terutama yang berkaitan dengan unsur mata pencaharian hidup. Seperti dalam kehidupan masyarakat Bali yang tersentuh oleh perkembangan pariwisata, tampak pesat perkembangan pada industri kerajinan baik perak, barang antik, komputer.

Perkembangan cukup maju. Hal ini manampakkan adanya perkembangan kesejahteraan hidup masyarakat Bali sangat religius. Pembinaan kebudayaan yang pada hakekatnya yang punya tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan manusia lahir dan batin secara bertahap menampakkan hal yang positif. Maka dari itu potensi kebudayaan dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional cukup mantap. Kalau dianalisis pembinaan tersebut dalam tiga komponen, pada komponen kognitif secara konsepsi yang tertuang dalam pasal 32 UUD 1945, konsepsi kebudayaan yang diasuh pada pendapat Koentjaraningrat, Daud Yusuf, Haryati Sobadyo msih perlu dienkulturisasi dan disosialisasikan. Namun secara efektif dan Pshikomotorik nilai luhur budaya tersebut telah menjadi pedoman hidup masyarakat Bali. Gabungan dari kerangka berpikir yang digunakan sebagai kerangka analisis, dapat disimpulkan dengan melihat jalur proses sosialisasi atau enkulturisasi, peranan pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan tertera pada bagan dibawah ini.

Bagan V.5.
 Jalur-jalur proses Enkulturisasi dan sosialisasi Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional.



5.2. KESIMPULAN

Hasil Pembahasan dan analisis di atas tentang peranan pendidikan dalam rangka pembinaan Kebudayaan Nasional, melalui jalur, pranata sekolah, pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik serta pranata keagamaan dan bagaimana persepsi masyarakat tentang kebudayaan nasional terurai di bawah ini. Seperti telah pula di bahas bab-bab di atas, tolok ukur yang digunakan dalam konsepsi kebudayaan nasional adalah gabungan dari beberapa pendapat rumusan formal tentang kebudayaan nasional yang terdapat dalam UUD tahun 1945 pasal 32.

Komponen kebudayaan nasional mencakup unsur : kebudayaan asli, kebudayaan Indonesia baru kebudayaan asing diterima secara selektif, untuk kemajuan abad. Hasil pembahasan serta analisis di atas merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Persepsi masyarakat tentang Kebudayaan Nasional masih jauh dengan rumusan di atas dalam arti secara merentang tidak ada kejelasan persepsi. Kebudayaan diartikan sangat sempit hanya kesenian saja. Hanya dikalangan kaum intelektual tertentu saja, persepsi tentang kebudayaan nasional sudah mulai berkembang kearah kemajuan dan sudah mulai pada dikalangan intelektual mengharga peranan kebudayaan dalam pembentukan manusia seutuhnya dengan memantapkan pembangunan berbudaya. Terbukti orang dalam membahas pembangunan , memberikan bobot budaya, walaupun bobot dalam peluang tersebut perlu ditingkatkan.
- 2) Mengenai fungsi kebudayaan nasional terfokus dalam pemberi identitas dan pembentukan solidaritas, penelitian ini menemukan bahwa telah timbulnya persepsi yang positif akan fungsi seperti itu.
- 3) Mengenai pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam kenyataan menunjukkan bahwa, bagi masyarakat sangat penting kebudayaan nasional dibina untuk masa kini dan masa yang akan datang, karena nilai penting dan strategis, bagi pembinaan jati diri serta kepribadian bangsa Indonesia, untuk pembinaan kebudayaan bagi generasi muda di daerah Bali. Disisi lain tampaknya apresiasi generasi muda terhadap budaya daerah Bali, cukup mantap

- 4 Pendidikan merupakan proses penerusan baik melalui jalur warga masyarakat, sekolah tetap diharapkan berperan bagi pembinaan kebudayaan nasional. Dalam kenyataannya secara operasional masih ditemukan kendala sebagai berikut. Di daerah Bali peranan pendidikan dalam rangka pembinaan kebudayaan melalui jalur keluarga kendala utamanya adalah Pengetahuan secara kognitif kebudayaan nasional kurang dipahami. Khusus keluarga di Bali secara efektif dan psikomotorik telah merupakan acuan hidup, pedoman hidup sehari-hari. Pembinaan Kebudayaan melalui jalur masyarakat khusus di Bali, secara kognitif tentang persepsi kebudayaan nasional, kurang sistematis namun dalam sikap dan psikomotorik sudah merupakan acuan bagi kehidupan mereka. Pada unsur kebudayaan tertentu merupakan kebanggaan secara internal bagi masyarakat / orang Bali sedangkan secara eksternal, kebudayaan daerah Bali sebagai sub bagian kebudayaan nasional telah diakui keunggulannya oleh dunia internasional.
- 5) Peranan pendidikan terhadap pembinaan kebudayaan nasional pada hakekatnya secara global mendukung pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. secara rinci dukungan tersebut dalam kelima pranata yang diteliti hasilnya sebagai berikut:

5.1 Peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata sekolah.

Pada hakekatnya cukup tinggi baik pada jenjang SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian sekolah memiliki potensi cukup tinggi dalam pembinaan kebudayaan nasional, namun dalam aktualisasi potensi tersebut, masih dihambat oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut : (1) Adanya persepsi yang terbatas tentang pendidikan merupakan suatu proses penerusan nilai luhur budaya bangsa. Hal ini pun berarti bahwa secara kognitif dengan acuan konsepsi kebudayaan nasional, isi dan fungsi kebudayaan nasional terurai di atas, masih adanya keterbatasan dalam pemahaman. Keterbatasan tersebut, nampak person yang berkaitan dengan pengelola pendidikan dan program kebudayaan dalam mendukung pembinaan

kebudayaan nasional pada khususnya. Pada hakekatnya pendidikan dan dan kebudayaan dalam tujuan akhirnya bermuara pada pembinaan dan pengembangan individu yang optimal yakni manusia seutuhnya yang mampu membangun pribadinya secara selaras, seimbang, serasi lahir dan bathin. Bahkan pakar pendidikan kualitas sumber daya manusia, tidak bisa lepas dari peranan kebudayaan dalam arti yang luas, mencakup perpaduan antar; logika (pikiran), etika, estetika dan praktika. Hal tersebut dianggap sebagai sistem nilai /ideital (gagasan penting) yang dihayati oleh manusia. Dengan demikian pendidikan untuk mencapai manusia seutuhnya, haruslah dilaksanakan menggunakan pendidikan budaya.

Disamping itu pula, diasumsikan masih adanya suatu pelecehan dari siswa terhadap mata pelajaran yang langsung maupun tak langsung berkaitan dengan pembinaan kebudayaan daerah / nasional. Hal tersebut di sinyalir masih adanya mata pelajaran, berada di luar jalur masa uji memperoleh nilai EBTANAS MURNI (NEM) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- 5.2. Peranan Pendidikan melalui pranata keluarga dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional.

Khusus di Bali menampakkan adanya, keluarga memiliki potensi yang cukup besar dan penting namun secara kognitif tentang konsepsi kebudayaan nasional hanyalah kesenian saja. Secara efektif dan pshykomotor, kebudayaan yang menyatu dengan agama Hindu yang mereka anut dan kepercayaan mereka telah dihayati dan menjadi pedoman hidup keluarga-keluarga di daerah Bali.

- 5.3. Peranan Pendidikan dalam pembinaan Kebudayaan Nasional dalam Pranata Ekonomi.

Pranata ekonomi seperti telah dijelaskan di atas secara normatif. Pengetahuan dan nilai-nilai luhur budaya sebagai penyebaran dari pasal 33 ayat(UUD 1945, yang menyatakan " Perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan")

mempunyai pula untuk hal tersebut. Namun potensi disini lebih terbatas dari pranata keluarga, sekolah.

Namun dalam kenyatannya baik secara efektif maupun pshykomotor masih terbatas untuk dihayati serta masih adanya keterbatasan sebagai acuan mereka dalam mengarahkan / mengelola perekonomian tersebut sehingga potensi di atas dalam kebudayaan nasional secara terus menerus dengan terpadu melauli jalur pranata ekonomi hingga kendala dapat diatasi.

5.4. Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional dalam Jalur Pranata Politik.

Pranata politik yang mempunyai komponen sistem norma / nilai, aturan-aturan hukum / yang berfungsi menata person maupun lembaga yang terkait dengan politik. Dalam kenyataannya, pranata politik dalam pembinaan kebudayaan nasional belum mantap namun demikian mulai tumbuh kesadaran, bahwa persepsi yang kuat, bahwa kebudayaan nasional berperan untuk intergarasi bangsa. Secara konsepsi berbagai program kebijaksanaan belum tersosialisasi secara mantap melalui pranata politik. Sehingga aktualisasi pembinaan kebudayaan nasional melalui pranata politik belum efektif.

5.5. Peranan Pendidikan dalam Rangka Pembinaan Kebudayaan Nasional melalui pranata Keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pranata keagamaan dalam pembinaan kebudayaan nasional khusus untuk masyarakat Bali cukup potensial. Hal ini disebabkan karena menyatukan kehidupan keagamaan serta kehidupan kebudayaan di Bali. Kebudayaan Bali bersumber pada agama Hindu yang menjadi keyakinan masyarakat Bali. Kendala adalah masih terbatasnya pula pengetahuan tentang konsep kebudayaan nasional dikalangan person / individu yang terlibat dalam agama. Baik individu tersebut berstatus sebagai tokoh, guru agama dan lain-lain.

5.3. SARAN

Berdasarkan kesimpulannya di atas, masih tampak adanya hambatan yang harus diatasi dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional dalam berbagai jalur pranata keluarga, pranata sekolah, melalui pranata ekonomi, pranata politik, serta pranata keagamaan. Cara mengatasi hambatan di atas kami akan menuangkan beberapa saran pada uraian berikut ini :

- 1). Agar persepsi masyarakat tentang kebudayaan semakin mantap, perlu adanya sosialisasi dan informasi tentang kebudayaan nasional, lebih meluas, terpadu dalam berbagai pranata secara terarah dan sistematis. Dalam kaitan tersebut di atas berbagai jalur yang efektif dapat digunakan adalah melalui jalur pranata sekolah, ekonomi, kesehatan, pranata politik, pranata keagamaan dengan mencakup berbagai lembaga tradisional dan lembaga formal yang ada di daerah Bali.

- 2) Menyadari bahwa kebudayaan nasional penting dalam rangka pembentukan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Maka strategi kebudayaan dan program kebudayaan hendaknya tercakup dalam kerangka global manusia seutuhnya.

Disamping secara filosofis pembangunan yang berbudaya, makin diwujudkan sesuai dengan amanat GBHN. maka disarankan pula, lebih nyata, langkah - langkah pembinaan kualitas sumber daya manusia melalui, keagamaan atau pada aspek kehidupan. Hal tersebut berarti, agar kebudayaan yang menjadi landasan dasarnya atau sebagai landasan sistematisnya.

Lintas sektoral lainnya, secara mantap perlu di kembangkan secara riil agar kualitas pembinaan kebudayaan mendapat bobot prioritas.

- 3). Agar pendidikan, berperan makin efektif bagi pembinaan kebudayaan nasional disarankan agar disatukan pihak potensi-potensi pendidikan sangat dioptimalkan dan dipihak yang lain kendala harus diminimalisasikan. Upaya optimalisasi potensi pendidikan bagi pembinaan kebudayaan nasional adalah :

- (1) Agar bobot pendidikan humaniora, pendidikan budaya lebih ditingkatkan serta dimantapkan.

- (2) Kualitas / kuantitas pendidikan humaniora di semua jenjang pendidikan dimantapkan;
 - (3) Kualitas materi dan menyeluruh yang menyangkut unsur budaya daerah yang bernilai tinggi serta mental menjadi budaya daerah nasional yang bernilai tinggi serta menjadi kebanggaan bangsa, maupun masyarakat perlu ditingkatkan / dimantapkan.
 - (4) Proses belajar mengajar serta kualitas Guru perlu ditingkatkan.
 - (5) Wujud konkrit untuk hal tersebut di atas perlu di adakan pemantapan kebudayaan pada semua guru - guru baik ditingkat SD, SMTP, SMTA, maupun di Perguruan Tinggi serta jangan lainnya perlu adanya pemantapan program terpadu dalam rangka koordinasi dengan bidang yang menangani pendidikan dengan bidang kebudayaan baik pusat maupun ditingkat regional / daerah;
 - (6) Adanya program terpadu dalam pembinaan kebudayaan nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan generasi muda dan oleh raga lebih ditingkatkan pusat dan daerah.
- 4) Pembinaan Kebudayaan Nasional dalam kerangka menambah khasanah kognitif masyarakat baik yang tercakup dalam berbagai pranata, perlu mendapat prioritas perhatian. Wujud konkrit adanya program terpadu dengan cara : ceramah, seminar, pengarahan, serasehan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta secara mantap dan bertahap. Hal inipun bisa disisipkan materi kebudayaan dengan jam lebih pada pelatihan pra jabatan pegawai baru dari berbagai instansi.
- 5) Agar pembinaan dalam pranata keagamaan potensinya bisa lebih dioptimalkan dengan wujud konkrit sebagai berikut :
- (1) Konsepsi dan fungsi kebudayaan nasional lebih dienkulturasikan dalam kognitif dan disosialisasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan yang ada di daerah Bali, baik melalui lembaga tradisional maupun melalui lembaga formal.
 - (2) Pada bidang studi agama, agar penjabaran materi dengan berbagai ilustrasi yang diberikan pada anak didikan di

sekolah menggunakan materi yang berkaitan dengan kebudayaan daerah sebagai sub baru kebudayaan nasional. Karena kebudayaan dan agama sama-sama membahukan nilai-nilai luhur budaya bangsa, atau budaya spritual. Kebudayaan Bali Khusus adalah kebudayaan yang bersifat religius

- (3) Upanisad pada upacara keagamaan di Bali baik yang dilaksanakan oleh seluruh umat yang ada di Bali, disosialisasikan konsepsi dan fungsi kebudayaan nasional karena fungsi kebudayaan nasional, yang ditekankan disini, pembentukan jati diri / identitas dan penganut solidaritas. Makna yang terkandung didalamnya lebih memantapkan kerukunan umat beragama, mengembangkan keserasian, keseimbangan hubungan antar manusia dengan manusia. Hubungan antar manusia dengan menjaga keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Pada kesempatan inilah peranan, fungsi, konsepsi kebudayaan nasional perlu dimantapkan. Perlu juga disadarkan serta diarahkan sebagai penguat solidaritas merupakan salah satu fungsi kebudayaan nasional dapat digunakan sebagai faktor kunci untuk menjaga ketahanan nasional kita yang telah mantap, agar kita dapat mempercepat pembangunan nasional yang berbudaya, mempercepat terwujudnya manusia utuh dan seimbang lahir dan bathin.

Semoga saran tersebut diatas dapat berguna untuk pertemuan kebijaksanaan kebudayaan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan nasional.

Demikian beberapa saran kami ajukan semoga ada manfaatnya

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

1. Bagus, Drs. I Gusti Ngurah, dkk 1977 Adat Istiadat Daerah Bali, Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pencatatan Keb. dh. Bali, Jakarta.
2. Geriya, Drs. I Wayan, dkk, 1982 : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali, Depdikbud, Proyek IDKP; Jakarta.
3. Geriya, dkk 1986 : Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Tahun 1986.
4. Geriya, Drs. I Wayan : Organisasi Kemasyarakatan Desa adat Tenganan Pegringsingan (suatu Pengantar Umum) Denpasar : Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, 1973
5. Geriya, 1977 : Peningkatan Pembangunan Pedesaan di Bali, Team Research Universitas Udayana Denpasar.
6. Hasan Fuad 1987, Kebudayaan : Strategi Fuad Hasan, Prisma, Jakarta.
7. Isjwara, F, SH. 1974 : Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Jakarta
8. Koentjaraningrat, 1984 : Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan; Gramedia; Jakarta.
9. Koentjaraningrat, 1981 : Beberapa pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat; Jakarta.
10. Kleden Ignas 1987 : " Berpikir Strategis Tentang Kebudayaan " Prisma, Jakarta
11. Puja, MA, SH, Gede 1985 : Agama Hindu untuk Kelas II SLTA Mayasari, Jakarta
12. Purwita, Drs. Ida Bagus 1984. : Desa Adat dan Banjar di Bali, kawi Sastra, Denpasar
13. Proyek Pemerintah Tingkat I Propinsi Bali. : Monografi Daerah Bali, Proyek Pemerintah
14. Pemda Tingkat II Badung Bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Badung . : Badung dalam angka 1990

15. Puja, MA, SH, Gede 1985 : Bhagawadgita (Pancama weda), Departemen Agama RI. Jakarta
16. Soelaiman dkk, Drs. 1979. : Pendidikan Luar sekolah, CV. Usaha Nasional, Surabaya.
17. Swarsi 1985 " Beberapa Dimensi Budaya Bali Dalam Upaya Memahami Prilaku Pemuda Di Daerah Bali". Makalah :Buletin Gema Pendidikan Kanwil, Depdikbud Propinsi Bali
18. S.Swarsi dkk. : Upacara Kematian Daerah Bali, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
19. S.SWarsi dkk : Upacara Tradisional Daerah Bali, Depdikbud, Proyek IDKD, Jakarta
20.1981. : "Sarasamuccaya", teks terjemahan komentar, Proyek pengadaan Kita Suci Hindu. Depag. RI. Jakarta.
21. : Undang-Undang No. 12 1976, " Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Aneka Ilmu, Semarang ".

DAFTAR INFORMAN / RESPONDEN

1. N a m a : Dra. Ida Ayu Wiryadi
 Umur : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tinggal : Denpasar
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Kabid Dikmas Dikbud Bali
 Status : Kawin
 Asal : Bali
 Suku Bangsa : Bali
 Agama : Hindu

 2. N a m a : Wayan Sarga
 Umur : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Banjar Jaya Giri / Bali
 Pendidikan : Perawat Kesehatan
 Pekerjaan : Karyawan Patal Tohpati
 Status : Kawin
 Agama : Bali

 3. N a m a : Ni Made Purwati
 Umur : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tinggal : Denpasar
 Pendidikan : SMTA / Kokar Bali
 Pekerjaan : Peg. Negeri / Ibu Rumah Tangga
 Status : Kawin
 Agama : Hindu
-
-

4. N a m a : Gusti Ayu Ketut Suandani
Umur : 35 Tahun Panjer, Denpasar
Tempat Tinggal : Panjer, Denpasar
Pendidikan : -
Pekerjaan : Dagang
Status : Kawin
Agama : Hindu
5. N a m a : I Wayan Dirta
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Panjer, Denpasar
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Dagang
Status : Kawin
Agama : Hindu
6. N a m a : I Gusti Putu Diana
Umur : 27 tahun
Tempat Tinggal : Banjar Wangaya, Denpasar
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Dagang
Status : Kawin
Agama : Hindu
7. N a m a : I Gusti Yuskara
Umur : 36 Tahun
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Tunggal, Denpasar
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pegawai Negeri

- | | | | |
|-----|----------------|---|-----------------------------------|
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |
| 8. | N a m a | : | Made Pasek |
| | Umur | : | 36 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Banjar Pemeragan - Denpasar |
| | Pendidikan | : | SLTA |
| | Pekerjaan | : | Karyawan Puskud Bali |
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |
| 9. | N a m a | : | I Wayang Saeka |
| | Umur | : | 54 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Jalan Kecubung IV/14 Sumerta kaja |
| | Pendidikan | : | SLTA |
| | Pekerjaan | : | Karyawan Puskud Bali |
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |
| 10. | N a m a | : | Drs. Wayan Astina |
| | Umur | : | 48 Tahun |
| | Tempat Tinggal | : | Jalan Raya Kuta 85, Denpasar |
| | Pendidikan | : | SLTA |
| | Pekerjaan | : | Guru |
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |

11. N a m a : Drs. Putu Putra
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Denpasar
Pekerjaan : Kasi Kurikulum Dikmenum
Agama : Hindu
12. N a m a : Drs. I Nengah Musta
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Manik Soga, Jl. Sundu 18 Denpasar
Pendidikan : S1 Pendidikan
Pekerjaan : Kabid Dikdasgu
Status : Kawin
Agama : Hindu
13. N a m a : I Gusti Ngr Worocana, SH
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Kerta Petasikan IX/II, Denpasar
Pendidikan : Sarjana Hukum
Pekerjaan : PD I Fakultas Hukum / Dosen
Status : Kawin
Agama : Hindu
14. N a m a : Drs. Made Dewa Arsana
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1 IHD
Pekerjaan : Guru

- | | | | |
|-----|----------------|---|------------------------------|
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |
| 15. | N a m a | : | Drs. Made Sumerta |
| | Umur | : | 42 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Jalan Wibisana |
| | Pendidikan | : | S1 |
| | Pekerjaan | : | Kepala Sekolah |
| | Status | : | Kawin |
| | Agama | : | Hindu |
| 16 | N a m a | : | Drs. I Nengah Sukarta S.U. |
| | Umur | : | 39 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Jalan Pulau Adi 17, Denpasar |
| | Pendidikan | : | S2 |
| | Pekerjaan | : | Pd I Fs Unud / Dosen |
| | Agama | : | Hindu |
| 17. | N a m a | : | Matiastari |
| | Umur | : | 48 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki |
| | Tempat Tinggal | : | Buana Kubu, Denpasar |
| | Pendidikan | : | Sarmud |
| | Pekerjaan | : | Pastur Katolik |
| | Status | : | Kawin |
| | Asal | : | Timor Timur |
| | Agama | : | Kristen Katolik |

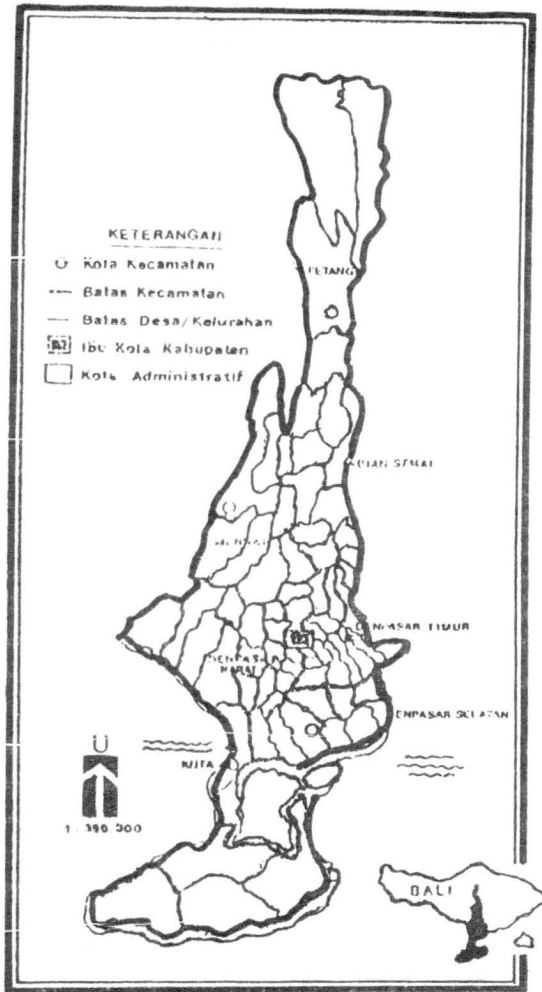
18. N a m a : Sorongan Lapian Stience H.
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Sudirman II/37, Denpasar
Pendidikan : SGA
Status : Kawin
Suku Bangsa : Minahasa
Agama : Kristen / Protestan
19. N a m a : Muhamad Yakop
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal : Jalan G. Patuha VI/89, Denpasar
Pendidikan : PGSLP
Pekerjaan : Guru
Suku Bangsa : -
Agama : Hindu
20. N a m a : Ida Pedanda Gd Raka Klaci
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Geria Braban
Pendidikan : S1 Agama dan Kebudayaan
Pekerjaan : Rochaniawan / Pedanda
Agama : Hindu
21. N a m a : Ngakan Made Samudra
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kerta Petasikan XI/5, Denpasar

- | | | | |
|-----|----------------|---|---------------------------------------|
| | Pendidikan | : | Sarjana Hukum |
| | Pekerjaan | : | Kadis Kebudayaan |
| | Agama | : | Hindu |
| 22. | N a m a | : | Gusti Ayu Ekawati, SH |
| | Umur | : | 36 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Wanita |
| | Tempat Tinggal | : | Denpasar |
| | Pendidikan | : | Sarjana Hukum |
| | Pekerjaan | : | Pegawai Bintal Pemda Tingkat I Bali |
| | Agama | : | Hindu |
| 23. | N a m a | : | Dangin Harmana |
| | Umur | : | 52 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Jalan Ratna Gang 8.2 Denpasar |
| | Pendidikan | : | Sospol |
| | Pekerjaan | : | Pegawai Binsosmental Pemda Tk. I Bali |
| | Agama | : | Hindu |
| 24 | N a m a | : | Ida Kade Tamu |
| | Umur | : | 55 Tahun |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Tempat Tinggal | : | Jl. Murwadi |
| | Pendidikan | : | SLTA |
| | Pekerjaan | : | Pegawai Pemda Tingkat II Badung |
| | Agama | : | Hindu |
| 25. | N a m a | : | Drs. I Ketut Mustika |
| | Umur | : | 37 Tahun |

- : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Jalan Gunung Indrakila II/22, Denpasar
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : Pegawai Pemda Tingkat II Badung
 Agama : Hindu
26. N a m a : Ida Bagus Gede
 Umur : 32 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Braban., Denpasar
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga
 Agama : Hindu
27. N a m a : I Gusti Putu Oka Yudana
 Umur : 45 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Denpasar
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga
 Status : Kawin
 Agama : Hindu
28. N a m a : Drs. I Nengah Medra
 Umur : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Denpasar
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Dosen FS

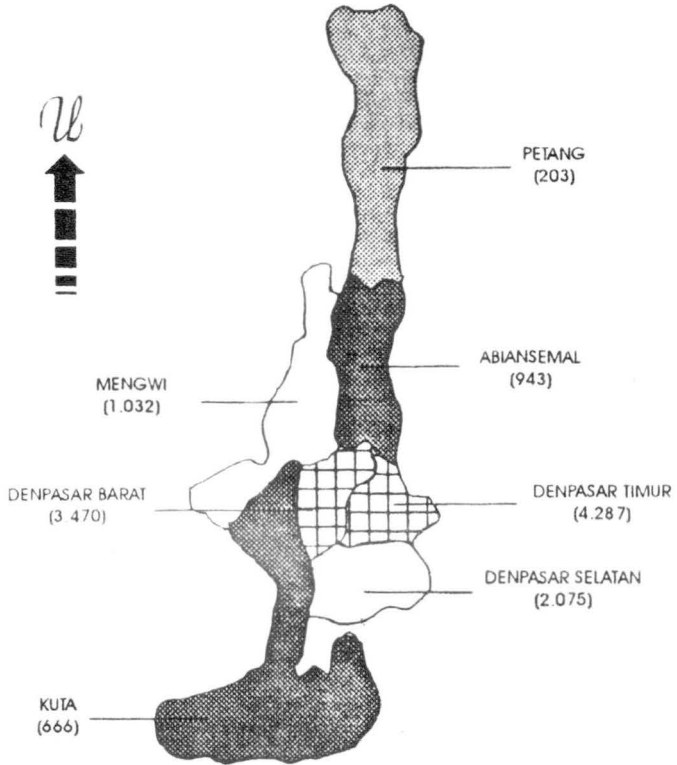
29. N a m a : Drs. Nengah Sudikta S.U.
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Denpasar
Pekerjaan : S1 Dosen FS
30. N a m a : Gst Ayu Mas
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kasi. Sarana Generasi Muda Dikbud Bali
Pendidikan : SLTA
Alamat : Jalan Raya Puputan

PETA KABUPATEN BADUNG



LAMPIRAN 1B

GRAFIK : 2. Kepadatan Penduduk Kab. Badung
Keadaan Tahun 1990
(Jiwa / Km²)



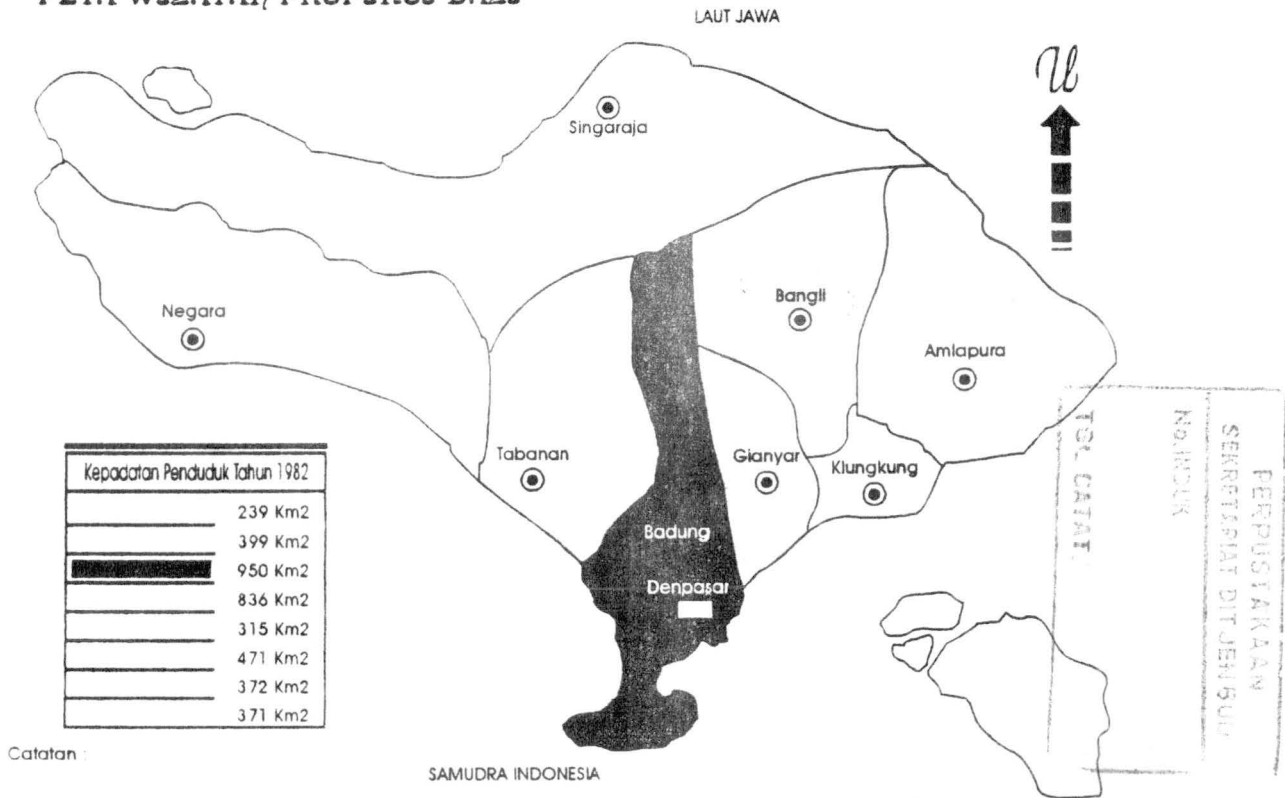
Keterangan



Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung (1.222) Bali (493)
Sumber : Hasil Sensus Penduduk 1990 (SP90)

LAMPIRAN 1A

PETA WILAYAH PROPINSI BALI



Catatan :

Perpustakaan
Jenderal